

JURNAL SOCIETY

ISSN 2338-6932

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Terbit dua kali setahun bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian, kajian analisis kritis dan tinjauan buku dalam bidang sosial.

Pelindung :

Dekan FISIP UBB

Ketua Penyunting :

Luna Febriani, S.Sos., M.A.

Wakil Ketua Penyunting :

Sujadmi, S.Sos., M.A.

Penyunting Pelaksana

Novendra Hidayat, S.IP., M.SI

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc

Prof. Dr. Maria E. Pandu., M.S

Prof. Dr. Afrizal, M.A

Dr. Moh. Ridha Taqwa, M.A

Alamat Penyunting: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Kampus Terpadu Balun Ijuk, Desa Balun Ijuk, Kecamatan Merawangm Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Telp. (0717) 422145, 422965. Faksimile (0717) 421303, Surat Elektronik (Email): labsos_fisipubb@yahoo.com

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas ketras HVS kuarto 3000-5000 kata dengan format seperti tercantum pada halaman belakang. Naskah akan direview oleh penyunting dan penelaah.

PENGANTAR PENYUNTING

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan dan Rahmat-Nya maka Jurnal Society Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Volume VI Nomor I Bulan Juni 2016 dapat diselesaikan. Penyelesaian jurnal ini kami lakukan sebagai upaya untuk konsisten menghasilkan referensi-referensi ilmiah yang dapat bermanfaat bagi civitas akademika maupun masyarakat.

Pada edisi kali ini kau memuat beberapa tulisan ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tulisan ilmiah yang telah dibelrikan oleh penulis, semoga jurnal ini dapat menjadi wadah bagi civitas akademika untuk selalu berkarya demi mewujudkan visi dan misi serta tujuan pendidikan di Program Studi Sosiologi khususnya dan Fakultas Ilmu Politik umumnya,

Kami membuka kesempatan bagi pihak-pihak, baik pengajar, peneliti, praktisi juga alumni untuk dapat berpartisipasi dalam menulis artikel ilmiah. Penulisan artikel ini dapat dilakukan dengan mengacu pada standart dan tata cara yang ada pada aturan di Jurnal Society. Dmikian, semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak..

Salam hangat,

Penyunting

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENYUNTING ~ III

BAHASA PANTUN DALAM MAKNA DAN BUDAYA MASYARAKAT MELAYU BANGKA: SEBUAH KAJIAN ETNOLINGUISTIK ~ 1

PENDAHULUAN ~ 1

KERANGKA TEORITIS ~ 2

1. Definisi Etnolinguistik (Linguistik Antropologi) ~ 2
2. Pantun Melayu Bangka sebagai wacana ~ 2

METODOLOGI ~ 3

1. Metode Pengumpulan Data ~ 3
2. Metode Analisis Data ~ 3
3. Metode Penyajian data ~ 3

ANALISIS DAN PEMBAHASAN ~ 3

Interpretasi pantun-pantun Melayu Bangka ~ 4

KESIMPULAN ~ 12

DAFTAR PUSTAKA ~ 13

MEMAHAMI TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER ~ 15

Pendahuluan ~ 16

Sosiologi Pengetahuan. ~ 18

Dasar-dasar Pengetahuan dalam Kehidupan Sehari-hari ~ 18

Masyarakat sebagai Realitas Obyektif dan Subyektif.~ 19

Metodologi ~ 20

Jihad sebagai Konstruksi Sosial ~ 21

Daftar Pustaka ~ 22

RUANG PUBLIK DAN EKSPRESI POLITIK IDENTITAS ~ 23

A. PENGANTAR ~ 23

B. Tinjauan Teoritis ~ 25

1. Etnisitas, dan Identitas ~ 25
2. RUANG PUBLIK ~ 26

C. Metode Penelitian ~ 27

D. Pergulatan Identitas Ke-Papua-an ~ 27

E. Pemunculan Berbagai Ekspresi Identitas Ke-Papua-an ~ 29

F. Isu KTP Sebagai Arena Pertarungan Politik ~ 31

G. PENUTUP ~ 33

H. Sumber Acuan: ~ 34

OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN ~ 35

I. PENDAHULUAN ~ 35

- I.1. Latar Belakang ~ 35
- I.2. Rumusan Masalah ~ 38
- I.3. Tujuan Penelitian ~ 38

II. TINJAUAN PUSTAKA ~ 38

- II.1. Konsep Otonomi Daerah ~ 38
- II.2. Desentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan ~ 39
- II.3. Manajemen Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah ~ 40
- II.4. Relasi Desentralisasi Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah ~ 43

III. METODE PENELITIAN ~ 43

IV. PEMBAHASAN ~ 44

V. KESIMPULAN ~ 49

DAFTAR KEPUSTAKAAN ~ 50

REPRESENTASI MASKULINITAS *BOYBAND* SHINEE DALAM VIDEO KLIP *RING DING DONG* MELALUI ANALISIS SEMIOTIKA ~ 51

1. PENDAHULUAN ~ 51

- 1.1. Latar Belakang Masalah ~ 51
- 1.2. Rumusan Masalah ~ 53

II. METODE PENELITIAN ~ 53

III. PEMBAHASAN ~ 53

- 3.1. Konsep Maskulinitas ~ 54
- 3.2. Analisis Semiotik Video Klip Shinee Ring Ding Dong ~ 55

IV. PENUTUP ~ 59

Daftar Pustaka ~ 60

RESTORASI LAHAN PASCA TAMBANG TIMAH DI PULAU BANGKA ~ 61

I. PENDAHULUAN ~ 61

- 1.1. Penambangan Timah di Kepulauan Bangka ~ 61
- 1.2. Dampak Praktek Penambangan Timah ~ 62

II. PEMBAHASAN ~ 63

- 2.1. Prinsip-prinsip Restorasi ~ 63
- 2.2. Restorasi sebagai Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Timah ~ 66

III. PENUTUP ~ 68

- 3.1. Kesimpulan ~ 68

DAFTAR PUSTAKA ~ 69

DINAMIKA POLITIK “KETERWAKILAN” DI BABEL: ~ 71

A. Prolog: Apa yang dipersiapkan? ~ 71

B. Realitas Politik Berbasis Primordial di Babel: Sebuah Catatan Masa Lalu dan Kini ~ 72

C. Akar Menguatnya Politik Primordial di Babel ~ 76

D. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Status yang Terlembaga ~ 79

E. Epilog: Apa yang Dikhawatirkan? ~ 79

DAFTAR PUSTAKA ~ 80

BAHASA PANTUN DALAM MAKNA DAN BUDAYA MASYARAKAT MELAYU BANGKA: SEBUAH KAJIAN ETNOLINGUISTIK

Dini Wulansari

Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract

“Pantun Melayu Bangka” is one of the cultural heritages of Bangka Island and has become a unique identity for its people. This descriptive-qualitative study aims to describe and to explore the “pantun” as a picture of the Island’s condition. Data were analyzed by ethnolinguistics approach and supported by socio-cultural values in the form of linguistics characteristic and life reflected in the words, signs, or symbols. Therefore, ethnolinguistics plays an important role in this study not only in determining and relating the use of language and the meaning of “Pantun” itself but also in understanding the cultures. “Pantun” yields an interesting and effective way to make a person think and interpret any ideas logically and artistically as well with the proper diction and harmonization.

Keywords: Pantun, Melayu Bangka, Ethnolinguistics, Semantics

PENDAHULUAN

Pantun adalah salah satu karya sastra rakyat yang bernilai seni dan penuh pesan moral didalamnya. Pantun tidak hanya memiliki unsur-unsur teoritis seperti bentuk, fungsi, karakteristik, dan struktur namun juga didukung oleh nilai sosial budaya sebagai ciri khas kebahasaan dan kehidupan masyarakatnya yang tercermin melalui kata, tanda, lambang, atau simbol tertentu. Mengungkapkan berbagai hal secara tidak langsung dan agar makna yang ingin disampaikan tetap sopan dan santun merupakan bagian dari penggunaan pantun dalam kehidupan sehari-hari seperti yang diterapkan oleh masyarakat Melayu Bangka secara turun-temurun. Pantun telah mengakar dalam kehidupan mereka sebagai warisan budaya yang berisikan nasihat, teka-teki, humor, cinta, bahkan mantera yang dikemas dengan apik sehingga dapat digunakan baik dalam situasi formal maupun informal.

Pantun dipilih sebagai objek kajian karena produk budaya ini dinilai mulai terkikis oleh perkembangan budaya barat. Gejala dan fenomena yang muncul menunjukkan bahwa tidak hanya pemanfaatan pantun dalam acara-acara tertentu di masyarakat Melayu Bangka namun juga di daerah-daerah lain yang semakin menurun bahkan dianggap sebagai hal yang susah untuk dilakukan.

Secara teoretis, struktur pantun sama seperti pantun lainnya yang terdiri atas empat baris dengan ketentuan bahwa dua baris berupa sampiran dan dua baris isi. Isi pantun merupakan inti atau maksud pantun dengan rima (persajakan). Menurut Herfanda (2008) dalam Nurhayati (2011) bahwa rima pantun merujuk kepada dua baris sampiran di atasnya. Dengan kata lain, pantun merupakan karya sastra yang terikat oleh unsur sampiran, isi, rima, dan jumlah suku kata per baris yang berperan sebagai alat pemelihara bahasa dengan menjaga fungsi kata dan kemam-

puan berpikir, serta memiliki fungsi pergaulan yang sangat kuat secara sosial (Ratih: 2012). Fenomena kebahasaan ini menunjukkan adanya relasi antara bahasa, makna, dan budaya sehingga membuat kajian pantun berada pada tataran etnolinguistik yang berfungsi sebagai landasan teori dan payung analisis.

Pengkajian dengan tema makna dan budaya juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain: Yudi Handoko Himawan (2012) dalam tesis yang meneliti tentang *Lelakaq* dalam budaya Sasak. Penelitian tersebut berusaha menemukan makna dibalik tanda-tanda kebahasaan untuk mengungkap cakrawala budaya yg terkandung didalamnya. Nurhayati (2011) dalam artikelnya berjudul “Penggunaan Pantun dalam Bahasa Melayu Bangka” mengkaji pantun dari sisi stilistika. Melalui kajian stilistik dapat diketahui penggunaan bahasa dalam pantun, perlakuan pemantun terhadap konvensi pantun, dan sekaligus makna yang terdapat di dalam pantun itu sendiri. Sedangkan Akhmad Elvian (2009) dalam makalahnya membahas tentang peran organisasi sosial suku bangsa Melayu Bangka sebagai kearifan lokal dan kekuatan sosial dalam pe-nataan dan pembangunan masyarakat.

Tujuan yang paling mendasar adalah diharapkan dapat membantu dalam menafsirkan makna pantun itu sendiri dibalik penggunaan kata, tanda, simbol atau lambang kebahasaannya secara lebih mendalam sehingga mendorong dan meningkatkan kembali rasa bangga berbahasa dan berbudaya daerah, menggambarkan kehidupan sosial budaya masyarakat Melayu Bangka secara menyeluruh agar kelestarian atau pemertahanan penggunaannya dapat berlangsung terus sebagai wujud dari keberagaman budaya, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lain sebagai tambahan pemahaman yang dapat digunakan untuk

studi lanjutan.

KERANGKA TEORITIS

1. Definisi Etnolinguistik (Linguistik Antropologi)

Kajian yang digunakan untuk menelaah bahasa teks dalam pantun adalah kajian etnolinguistik atau lebih dikenal dengan sebutan Linguistik Antropologis. Foley (1997: 3-5) mengungkapkan bahwa linguistik antropologis (etnolinguistik) adalah cabang linguistik yang mengkaji bahasa dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas dan berperan sebagai penopang perilaku kebudayaan dan struktur sosial. Lebih jauh ia menyatakan bahwa linguistik antropologis memandang bahasa melalui sudut pandang konsep antropologis kebudayaan seperti mencari makna yang tersembunyi dibalik penggunaan kata, kesalahan maupun perbedaan bentuk, register, dan gaya.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa linguistik antropologi (etnolinguistik) bersifat interpretatif yang membahas masalah kebahasaan untuk menemukan bentuk pemahaman budaya yang ada (*cultural understanding*). Sedangkan Kridalaksana dalam Kamus Linguistik (2011:59) mengungkapkan bahwa salah satu aspek etnolinguistik (linguistik antropologi) yang menonjol adalah relativitas bahasa, yaitu adanya hubungan antara bahasa dan sikap bahasawan/masyarakat terhadap bahasa itu sendiri.

2. Pantun Melayu Bangka sebagai wacana

Menurut Vass (1992) dalam Titscher dkk (2009) mengungkapkan bahwa sebuah bentuk rangkaian pernyataan atau ujaran atau yang berupa arkeologis merupakan sebuah wacana, tidak terkecuali pantun yang merupakan salah satu contoh selain puisi dan wacana ilmiah. Konsep pantun dalam suatu wacana yang terdiri dari kata-kata, kalimat-kalimat, atau frase yang sal-

ing berkaitan satu sama lain dan kohesif dengan makna yang terkandung di dalamnya yang lazim memiliki empat baris dan dua bagian yaitu sampiran dan isi, serta berakhir dengan pola a-b-a-b dan a-a-a-a.

Pantun Melayu Bangka menggambarkan berbagai hal yang berasal dari kehidupan masyarakatnya seperti kepercayaan (agama, mitos, legenda, dll), tumbuhan, hewan, suku-suku yang ada, makanan khas, dll, dan mencerminkan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat yaitu budi bahasa/pekerti, kasih sayang masyarakat, adat-istiadat, mata pencaharian masyarakat setempat, aktifitas masyarakat, sistem kekerabatan, kesenian, pergaulan muda-mudi, dll.

Unsur-unsur tersebut dijadikan referensi dalam menganalisa pantun sehingga dapat mewakili kepribadian masyarakat setempat (masyarakat Bangka) yang merupakan orang Melayu yang terkenal dengan pemikiran dan falsafah tradisionalnya yang tinggi, asli dan bernilai seni, serta kehidupan yang santun dan beragam.

METODOLOGI

Penelitian tentang bahasa pantun Melayu Bangka ini bersifat deskriptif kualitatif yang lazim diterapkan dalam ilmu linguistik struktural dimana penelitian tersebut dilakukan seobyektif mungkin, semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret: paparan seperti adanya (Sudaryanto, 1988: 62) yang menjadi data lengkap secara tipikal (bukan berdasarkan jumlah) tanpa berusaha untuk dimanipulasi guna memperoleh hasil yang diinginkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Metode Pengumpulan Data

Data dalam kajian ini berupa kumpulan pantun Melayu Bangka dari berbagai pengarang/pemantun yang ada di Pulau Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung baik itu berupa humor/anekdot, nasihat, cinta, teka-teki, muda-mudi, dan budaya. Dari sekian banyak Pantun tersebut dipilih beberapa saja yang dianggap mewakili unsur-unsur/aspek-aspek dalam kajian etnolinguistik ini.

2. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisa secara etnolinguistik dengan tidak menghitung jumlah dari objek/sumber kajian namun seberapa jauh dan mendalam data tersebut dapat menjelaskan tujuan penelitian sehingga pada akhirnya target penelitian dapat tercapai dengan baik dan *reliable*. Pantun diinterpretasikan sesuai dengan kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat Melayu Bangka.

3. Metode Penyajian data

Hasil dari penelitian ini adalah berupa data-data yang berisikan kaidah-kaidah penggunaan bahasa yang telah dianalisis yang disajikan dengan menggunakan metode informal atau verbal melalui kata-kata atau kalimat, tidak berupa sistem penghitungan atau data statistik. Dengan kata lain, penelitian ini cukup disajikan secara deskriptif dalam bentuk tulisan yang informal menggunakan kata-kata biasa untuk mendeskripsikan hasil analisis data (Sudaryanto, 1993, dalam Himawan: 2012).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Membahas pantun memiliki tantangan tersendiri apalagi jika dikaitkan dengan masyarakat yang hidup di daerah dimana pantun tersebut digunakan. Banyak unsur/aspek yang

harus dihubungkan sehingga menunjukkan koherensi antara objek yang akan dikaji dengan faktor pendukung dari kajian itu sendiri misalnya harus betul-betul mengenal karakteristik ataupun kehidupan sosial budaya dari masyarakat setempat atau bagaimana kondisi dan tradisi yang ada.

Berikut disajikan kajian etnolinguistik terhadap serangkaian pantun Melayu Bangka ditinjau dari bentuk, tema, fungsi, dan karakteristiknya sebagai bagian dari sebuah wacana yang disertai interpretasi terhadap pantun-pantun tersebut:

Interpretasi pantun-pantun Melayu Bangka Pantun I

Marong kebun, marong uma

Timah, lada, karet betarak

Pasir putih bertahta kaya

Tersebar luas di irak-irak

Pantun I mengungkapkan bahwa pulau Bangka memiliki sumber daya alam yang kaya dan terkenal tidak hanya di Indonesia namun hingga ke mancanegara yaitu timah. Hasil tambang ini merupakan salah satu andalan masyarakat Bangka dan pemerintah propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai sumber devisa dan sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik itu sandang maupun pangan. Banyak orang Bangka (bahasa Bangka: urang Bangke/Bangkek) yang bekerja menjadi karyawan Timah atau penambang timah rakyat baik yang legal maupun ilegal. Jika sebagai karyawan timah maka orang tersebut bekerja pada sebuah perusahaan legal dan besar seperti PT. Timah Tbk dan PT. Kobatin, sedangkan jika sebagai penambang timah legal (bahasa Bangka: pelimbang timah) maka orang tersebut bekerja (bahasa bangka: ngelangkung) pada sebuah perusahaan mandiri yang dikenal dengan sebutan smelter. Pada umumnya pemilik perusahaan adalah para investor asing, namun lain

halnya dengan penambang timah ilegal yang bekerja dengan pemilik tambang pribadi (TI inkonvensional) dengan upah tergantung dari seberapa banyak timah yang berhasil diperoleh melalui proses pelimbangan yang terkadang sampai bergelut dengan maut apabila tidak dilakukan dengan konsentrasi dan penuh kehati-hatian.

Seiring dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan semakin bertambahnya kebutuhan manusia, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Hal ini berimbas pada membludaknya kedatangan para pencari kerja ke Pulau Bangka yang sebagian besar akhirnya berprofesi sebagai penambang timah ilegal. Selain itu, terdapat juga sumber tambang lain yaitu pasir putih atau kuarsa yang merupakan salah satu komoditi ekspor Pulau Bangka. Pasir ini banyak sekali manfaatnya. Masyarakat Melayu Bangka biasanya menggunakannya untuk membersihkan peralatan memasak yang hitam yang susah dibersihkan dengan deterjen atau sabun cuci biasa. Seperti yang terlihat pada pantun dibawah ini:

Sebelas ribu kilometer persegi

Itulah luas hamparan Bangka

Pulau penyimpan banyak misteri

Dikelilingi indahny **pasir kuarsa**

Dapat disimpulkan bahwa Pulau Bangka memiliki hasil bumi yaitu bahan tambang yang kaya yang berguna bagi masyarakat sekitar dan kehidupannya.

Pantun II

Teluk Kelabat nan gagah berani

Pemberi kekayaan kepada negeri

Sarang **sotong**, **ketam**, dan **pari**

Kubangan **tiram** dijaga **tenggiri**

Calo, **rusep**, **perkasem**, **belacan**

Makanan rakyat sampai ke kota

Nafsu bangkit bukan buatan
Rasa nikmat ngundang selera

Sungguhlah indah pulau Bangka
Orang Kurau memancing **krisi**
Kalau ada kata yang salah
Jangan simpan di dalam hati

Pantun II menggambarkan Pulau Bangka sebagai sebuah kepulauan yang dikelilingi oleh laut dimana memiliki begitu beraneka ragam binatang laut seperti sotong, ketam, pari, tiram, krisi, dan tenggiri yang digunakan untuk kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari. Selain dikonsumsi sebagai lauk-pauk dan dijual, hasil laut tersebut juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan makanan ringan (*snack*) seperti empek-empek, kerupuk, kemplang, getas, belacan (terasi), otak-otak, rusep, dll. Penganan ini sangat terkenal di Indonesia dan juga mancanegara yang biasanya dijadikan oleh-oleh bagi para pembeli.

Selain hasil laut, Pulau Bangka juga memiliki ikan-ikan air tawar seperti gabus dan mayung yang banyak terdapat di genangan-genangan air bekas tambang timah terdahulu, di aliran-aliran sungai atau memang secara sengaja dipelihara yang biasanya dapat dijumpai di wilayah perkampungan. Biasanya ikan-ikan ini juga digunakan untuk konsumsi masyarakat sebagai pengganti ikan laut.

Contoh:

Aek Selan tembus ke Payung
Singgah berenti di Kampong Munggu
Aek banyak **gabus** dan **mayung**
Semile nek e....ambik, jen detunggu

Pantun III

Kayu besi, pelawan, medaru
Dipakai rakyat membuat alat
Urang kampong selalu bersatu
Gotong-royong memanglah adapt

Mentangor berserak sepulau-pulau
Juga **duren**, **binjai**, dan **manau**
Bagaimana hati takkan tertambat
Melihat indahnya pantai Cupat

Nyiur melambai sepanjang pantai
Sama berjaga bak hutan bakau
Dijajari **pelawan**, **nyatoh**, dan **petai**
Pohon **karet** pun pemakmur pulau

Mati beragan si batang **rumbia**
Buah **rambai** kusangka rawa
Berangan-angan boleh saja
Kalau tak sampai jangan kecewa

Pantun III menunjukkan bahwa pulau Bangka memiliki begitu banyak tumbuhan/pohon-pohon yang tumbuh dengan fungsi dan manfaatnya masing-masing. Di masyarakat Bangka tumbuh-tumbuhan ini dikenal dengan sebutan “*kelekak*” yang merupakan simbol dari kekerabatan antar masyarakat pada masa dulu. *Kelekak* pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis yaitu *kelekak* yang ada pemilik sahnya dengan bukti/surat yg berlaku dimana masyarakat mengetahui dan menghormatinya. Jenis ini dapat diwariskan kepada anak cucu si pemilik apabila telah meninggal dunia. Sedangkan *kelekak budel/kek antak/antah* berentah yaitu jenis *kelekak* yang tidak diketahui lagi keturunan pemiliknya sehingga *kelekak* ini dapat dinikmati oleh orang banyak yang masih memiliki hubungan kekerabatan.

Diantara tumbuhan-tumbuhan tersebut ada beberapa jenis yang merupakan sumber mata pencaharian yang menjadi ciri khas masyarakat Bangka sebelum pertambangan dieksploitasi yaitu tanaman lada dan karet. Kedua jenis tanaman ini telah lama dikenal oleh masyarakat setempat yang dulunya mayoritas berprofesi sebagai petani sejak zaman penjajahan. Pekerjaan berkebun merupakan aktifitas sehari-hari yang masih

banyak dijumpai pada saat itu seperti menyadap getah karet dan menanam lada di ume (kebun/ ladang) yang dilakukan dari pagi hingga sore hari. Pendatang dapat melihat hamparan pohon lada dengan “junjung-junjung” nya serta pohon karet dengan keteraturan cara penanamannya di sepanjang jalan dari desa-desa/kampung menuju kabupaten/kota. Seperti yang tergambar jelas dalam pantun berikut ini:

Dari umah desa pergi ke uma
Juga singgah ke marong sahang
Sambil **ngaret**, berkebun **lada**
Sejak Subuh sampai ke petang

Akan tetapi sangat disayangkan semua itu telah berangsur-angsur hilang seperti kelekak atau pepohonan yang telah tergeser posisinya dengan perkebunan kelapa sawit, lahan tambang, dan perumahan.

Selain beraneka ragam tumbuhan/tanaman di atas, masyarakat pulau Bangka juga mengenal salah satu tanaman yang berjenis jamur yang menjadi ciri khas yang dalam istilah mereka dinamakan ‘kulat kuku’ atau jamur kuku yang biasanya dijadikan sebagai lauk pauk.

Pantun:

Kulat kuku digulai lemak
Batang padi berbelah dua
Biar aku dimarah emak
Asal jadi kita berdua

Pantun IV

O.....pulau orang **Lom** dan **Darat**
Kau dijaga oleh **Sekak** dan **Juru**
Sekalipun dirompak Lanun Laknat
Tak pernah gentar **Cina-Melayu**

Kudengar senandung anak Melayu
Senandung ‘rang **Darat**, **Mapur**, dan **Sekak**
Keguyuban orang **Lom**, **Cina**, dan **Juru**
Pendatang pun menyatu penuh sesak

Pantun IV mengungkapkan tentang banyaknya suku atau kelompok masyarakat yang mendiami Pulau Bangka. Dimulai dari zaman masuknya agama Islam di Pulau Bangka dimana pada masa itu terdapat suku terasing yang sudah masuk Islam yang digolongkan sebagai orang Melayu yaitu suku Mapur, sedangkan suku Lom adalah suku yang belum masuk Islam. Variasi penduduk yang terdiri dari beberapa suku menciptakan suatu fenomena yang sangat indah, bagaimana kehidupan yang harus dijalani masing-masing dalam satu kesatuan di Pulau Bangka ini termasuk etnis Tionghoa yang sudah menetap sejak lama.

Menurut data yang dikemukakan oleh Akhmad Elvian (2009) bahwa sebelum agama Islam menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Bangka pada sekitar abad 16, penduduk aslinya dikenal dengan sebutan “orang darat” (orang gunung/*Hill people*) dan “orang laut” (*Sea dwellers*). Keberagaman ini cukup menarik perhatian para pendatang yang mengunjungi Pulau Bangka tak terkecuali J. Van Den Bogaart seorang pegawai pemerintah kolonial Belanda yang mendeskripsikan suku-suku yang ada menjadi empat kelompok atau grup masyarakat pada tahun 1803 (Heidhues, 1992: 87 dalam Elvian, 2009: 4).

Namun seiring perkembangan zaman penduduk Pulau Bangka bertambah dengan semakin banyaknya pendatang yang berasal dari latar belakang dan daerah yang berbeda seperti Jawa, Padang, Bugis, Butun, Batak, dll sehingga secara tidak langsung suku asli mulai terusik dan tergeser. Sekarang “orang gunung/orang darat” (komunitas adat masyarakat Mapur) masih tersisa disekitar Gunung Maras, dan “orang laut” yaitu komunitas masyarakat Sekak masih tersisa di wilayah Kedimpel, Tanjunggunung, dan Jebu. Walaupun begitu, keberagaman tersebut tidak-

lah menjadi halangan bagi masing-masing untuk hidup dalam kerukunan umat yang telah terjalin hingga sekarang seperti yang tampak pada contoh pantun berikut:

Penduduk Bangka campur baur

Bugis, Butun, Melayu, dan Jawa

Saya panjat puji dan syukur

Kedatangan tamu dari penjuru dunia

Pantun V

Pulau **Nek Gergasi** dan **Akek Antak**

Tempat bertahtanya Gunung Maras

Dimana berkumpul banyak puak

Panorama indah di Pantai Matras

Karoh kerik, karoh **akek belapun**

Salak asuk terdengar segala peri

Rusa, tunggang, pelandok berhimpun

Seluruh penghuni hidup serasi

Aek Selan tembus ke Payung

Singgah berenti di Kampong Munggu

Aek banyak gabus dan mayung

Semile nek e....ambik, **jen** detunggu

Banyak jalan lah kenal aspal

Termasok Puding Sangku-Tempilang

Kemana pergi bawalah **tangkal**

Maklom bahaya **Sindai** kek Mawang

Karoh kerik **berok** seutan-utan

Selagi **Akek Antak** berdendang

Nek Gergasi pun nanek ketan

Ayolah budak ikak berlenggang

Pantun V terdiri dari lima buah pantun yang menggambarkan tentang kepercayaan masyarakat Bangka terhadap hal-hal yang mistis atau supra natural berupa makhluk-makhluk ghaib seperti hantu atau sosok penunggu suatu tempat.

Berdasarkan pantun diatas terdapat beberapa sebutan bagi makhluk-makhluk halus tersebut yaitu Nek Gergasi, Akek Antak (selain nama kelekak), Akek Belapun, Jen (Jin), Sindai, Mawang, dll. Adapun tempat-tempat yang ditunggu adalah kampung, sungai, hutan, bukit, gunung, dan *ume* (ladang).

Eksistensi makhluk-makhluk ini dianggap sebagai sesuatu yang nyata sehingga para masyarakat setempat sering berpesan agar setiap bepergian jauh atau pada malam hari harus membawa penangkal, sesuatu yang dianggap mampu menghalau makhluk halus untuk mengganggu manusia contoh yang sederhana: gunting, bawang merah bagi ibu-ibu hamil dan bayi/balita, serta bawang merah dan cabai jika ingin membawa pulang makanan terutama yang terbuat dari ketan dan juga buah pisang. Bahkan kedua jenis makanan ini diusahakan untuk dihindari untuk dibawa pada malam hari karena dipercaya dapat mengundang makhluk halus untuk ikut hingga ke rumah, dan itu sangat berbahaya karena ditakutkan makhluk tersebut mengganggu penghuni rumah bahkan ada yang dapat menyebabkan kesurupan. Apabila terjadi hal demikian maka sosok seorang dukon (dukun) diperlukan. Dukon ini disebut dukon kampung yang dianggap dapat mengusir roh dan makhluk halus dengan cepat walaupun menurut agama itu tidak diperkenankan karena masih mempercayai hal-hal yang mistis. Namun, pada kenyataannya memang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bangka. Oleh karena itu, pemahaman mengenai makhluk-makhluk supra natural harus dikaitkan dengan sistem pengetahuan budaya (Steven, 1990: 125 dalam Elvian, 2009: 7), dalam hal ini sistem kosmologi pada suatu masyarakat.

Pantun VI

O....**Menumbing** bukit bersejarah
Penjaga Mentok di pesisir barat
Disini pejuang disekap penjajah
Tapi makin dekat dengan rakyat

Dari Sungailiat ke Puding Besar
Tentulah lewat Pemali dan Sempan
Siang terlihat, malam berpijar
Begitu **mercusuar Tanjung Kelian**

Gunung Mangkol, Kace, Pedindang

Sumber aek Rangkui Pangkalpinang
Semua warga haruslah berpantang
Merusak lingkungan hutan larang

Depati Amir pahlawan perkasa
Juga **Depati Barin** dan **Batin Tikal**
Semangat kejuangan terus menyala
Sampai kiamat 'kan tetap kekal

Kampung Kurau kampunglah Penyak

Baturusa jerambah besi

Kami bergurau sambil bertanya
Apa gerakan datang kemari

O...kudengar Puteri bersyair
"Tak ada lagikah putera gagah
Seperkasa **Tikal, Barin, dan Amir**
Yang telah membela dengan darah?"

Kumpulan pantun VI ini mengungkapkan bahwa begitu beraneka ragamnya pulau Bangka dilihat dari referensi kunci yang berasal dari kehidupan masyarakat penuturnya. Terdapat kata **Menumbing** yang merupakan tempat bersejarah dimana Bung Karno diasingkan; **Gunung Mangkol, Kace, dan Pedindang** yang merupakan sumber mata air bagi sebagian besar masyarakat Bangka terutama yang berada di daerah

Pangkalpinang sekitarnya; kemudian jembatan Baturusa yang menjadi penghubung antara kota Sungailiat dan Pangkalpinang. Menurut kepercayaan terdapat patung rusa hasil kutukan pada zaman dahulu di dalam sungai yang mengalir dibawahnya. Patung tersebut baru dapat terlihat jika air sungai sedang surut.

Selain itu, pulau Bangka juga terkenal dengan mercusuar nya yang berada di kota Mentok (Muntok), Kabupaten Bangka Barat yang berfungsi mengarahkan kapal-kapal yang akan berlabuh atau melewati perairan Mentok. Namun, sangat disayangkan mercusuar tersebut tidak beroperasi lagi sekarang.

Tokoh pahlawan juga menjadi bagian dari sumber inspirasi pemantun dalam kata-kata nya seperti pahlawan-pahlawan yang terkenal di Pulau Bangka yaitu Depati Amir, Depati Barin, dan Batin Tikal yang menginspirasi orang Bangka dalam berjuang mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pantun VII

Serasi **kain** denganlah **benang**
Biar terlipat tidak tergulung
Serasi adik dengan abang
Sejak dirahim Ibu mengandung

Panton VII ini ingin menjelaskan bahwa dalam masyarakat Bangka dikenal dengan kerajinan tangan yang berupa kain tenun yaitu "cual". Walaupun nama tersebut sama dengan kain tenun cual yang berasal dari Palembang namun dapat dibedakan dari motif dan bahannya. Kemiripan ini disebabkan oleh kejadian di masa lampau. Selain sama-sama rumpun Melayu, Bangka dahulu pernah bergabung dalam satu propinsi dengan Palembang. Otomatis secara tidak langsung pengaruh itu pasti ada. Selain kain, pulau Bangka juga memiliki pakaian tradisional yang biasanya digunakan pada acara-acara adat atau perkaw-

inan dimana baju tersebut berwarna merah seperti baju kurung yang ada di Palembang. Namun, sekarang ini para muda-mudinya tidak terlalu tertarik untuk menggunakannya walaupun di dalam acara sakral. Mereka lebih suka menggunakan kebaya modern karena dianggap lebih simpel dan tidak berat.

Pantun VIII

Kasut **ikak** kayu cendana
Kasut kami bertali kain
Maksud **ikak** nak macam mana
Ape ade maksud yang lain

Akek Saat memikul lapun
Lapun dipikul tenkar masalah
Mintak maaf seribu ampun
Kalok ada cerita salah

Bulan terang turun menyusut
Anak terang habis kesisi
Agik jiat agik keriput
Anak **dayang** orang habis lari

Budak kampong diam di kebun
Jumahnya betarak dimana saja
Dengan semangat hidup berhimpun
Mereka memecah masalah bersama

Nek Miyak penjaga tanah Tempilang
Kampung besar di Selat Bangka
Menyerah tidak, kalah berpantang
Tanah Maras dibela setiap masa

Kumpulan pantun VIII dari buku pantun Zulkarnain Karim ini (2004) menjabarkan istilah-istilah kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat Bangka yang merupakan tanda atau simbol tertentu dari seseorang untuk memanggil kerabatnya. Menurut L.H. Morgan, istilah kekerabatan tersebut digunakan sebagai kunci untuk

mengupas semua sistem kekerabatan yang ada di dunia (Koentjaraningrat, 1958: 261 dalam Elvian, 2009: 16). Contoh:

- Akek (Atok/Abok): sebutan untuk orang tua laki-laki dari ayah dan ibu (kakek)
- Nek (Nenek/nenek): sebutan untuk orang tua perempuan dari ayah dan ibu
- Dayang: sebutan untuk perempuan/wanita Bangka terutama bagi yang masih lajang. Dayang juga digunakan sebagai sebutan bagi perempuan/wanita yang terpilih dalam ajang pemilihan puteri Bangka.
- Ikak: sebutan untuk “kalian”, digunakan informal, ditujukan kepada teman sebaya yang sudah dekat atau akrab
- Budak: sebutan untuk anak (informal)

Istilah kekerabatan dalam masyarakat Bangka bervariasi disesuaikan dengan tingkatan kelahiran, atau posisinya dalam keluarga.

Pantun IX

Teluk Kelabat laut Belinyu
Tampak dari si Tanjung Gudang
Mari sahabat janganlah malu
Menari **dambus** sambil berdendang

Sebelah sana si Tanjung Ru
Jangan lupa ke Teluk Bubus
Ayunkan langkah jangan keliru
Mengiringi lagu irama **dambus**

Kumpulan pantun IX menceritakan tentang seni tradisional orang Bangka berupa tari dan musik. Hal ini membuktikan bahwa dalam masyarakat Bangka seni mendapat tempat yang penting di kehidupan dan tradisinya. Kata Dambus merupakan nama alat musik petik tradisional Pulau Bangka yang terbuat dari kayu. Alat ini dimainkan dalam bentuk nada dan syair dan digu-

nakan dalam acara penyambutan, penghormatan, peringatan, hajatan, perayaan upacara, percintaan dan juga acara keagamaan. Tari dan musik dam-bus biasanya dilakukan pada saat bulan purnama sambil melepas lelah setelah bekerja seharian di *ume* (ladang/kebun).

Pantun X

Ayo kawan, ayo seperadik
Kite **mancing di laut** landai
Beterak **ikan** perlu ditilik
Siang malam pasti kek ramai

Anak nelayan membuat perahu

Perahu diguna sekuat daya
Wahai sahabat orang Melayu
Jangan hilangkan adat budaya

Pantun X diatas jelas mengungkapkan bahwa mata pencaharian masyarakat Bangka selain berkebun/bercocok tanam dan menambang adalah mencari ikan di laut sebagai nelayan, mengingat Pulau Bangka terletak dan dikelilingi lautan dengan beraneka ragam biota laut yang sangat menunjang perekonomian dan kebutuhan masyarakat.

Pantun XI

Adat istiadat pula dijunjung
Sedekah ruah dan juga **nganggung**
Suka duka sama ditanggung
Itu namanya ssenasib sepenanggung

Pantun XI menjabarkan tentang bentuk-bentuk organisasi sosial non-kekerabatan masyarakat Bangka seperti sedekah ruah dan nganggung. Sedekah ruah biasanya untuk menyambut bulan puasa selain dapat dilakukan di rumah juga dapat dilakukan di masjid, surau, atau balai desa dengan menerapkan tradisi nganggung dengan membawa makanan di dalam dulang atau talam

terdiri atas nasi lengkap dengan lauk pauknya yang ditutup tudung saji pandan atau daun nipah khas Bangka dengan motif berwarna-warni cerah untuk dimakan bersama. Makanan yang disajikan merupakan makanan terbaik dari masing-masing keluarga. Nganggung juga merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam rangka memperingati hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan, acara selamatan orang meninggal, acara pernikahan, atau acara lain yang melibatkan orang banyak. Disebut nganggung karena makanan tersebut dibawa dengan cara di “anggun” (diletakkan di bahu). Namun ada juga yang sudah sedikit modern yaitu menggunakan rantang.

Tujuan adat istiadat/tradisi ini adalah untuk menjaga solidaritas, menghormati orang lain, menunjukkan rasa kepedulian sesama, kebersamaan, gotong-royong, serta menjaga dan menjalin tali kekeluargaan/silahturahim antar sesama yang mencerminkan bahwa manusia itu memanglah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Tradisi ini masih akan terasa sekali di daerah pedesaan (kampung).

Pantun XII

Kampung Mesu simpang delapan
Singgah berenti di rumah Wak Ashar
Orang Mesu **rajin, gile maken**
Kuenya habis tujuh pasar

Derite laen ade pule
Kalok sahang jatu harge
Harte bende kok sirne
Dijual nek buat belanje

Pantun XII menggambarkan tentang bervariasinya makanan yang dijual di Pulau Bangka. Muncul keyakinan bahwa jika ingin mencoba bisnis kuliner di Pulau Bangka maka kualitas dari produk yang dihasilkan harus dapat dipertanggu-

ng jawabkan. Dengan kata lain, produk tersebut harus memiliki konsistensi terutama rasa. Pada dasarnya orang Bangka senang makan dan mencoba makanan baru. Ketika rasa tidak diprioritaskan, sebagian besar bisnis tersebut tidak akan dapat bertahan atau gulung tikar. Dampaknya akan terlihat dengan cepat karena informasi yang diperoleh akan mudah tersampaikan dari mulut ke mulut sehingga sangat efektif berperan dalam proses jual beli.

Kemudian terdapat satu keunikan lain dari masyarakat Melayu Bangka yang berhubungan dengan keadaan ekonominya yaitu bahwa orang Bangka dikenal dengan sifat konsumtif. Produk dengan harga tinggi juga akan dibeli jika yang bersangkutan menginginkan dan didukung oleh kondisi keuangan yang cukup. Seperti yang diungkapkan dalam pantun diatas yang mengambil contoh kemakmuran masyarakat ketika musim panen lada/sahang terjadi. Mereka sebagian besar berlomba-lomba menghabiskan uang yang diperoleh untuk membeli kebutuhan sekunder seperti motor, mobil, dll. Akibatnya ketika harga lada jatuh, maka dengan terpaksa mereka harus merelakan barang-barang yang dibeli tersebut untuk dijual kembali dengan harga murah demi kelangsungan hidup. Ini merupakan hal negatif yang tercermin dari sebagian besar pola hidup masyarakat Bangka.

Pantun XIII

Bukan lutung sembarang lutung
Lutung meloncat di dahan kayu
Bukan pantun sembarang pantun
Pantun ciri khas budaya Melayu

Pulau Ketawai jauh menengah
Tempat mejumpa naik perahu
Biar bumi terpecah belah
Takkan hilang adat Melayu

Nanem bunga di dalam taman
Untuk hiasan istana puteri
Biar kite dicap kampungan
Asalkan adat dapet lestari

Anak nelayan membuat perahu
Perahu diguna sekuat daya
Wahai sahabat orang Melayu
Jangan hilangkan adat budaya

Kayu besi, pelawan, medaru
Dipakai rakyat membuat alat
Urang kampong selalu bersatu
Gotong-royong memanglah adapt

Budak kampong diam di kebun
Jumlahnya berterak di mana saja
Dengan semangat hidup berhimpun
Mereka memecah masalah bersama

Mendo Barat sumber karet dan lada
Disini berhimpun tulen Melayu
Rakyatnya makmur hidup bahagia
Kaum muslimin pun hidup bersatu

Nek Miyak penjaga tanah Tempilang
Kampung besar di Selat Bangka
Menyerah tidak, kalah berpantang
Tanah Maras dibela setiap masa

Bubus diterpa puting beliung
Anginnya kencang membangun badai
Biar upaya terkadang buntung
Urang Bangka pantang bertikai

Maen di pantai burung kedidi
Pata sayap e ketimpak kayu
Punye adat kek bebudi
Tula jati diri urang Melayu

Membakar kayu asap mengepul
Asap mengepul sampai udara
Kalau ikak ingin bergaul
Jangan bergaul cara kota

Nanam padi berpetak-petak
Dapat diluruskan dengan tali
Kami **dek suah cigak retak**
Yang penting ikak peduli

Lama aku tertunduk malu sendiri
Kepada diri yang hampir tak berarti
Azan menggamit, klenteng pun bergema
Itulah dia, Pulau Bangka!

Berdasarkan kumpulan Pantun XIII diatas jelas mencerminkan karakteristik dan keunikan Pulau Bangka secara menyeluruh, dimulai dari orang Bangka yang merupakan masyarakat Melayu yang terkenal dengan sopan santunnya baik dalam bertindak maupun bertutur. Tradisi ini sampai sekarang masih terus dilestarikan oleh masyarakat Bangka sebagai simbol kesopanan yang ada. Dinamika kehidupan sosialnya pun berjalan dengan serasi tanpa adanya perpecahan antar kelompok sosial atau antar individu. Masyarakatnya dapat hidup berdampingan saling membantu satu sama lain terutama antara pribumi (Melayu) dan Cina. Hubungan kekerabatannya sangat dekat sekali sejak zaman penjajahan dulu. Oleh karena itu, walaupun Pulau Bangka terdiri dari berbagai macam suku dan latar belakang namun masyarakatnya senantiasa hidup rukun, tenteram, dan damai. Mereka masih menganut adat dengan nilai dan norma yang mengajarkan untuk selalu berbudi luhur. Karakter mereka antara lain pantang menyerah dan suka bergotong royong dalam melakukan sesuatu terutama yang berhubungan dengan kepentingan bersama.

Terdapat satu ungkapan yang sering dika-

takan oleh orang Bangka yaitu “dek suah cigak retak” yang artinya tidak peduli apa yang berlaku asal sama-sama bisa menjaga, dalam hal ini dikaitkan dengan situasi yang terjadi di sekitar. Misalnya budaya kota atau barat yang mulai masuk ke kehidupan sosial masyarakat. Orang Bangka tidak akan terlalu ketat dengan perubahan itu asal norma dan adat tetap dijunjung tinggi. Masyarakat menerima segala bentuk perkembangan namun tetap tidak berpaling dari ciri khas yang terpatri sebagai orang Melayu.

KESIMPULAN

Melalui kajian etnolinguistik terhadap pantun Melayu Bangka selain dapat diketahui bentuk, fungsi, dan struktur gramatikal pantun yang berlaku juga sisi kehidupan sosial masyarakat setempat yang ikut mendukung dan melatar belakangi terbentuknya untaian-untaian kata tersebut.

Bertitik tolak dari hal-hal yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa lewat pantun sebagai ciri khas orang Melayu, seseorang dapat menyampaikan apa saja seperti isi hati, pengalaman, sosial budaya, dll dengan cara yang halus dan sopan dalam situasi dan keadaan apapun baik itu formal maupun informal walaupun yang ingin disampaikan adalah sebuah protes atau ancaman. Pantun dapat membuat seseorang berpikir logis namun tetap artistik dengan pemilihan diksi yang tepat dan penuh dengan harmonisasi bunyi antar kata-kata tersebut sehingga diharapkan bagi pembaca atau pendengar dapat menikmati dan menelaah makna yang terkandung sehingga benar-benar dapat tersampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, R.M.; Nursanto, Suwarni; Gaffar, Z.A; Sulaiman, Mas'ud; dan Saleh,

Yuslizal. 1984. *Latar Belakang Sosial Bahasa Melayu Bangka*. Jakarta:

Depdikbud Republik Indonesia.

Elvian, Akhmad. 2009. Makalah. *Peran Organisasi Sosial Suku Bangsa Melayu Bangka sebagai Kearifan Lokal dan Kekuatan Sosial dalam Penataan dan Pembangunan Masyarakat*. Unpublished.

Foley, W.A. 1997. *Anthropological Linguistics: An Introduction*. UK: Blackwell Publishers Ltd.

Handoko, Yudi. 2012. *Lelakaq dalam Budaya Sasak: Analisis Etnolinguistik*.

Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Karim, Zulkarnain. 2004. *Pangkalpinang Berpantun*. Bangka: Dewan Kesenian Kota Pangkalpinang dan Yayasan Nusantara.

Kridalaksana, Harimurti. 2011. *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi

Mihardja, Ratih. 2012. *Buku Pintar: Sastra Indonesia*. Jakarta: Laskar Aksara.

Nurhayati. 2011. *Penggunaan Bahasa dalam Pantun Melayu Bangka: Sebuah Kajian Stilistik*. Diakses dari <http://nurhayatibizzy.blogspot.com/2011/12/penggunaan-bahasa-dalam-pantun-melayu.html> pada tanggal 21 Desember 2012.

Titscher, Stefan; Mayer, Michael; Wodak, Ruth; dan Vetter, Eva. 2009. *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pustaka Laman

<http://jakafilyamma.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>

<http://amalina-yuyaa.blogspot.com/2012/06/definisi-pantun.html>

MEMAHAMI TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER

Oleh : Aimie Sulaiman

Abstrak

Usaha Berger untuk mendefinisi ulang hakekat dan peranan sosiologi pengetahuan, pertama, usaha mendefinisikan pengertian “kenyataan” dan “pengetahuan”. Gejala-gejala sosial itu ditemukan dalam pengalaman bermasyarakat yang terus menerus berproses, dihayati dalam kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh dengan segala aspeknya (kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif). Dengan kata lain, kenyataan sosial itu tersirat dalam pergaulan sosial, diungkapkan secara sosial dalam berbagai tindakan sosial seperti berkomunikasi lewat bahasa, bekerjasama lewat bentuk-bentuk organisasi sosial. Kenyataan sosial semacam ini ditemukan dalam pengalaman intersubjektif. Konsep intersubjektif menunjuk pada dimensi struktur kesadaran umum ke kesadaran individual dalam suatu kelompok khusus yang sedang saling berintegrasi dan berinteraksi.

Kedua, bagaimana cara meneliti pengalaman intersubjektif sehingga kita dapat melihat adanya konstruksi sosial atas kenyataan ? Dengan kata lain pertanyaan ini juga mempersoalkan bagaimana cara mempersiapkan penelitian sosiologis sehingga ditemukan esensi masyarakat dalam gejala-gejala sosial tersebut

Ketiga, pilihan logika manakah yang perlu diterapkan dalam usaha memahami kenyataan sosial yang memiliki ciri khas seperti bersifat pluralis, dinamis, dalam proses perubahan terus menerus itu ? Logika ilmu-ilmu sosial yang seperti apa yang perlu dikuasai agar interpretasi sosiologis itu relevan dengan struktur kesadaran umum maupun struktur kesadaran individual.

Abstract

Peter Berger attempt to redefine the nature and role of the sociology of knowledge, the first attempt to define the notion of “reality” and “knowledge”. Social phenomena were found in the experience of community that a continuous process, lived in the society as a whole in all its aspects (cognitive, psychomotor, emotional and intuitive). In other words, the social reality is implied in social interaction, social expressed in various social actions such as communicating through language, working through forms of social organization. This kind of social reality found in intersubjective experience. Intersubjective concept refers to the structure dimension public consciousness to individual consciousness in a special group who were with each other and interact.

Second, how to examine the experience intersubjektif so we can see their social construction of reality? In other words, this question also questioned how to prepare the sociological research that found the essence of society in social phenomena.

Third, the choice of logic which one needs to be applied in an effort to understand the social reality that have characteristics such as pluralist, dynamic, in the process of continuous change that ? The logic of the social sciences are what need to be controlled so that it is relevant to the interpretation of the sociological structure of public awareness as well as the structure of the individual consciousness.

Pendahuluan

Orang awam menghuni suatu dunia yang baginya adalah “nyata, meskipun dalam kadar yang berbeda, dan ia “tahu”, dengan kadar keyakinan yang berbeda-beda, bahwa dunia ini memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda pula. Namun berbeda jika seorang filsuf mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai status paling dasar (*ultimate status*) dari “kenyataan” dan “pengetahuan. Apa yang nyata itu? Bagaimana kita tahu? Ini merupakan dua di antara pertanyaan-pertanyaan yang paling tua, tidak hanya bagi penelitian yang sifatnya filosofis, tetapi juga dalam pemikiran manusia itu sendiri. Justru karena itulah maka ikut campurnya ahli sosiologi dalam wilayah intelektual yang secara tradisional dianggap terhormat agaknya akan membuat pemahaman awam berubah, dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan tentangan dari sang filsuf. Karena itu penting untuk menjelaskan bagaimana istilah-istilah itu digunakan dalam konteks sosiologi.

Pemahaman sosiologis mengenai “kenyataan” dan “pengetahuan” kira-kira terletak ditengah-tengah antara pemahaman orang awam dan pemahaman filsuf. Orang awam biasanya tidak berpusing-pusing memikirkan apa yang sudah “nyata” baginya dan mengenai apa yang ia “tahu”, kecuali jika secara tiba-tiba saja ia berhadapan dengan semacam masalah, ia menerima begitu saja (*taken for granted*) “kenyataan” nya dan “pengetahuan”nya.

Seorang sosiolog mempunyai kesadaran yang sistematis mengenai fakta bahwa orang-orang awam menerima begitu saja “berbagai kenyataan” yang sangat berbeda antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Oleh logika disiplinnnya itu seorang sosiolog dipaksa untuk bertanya, setidaknya, apa perbedaan antara kedua “kenyataan” itu mungkin dapat dipahami dalam

kaitan dengan berbagai perbedaan yang terdapat di antara kedua masyarakat. Di pihak lain, filsuf diwajibkan oleh profesinya untuk tidak menerima apa-apa begitu saja, dan untuk memperoleh kejelasan yang maksimal mengenai status paling dasar dari apa yang oleh orang awam dianggap sebagai “kenyataan” dan “pengetahuan”.

Sebagai contoh, ketika orang awam atau filsuf atau sosiolog ditanya tentang konsep “kebebasan” dan “tanggung jawab”? Pasti akan muncul perbedaan makna berdasarkan interpretasinya masing-masing. Orang awam mungkin beranggapan bahwa ia memiliki “kehendak bebas” dan oleh karena itu “bertanggungjawab” atas tindakan-tindakannya. Sementara itu, seorang filsuf dengan metode apapun akan menyelidiki status ontologis dan epistemologis dari konsepsi-konsepsi tersebut. Seperti: apakah manusia itu bebas? Apa itu tanggungjawab? dimana batas-batas tanggung jawab? Dan, seterusnya. Berbeda dengan sosiolog, mungkin sosiolog akan bertanya : apa sebabnya paham tentang “kebebasan” diterima, sebagai sudah sewajarnya dalam masyarakat yang satu dan tidak dalam masyarakat lainnya ; bagaimana “kenyataan”-nya dipertahankan dalam masyarakat yang satu dan bagaimana “kenyataan” ini bisa hilang bagi seseorang atau bagi kolektivitas secara keseluruhan.

Dengan demikian, perhatian sosiologi terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai “kenyataan” dan “pengetahuan”, pada mulanya dibenarkan oleh fakta relativitas sosialnya. Apakah yang “nyata” bagi seorang ulama mungkin saja tidak “nyata” bagi seorang mahasiswa. “Pengetahuan” seorang penjahat berbeda dengan “pengetahuan” seorang ahli kriminologi. Ini berarti bahwa kumpulan-kumpulan spesifik dari “kenyataan” dan “pengetahuan” berkaitan dengan konteks-konteks sosial yang spesifik, dan bahwa hubungan-hubungan itu harus dimasukkan ke dalam

suatu analisa sosiologis yang memadai mengenai konteks-konteks tersebut.

Maka dari itu, sosiologi pengetahuan harus menekuni apa saja yang dianggap sebagai “pengetahuan”, dalam suatu masyarakat, terlepas dari persoalan kesahihan atau ketidaksahihan yang paling dasar (menurut kriteria apa pun) dari “pengetahuan” itu. Dan, sejauh semua “pengetahuan” manusia itu dikembangkan, dialihkan, dan dipelihara dalam berbagai situasi sosial, maka sosiologi pengetahuan harus memahami bagaimana proses-proses itu dilakukan sedemikian rupa sehingga akhirnya terbentuklah “kenyataan” yang dianggap sudah sewajarnya oleh orang awam. Inilah yang menjadi fokus kajian dalam sosiologi pengetahuan, bagaimana pembentukan kenyataan oleh masyarakat (*social contruction of reality*) itu dijabarkan.

Pernyataan-pernyataan diatas mengantarkan kita pada pemahaman bahwa “kenyataan” dan “pengetahuan” yang lahir dari kontruksi sosial atas realitas sehari-hari sangat dipengaruhi oleh individu memahami sesuatu berdasarkan kebiasaan (*habitus*) dan cadangan pengetahuannya (*stock of knowledge*). Penafsiran yang muncul sebagai efek relativitas sosial menjadikan sesuatu berarti berdasarkan definisi diri atas suatu objek. Penjelasan selanjutnya akan membantu pemahaman bagaimana proses “kenyataan” dan “pengetahuan” itu muncul dan dikonstruksi.

Selain konsep diri atau *self*, makna adalah istilah yang sentral dari sosiologi humanis. Pembahasan mengenai makna sangat nampak dalam Interaksionisme Blumer. Teori Blumer bertumpu pada tiga premis utama yang melibatkan makna;

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain.

3. Makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

Bagi Garfinkel, setiap orang bergulat untuk menangkap pengalaman sosial sedemikian rupa sehingga pengalaman itu “punya arti”. Etnometodologi Garfinkel menyangkut isu realitas *common sense* di tingkat individual. Hal itu berbeda dengan Berger, yang menganalisa tingkat kolektif.

Berger banyak “berhutang budi” pada fenomenologi Alfred Schutz –sebagaimana juga Garfinkel, terlebih dalam hal “pengetahuan” dan makna. Schutz menjelaskan tiga unsur pengetahuan yang membentuk pengertian manusia tentang masyarakat, yakni: *dunia sehari-hari*, *sosialitas*, dan *makna* (Novri Susan, 2003:46). Dunia sehari-hari adalah orde tingkat satu dari kenyataan (*the first order of reality*). Ia menjadi dunia yang paling fundamental dan esensial bagi manusia. *Sosialitas* berpijak pada teori tindakan sosial Max Weber. *Social action* yang terjadi setiap hari selalu memiliki makna-makna. Atau, berbagai makna senantiasa mengiringi tindakan sosial, dibalik tindakan sosial pasti ada berbagai makna yang “bersembunyi”/”melekat”.

Sumbangan Schutz yang utama bagi gagasan fenomenologi, terutama tentang makna dan bagaimana makna membentuk struktur sosial, adalah tentang “makna” dan “pembentukan makna”. Orde asasi dari masyarakat adalah dunia sehari-hari, sedangkan makna dasar bagi pengertian manusia adalah *common sense* (dunia akal sehat). Dunia akal sehat terbentuk dalam percakapan sehari-hari. *Common sense* merupakan pengetahuan yang ada pada setiap orang dewasa yang sadar. Pengetahuan ini didapatkan individu secara sosial melalui sosialisasi–dari orang-orang sebelumnya, terlebih dari *significant others*. *Common sense* terbentuk dari tipifikasi yang menyangkut pandangan dan tingkah laku,

serta pembentukan makna. Hal ini terjadi karena individu-individu yang terlibat dalam komunikasi melalui bahasa dan interaksi sosial kemudian membangun semacam sistem relevansi kolektif.

Sosiologi Pengetahuan.

Walaupun Berger berangkat dari pemikiran Schutz, Berger jauh keluar dari fenomenologi Schutz –yang hanya berfokus pada makna dan sosialitas. Karena itu garapan Berger tak lagi fenomenologi, melainkan sosiologi pengetahuan. Namun demikian, Berger tetap menekuni makna, tapi dalam skala yang lebih luas, dan (sekali lagi) menggunakan studi sosiologi pengetahuan. Dalam studi ini, Berger juga memperhatikan makna tingkat kedua, yakni legitimasi. Legitimasi adalah pengetahuan yang diobjektifikasi secara sosial yang bertindak untuk menjelaskan dan membenarkan tatanan sosial (Berger, 1991: 36). Legitimasi merupakan objektivasi makna tingkat kedua, dan merupakan pengetahuan yang berdimensi kognitif dan normatif karena tidak hanya menyangkut penjelasan tetapi juga nilai-nilai moral. Legitimasi, dalam pengertian fundamental, memberitakan *apa yang seharusnya ada/ terjadi dan mengapa terjadi*. Berger mencontohkan, tentang moral-moral kekerabatan, “Kamu tidak boleh tidur dengan X”, karena “X adalah saudarimu, dan kamu adalah saudari X” (Berger, 1991: 37) Jika dikaitkan dengan norma dalam Islam, maka legitimasi itu misalnya, “Kamu tidak boleh *‘berhubungan’* dengan X, karena dia bukan istrimu, dan jika engkau melakukan itu, maka engkau telah berzina, telah melakukan perbuatan dosa yang besar”.

Penelitian makna melalui sosiologi pengetahuan, mensyaratkan penekunan pada “realitas” dan “pengetahuan”. Dua istilah inilah yang menjadi istilah kunci teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990). “Ken-

yataan” adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak individu manusia (yang kita tidak dapat meniadakannya dengan angan-angan). “Pengetahuan” adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik-karakteristik yang spesifik. Kenyataan sosial adalah hasil (eksternalisasi) dari internalisasi dan objektivasi manusia terhadap pengetahuan –dalam kehidupan sehari-hari. Atau, secara sederhana, eksternalisasi dipengaruhi oleh *stock of knowledge* (cadangan pengetahuan) yang dimilikinya. Cadangan sosial pengetahuan adalah akumulasi dari *common sense knowledge* (pengetahuan akal-sehat). *Common sense* adalah pengetahuan yang dimiliki individu bersama individu-individu lainnya dalam kegiatan rutin yang normal, dan sudah jelas dengan sendirinya, dalam kehidupan sehari-hari (Berger dan Luckmann, 1990: 34).

Dalam *Tafsir Sosial atas Kenyataan: sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* Berger dan Luckmann (1990) merumuskan teori konstruksi sosial atau sosiologi pengetahuannya. Fokus kajian dari tulisan ini terdiri atas ; *dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sebagai realitas obyektif, dan masyarakat sebagai realitas subyektif*.

Dasar-dasar Pengetahuan dalam Kehidupan Sehari-hari

Kehidupan sehari-hari telah menyimpan dan menyediakan kenyataan, sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari menampilkan realitas obyektif yang ditafsirkan oleh individu, atau memiliki makna-makna subyektif. Di sisi ‘lain’, kehidupan sehari-hari merupakan suatu dunia yang berasal dari pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan individu, dan dipelihara sebagai

'yang nyata' oleh pikiran dan tindakan itu. Dasar-dasar pengetahuan tersebut diperoleh melalui obyektivasi dari proses-proses (dan makna-makna) subyektif yang membentuk dunia akal-sehat *intersubyektif* (Berger, 1990:29). Pengetahuan akal-sehat adalah pengetahuan yang dimiliki bersama (oleh individu dengan individu-individu lainnya) dalam kegiatan rutin yang normal (dalam kehidupan sehari-hari).

Realitas kehidupan sehari-hari merupakan *taken for granted*. Walaupun ia bersifat memaksa, namun ia hadir dan tidak (jarang) dipermasalahkan oleh individu (Misalnya; civitas kampus FISIP UBB jarang, bahkan belum pernah, menanyakan; mengapa gedung FISIP di Gedung Timah I, mengapa kantor dekan di lantai satu, mengapa kantinnya di sebelah timur. Hal itu sudah dianggap alamiah, sehingga tak perlu dibuktikan kebenarannya). Selain itu, realitas kehidupan sehari-hari pada pokoknya merupakan; realitas sosial yang bersifat khas (dan individu tak mungkin untuk mengabaikannya), dan totalitas yang teratur, terikat struktur ruang dan waktu, dan obyek-obyek yang menyertainya (Samuel, 1993: 9).

Realitas kehidupan sehari-hari selain terisi oleh obyektivasi, juga memuat signifikasi. Signifikasi atau pembuatan tanda-tanda oleh manusia, merupakan obyektivasi yang khas, yang telah memiliki makna intersubyektif walaupun terkadang tidak ada batas yang jelas antara signifikasi dan obyektivasi. Sistem tanda meliputi sistem tanda tangan, sistem gerak-gerik badan yang berpola, sistem berbagai perangkat artefak material, dan sebagainya. Bahasa, sebagai sistem tanda-tanda suara, merupakan sistem tanda yang paling penting. Signifikasi tingkat kedua ini merupakan sarana untuk memelihara realitas obyektif. Dengan bahasa realitas obyektif masa lalu dapat diwariskan ke generasi sekarang, dan

berlanjut ke masa depan. Bahasa memungkinkan menghadirkan obyek tersebut ke dalam situasi tatap muka.

Masyarakat sebagai Realitas Obyektif dan Subyektif.

Manusia berbeda dengan binatang. Binatang telah dibekali insting oleh Tuhan, sejak dilahirkan hingga melahirkan sampai mati. Manusia secara biologis dan sosial terus tumbuh dan berkembang, karenanya ia terus belajar dan berkarya membangun kelangsungannya. Upaya menjaga eksistensi itulah yang kemudian menuntut manusia menciptakan tatanan sosial. Jadi, tatanan sosial merupakan produk manusia yang berlangsung terus menerus sebagai keharusan antropologis yang berasal dari biologis manusia. Tatanan sosial itu bermula dari eksternalisasi, yakni; *pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya* (Berger, 1991: 4-5).

Masyarakat sebagai realitas obyektif menyiratkan *pelembagaan* di dalamnya. Proses *pelembagaan* (institusionalisasi) diawali oleh eksternalisasi yang dilakukan berulang-ulang sehingga terlihat polanya dan dipahami bersama- yang kemudian menghasilkan *pembiasaan* (habitualisasi). Habitualisasi yang telah berlangsung memunculkan *pengendapan* dan *tradisi*. *Pengendapan* dan *tradisi* ini kemudian diwariskan ke generasi sesudahnya melalui bahasa. Disinilah terdapat *peranan* di dalam tatanan kelembagaan, termasuk dalam kaitannya dengan pentradisian pengalaman dan pewarisan pengalaman tersebut. Jadi, *peranan* mempresentasikan tatanan kelembagaan atau lebih jelasnya; pelaksanaan *peranan* adalah representasi diri sendiri. *Peranan* mempresentasikan suatu keseluruhan rangkaian perilaku yang melembaga, misalnya peranan hakim dengan peran-peran lainnya di sektor hukum.

Masyarakat sebagai realitas obyektif juga menyiratkan keterlibatan *legitimasi*. Legitimasi merupakan obyektivasi makna tingkat kedua, dan merupakan pengetahuan yang berdimensi kognitif dan normatif karena tidak hanya menyangkut penjelasan tetapi juga nilai-nilai. Legitimasi berfungsi untuk membuat obyektivasi yang sudah melembaga menjadi masuk akal secara subyektif.

Perlu sebuah *universum simbolik* yang menyediakan legitimasi utama keteraturan pelembagaan. *Universum simbolik* menduduki hirarki yang tinggi, mentasbihkan bahwa semua realitas adalah bermakna bagi individu, dan individu harus melakukan sesuai makna itu. Agar individu mematuhi makna itu, maka organisasi sosial diperlukan, sebagai pemelihara *universum simbolik*. Maka, dalam kejadian ini, organisasi sosial dibuat agar sesuai dengan *universum simbolik* (teori/legitimasi). Di sisi lain, manusia tidak menerima begitu saja legitimasi. Bahkan, pada situasi tertentu *universum simbolik* yang lama tak lagi dipercaya dan kemudian ditinggalkan. Kemudian manusia melalui organisasi sosial membangun *universum simbolik* yang baru. Dan dalam hal ini, legitimasi/teori dibuat untuk melegitimasi organisasi sosial. Proses "legitimasi sebagai legitimasi lembaga sosial" menuju "lembaga sosial sebagai penjaga legitimasi" terus berlangsung, dan dialektik. Dialektika ini terus terjadi, dan dialektika ini yang berdampak pada perubahan sosial.

Masyarakat sebagai kenyataan subyektif menyiratkan bahwa realitas obyektif ditafsiri secara subyektif oleh individu. Dalam proses menafsiri itulah berlangsung internalisasi. Internalisasi adalah proses yang dialami manusia untuk 'mengambil alih' dunia yang sedang dihuni sesamanya (Samuel, 1993:16). Internalisasi berlangsung seumur hidup melibatkan sosialisasi, baik primer maupun sekunder. Internalisasi ada-

lah proses penerimaan definisi situasi yang disampaikan orang lain tentang dunia institusional. Dengan diterimanya definisi-definisi tersebut, individu pun bahkan hanya mampu memahami definisi orang lain, tetapi lebih dari itu, turut mengkonstruksi definisi bersama. Dalam proses mengkonstruksi inilah, individu berperan aktif sebagai pembentuk, pemelihara, sekaligus perubah masyarakat.

Metodologi.

Menurut Hanneman Samuel, metodologi Sosiologis Berger mengacu pada tiga poin penting dalam kerangka teori Berger yang berkaitan dengan arti penting makna yang dimiliki aktor sosial, yakni: "semua manusia memiliki makna dan berusaha untuk hidup dalam suatu dunia yang bermakna". Makna manusia pada dasarnya bukan hanya dapat dipahami oleh dirinya sendiri, tetapi juga dapat dipahami oleh orang lain.

Terhadap makna, beberapa kategorisasi dapat dilakukan, *pertama*, makna dapat digolongkan menjadi makna yang secara langsung dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya; dan makna yang tidak segera tersedia secara 'at-hand' bagi individu untuk keperluan praktis membimbing tindakan dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, makna dapat dibedakan menjadi makna hasil tafsiran orang awam, dan makna hasil tafsiran ilmuwan sosial. *Ketiga*, makna dapat dibedakan menjadi makna yang diperoleh melalui interaksi tatap muka, dan makna yang diperoleh tidak dalam interaksi (misalnya melalui media massa).

Sosiolog menekuni dan memahami makna pada level interaksi sosial. Karena itu, Berger menjadikan interaksi sosial sebagai *subject matter* sosiologi. Interaksi ini melibatkan hubungan individu dengan *masyarakat*. Individu adalah *acting subject*, makhluk hidup yang senantiasa

bertindak dalam kehidupan sehari-harinya. Tindakan individu dilandaskan pada makna-makna subyektif yang dimiliki aktor tentang tujuan yang hendak dicapainya, cara atau sarana untuk mencapai tujuan, dan situasi serta kondisi yang melingkupi pada sebelum dan/atau saat tindakan itu dilaksanakan. *Masyarakat* merupakan suatu satuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari relasi-relasi antar manusia yang (relatif) besar dan berpola (Samuel, 1993: 3).

Interaksi sosial sebagai *subject matter* adalah interaksi sosial dengan dimensi horisontal dan vertikal. Horisontal tak hanya bermakna interaksi antar individu dengan individu lainnya, tetapi meliputi kelompok dan struktur sosial. Karena itu faktor kultural, ekonomi, dan politik tak dapat diabaikan. Perjalanan sosial manusia tak lepas dari masa lalu dan masa mendatang, sehingga aspek vertikal (sejarah) menjadi penting. Hal ini tidak berarti menghilangkan sosiologi sebagai disiplin ilmiah dan menyatu dengan ilmu sejarah, tapi sosiologi meminjam data sejarah untuk meningkatkan pemahamannya tentang realitas masa kini.

Jihad sebagai Konstruksi Sosial. (Sebuah Contoh analisa sederhana dengan Sosiologi Pengetahuan).

Sejak jihad dieksternalisasikan Nabi Muhammad dan kaumnya empat belas abad silam, sejak itu jihad menjadi isu dan amalan penting yang bertahan hingga kini. Sejak itu pula jihad menjadi fenomena sosial yang menyejarah sekaligus fenomenal. Jihad tak hanya menjadi realitas bagi kaum muslimin, tetapi juga umat yang lain. Jihad telah menjadi makanan sehari-hari umat Islam. Sehingga umat Islam di luar Arab tak perlu lagi menerjemahkan jihad dalam bahasa ibunya. Kata jihad sudah mendarah daging sebagaimana kata Islam itu sendiri. Karena itu fenomena jihad selalu tergambar nyata. Bahkan umat Islam

menyimpan pengalaman tentang jihad sebagai pengetahuan dan realitas sosial mereka.

Mengikuti konstruksi sosial Berger, realitas sosial jihad menjadi terpelihara dengan ter'bahasa'kannya dalam Alquran, hadits, buku-buku/manuskrip ulama yang terpelihara hingga kini. Agama (Islam) berhasil melegitimasi jihad, terlebih dengan menjadikan agama sebagai ideologi negara. Alhasil, bersatunya dua kekuatan besar (agama dan negara) selama berabad-abad (selama imperium Islam) menjadikan jihad sebagai realitas sosial yang tak terbantahkan, bahkan mustahil untuk dihilangkan.

Sosialisasi jihad terus berlangsung seiring sosialisasi Islam. Jihad terus diinternalisasi oleh individu muslim, sehingga menjadi realitas subyektif. Realitas subyektif itu terus dieksternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jihad memiliki makna yang luas, sehingga dapat dieksternalisasikan dalam setiap detik dan ruang kehidupan kaum muslim. Jihad mengisi keseharian rakyat Palestina yang mengangkat senjata melawan Israel, menjadi titik tolak muslimin Irak mengusir Amerika dan sekutunya, menjadi jalan muslimin Amerika menyebarkan Islam *rahmatan lil-'alamiin*. Jihad juga menjadi ruh dakwah mubaligh-mubaligh Muhammadiyah dan kyai-kyai NU, perjuangan kader-kader partai politik Islam, dan perjuangan menegakkan syariat Islam bagi para mujahid-mujahid organisasi pemuda. Jihad adalah sahabat umat Islam saat menunaikan sholat, puasa, dan haji, saat bekerja menghidupi keluarga, saat membantu mengentaskan rakyat miskin, dan saat mengkhidmatkan dirinya dalam ibadah, dimana pun dan kapan pun. Tak pelak, jihad memiliki kenyataan obyektif yang tak bisa dinihilkan. Namun di sisi lain, jihad adalah kenyataan subyektif yang relatif, plural, dan dinamis. Jihad *qital* bisa menjadi nyata bagi sebagian orang, tapi bisa tidak menjadi 'nyata' bagi

sebagian yang lain. Jihad memiliki keragaman makna (subyektif), tiap individu memiliki penafsiran sendiri-sendiri, dan penafsiran (makna subyektif) itu terus berproses dan memungkinkan untuk berubah.

Daftar Pustaka

- Agger, Ben, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.
- Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, Surabaya: Insan Cendekia, 2002.
- Ba-Yunus, Ilyas dan Farid Ahmad, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer*, Jakarta: Mizan, 1988.
- Berger, Peter L, *Langit Suci; Agama sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- _____, dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Goodman, Douglas J. dan George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern, Edisi ke-6*, Jakarta: Kencana, 2004
- Hardiman, Fransisco Budi, *Kritik Ideologi: menyingkap kepentingan Pengetahuan bersama Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Penerbit Buku Baik, 2004.
- Poloma. Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ritzer, George, *Sosiologi; Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta, 1985
- Soeprapto, H.R. Riyadi, *Interaksionisme Simbolik: Perspektif Sosiologi Modern*, Yogyakarta: Averroes Press dan Pustaka Pelajar, 2002
- Zeitlin, Irving M, *Memahami Kembali Sosiolo-*

gi, Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer, Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 1995

RUANG PUBLIK DAN EKSPRESI POLITIK IDENTITAS;

(Studi Tentang Pergulatan Identitas Ke-Papua-an di Yogyakarta)¹

Oleh : Moh. Rafli Abbas, S.IP., M.A²

Abstract

Study on the dynamics of communities of Papua and its identity. Giddens statement of that identity is a social construction that can be formed in space and time. For the author of the Papua community is a unique community, not only the striking racial differences but they are very ideologically in fighting for his rights in Yogyakarta. This paper tries to answer the question of how the condition of identity of which belonged to someone after constructed? What is done with the collective identity after formed?. This research is the study of the field with a qualitative approach.

Key words: *Ethnicity, identity, public space, Ke-Papua-an*

1 Tulisan ini sebagian di ambil dari pengembangan pembahasan Thesis Penulis Yang dipresentasikan pada Tanggal 9 Januari 2014 pada Program S2 JPP UGM.

2 Staf Pengajar Program Studi Ilmu Politik FISIP UBB 2016

A. PENGANTAR

*We know of no people without names, no languages or cultures in which some manner of distinctions between self and other, we and they.*¹Kutipan ini mempertegas bahwa tidak ada satu orangpun tanpa identitas yang digunakan sebagai pembeda dengan orang lain. Yogyakarta dengan predikat kota pelajar dan budaya menjadi daya pikat tersendiri berbagai etnis seantero negeri untuk menjadikan kota ini sebagai destinasi utama wisata pendidikan. Masing-masing etnis membawa budayanya tanpa harus merasa terintimidasi menjadi “Wong Jowo”. Perasaan inilah yang dirasakan orang Papua ketika pertama menginjakan kaki di bumi Mataram.

Mereka tetap menjadi “*Pace/Mace Papua*” yang harus bangga dengan identitasnya. Pada dasarnya, identitas dapat berubah karena merupakan konstruksi sosial. Perubahan juga

terjadi pada penandanya. Konstruksi identitas tentunya terjadi pada berbagai etnis dan komunitas. Salah satunya adalah komunitas Papua. Penanda komunitasPapua dapat dilihat dari perbedaan jenis rambut, warna kulit, dialeg, dan kebiasaan yang dilakukan.

Tulisan ini sebenarnya bertujuan Untuk mengetahui cara komunitas Papua mengekspresikan identitas Ke-Papua-an di ruang publik beserta berbagai implikasi yang ditimbulkan?. Pernyataan ini sekaligus upaya melacak dan menjawab rasa penasaran penulis terhadap pertanyaan bagaimana dinamika sebuah identitas di level individu ketika berhasil di konstruksikan pada level komunitas?, bukannya sebuah identitas adalah sesuatu yang tidak statis melainkan dinamis?.

Deskripsi singkat Alfred Russel Wallace tentang penduduk asli Papua dalam bukunya yang berjudul *The Malay Archipelago, the # of the Orang-Utan and the Bird Paradise* tahun 1890 menyebutkan bahwa etnis Papua

1 Manuel Castells, *The Power of Identity* (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 1997), 1.

memiliki penanda warna kulit sangat gelap, kecoklatan atau hitam, kadang-kadang hampir mendekati, tetapi tidak pernah sama dengan pekatnya warna kulit ras Negroid. Etnis Papua sangat berbeda dalam warna kulit yang melebihi Melayu, kadang-kadang agak hitam atau kecoklatan dengan rambut sangat kasar dan kering.

Secara geografis, Papua terletak kurang lebih 1° dari Selatan katulistiwa, antara 130° Bujur Barat dan 141° Bujur Timur. Secara topografis, Papua terbagi dalam tiga wilayah. **Pertama**, wilayah “kepala burung”, yang mencakup Manokwari, Fak-fak, Sorong, Kaimana, Teminabuan, Bintuni, Ransiki, Ayamaru, dan Windesi. **Kedua**, wilayah pegunungan tengah sampai utara, yakni Jayawijaya, Nabire, Kepulauan Yapen, Biak, Numfor, Supiori, Sarmi, dan Jayapura. **Ketiga**, wilayah selatan pegunungan tengah, yakni Mimika, Asmat, dan Merauke.²

Pada mulanya kedatangan komunitas Papua di Yogyakarta diawali peristiwa Trikora pada tahun 1961. Trikora merupakan suatu operasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang sebagai suatu operasi pembebasan Irian Barat. Bagi masyarakat Papua peristiwa ini menorekan luka mendalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat Papua yang merasa Trikora merupakan tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh Pemerintah republik Indonesia terhadap Papua untuk berintegrasi dengan Indonesia. Padahal pada waktu itu masyarakat Papua sedang berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya sendiri.

Keberadaan komunitas Papua di Yogyakarta mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu mulai ting-

kat menengah, S1, S2, dan bahkan pada level S3 (doktoral). Kabarnya jumlah mereka pun sangat fantastis, namun upaya penulis melacak sejumlah data-data tentang komunitas Papua di DIY tidak membuahkan hasil. Beberapa instansi Pemerintah Daerah tepatnya Instansi Kesbangpol Kota maupun Propinsi tidak memiliki data yang pasti mengenai jumlah komunitas Papua di Yogyakarta. Penyebabnya diduga belum adanya sensus tentang jumlah komunitas masyarakat Papua yang berada di Yogyakarta.

Jika merujuk beberapa artikel *online* dapat diketahui bahwa perkiraan jumlah mahasiswa Papua di Yogyakarta mencapai lebih dari 7.300 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa sesepuh komunitas Papua diketahui bahwa di Yogyakarta terdapat sekitar 19 Asrama Dan 16 paguyuban, dan terdapat 1 organisasi induk, yaitu IPMA-PA. Namun demikian, lagi-lagi hambatan yang ditemui penulis ketika menanyakan tentang data-data tersebut lagi-lagi mereka pun tidak memilikinya. Hal ini disebabkan organisasi IPMAPA sebagai organisasi induk yang mampu menginfentarisir seluruh data-data tersebut dua tahun terakhir ini masih vakum, sehingga seluruh data-data berbagai kegiatan komunitas Papua di Yogyakarta menjadi terbengkalai.

Mayoritas komunitas Papua di Yogyakarta tinggal di asrama. Sangat jarang ditemukan mahasiswa Papua yang tinggal di tempat-tempat kos. Berdasarkan hasil penelusuran, dapat diketahui bahwa masyarakat Papua masih menghadapi diskriminasi terkait tempat tinggal. Banyak lokasi kos yang tidak bersedia menerima mahasiswa asal Papua. Perlakuan diskriminatif yang diterima inilah yang kemudian membuat mahasiswa Papua lebih banyak bergaul dan bersosialisasi dengan sesama komunitas Papua saja. Masyarakat

2 Bernarda Meteray, 2012, *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, Jakarta: Kompas, hal. 1.

Papua di Yogyakarta lebih memilih untuk tinggal di asrama daripada harus menghadapi perilaku diskriminatif yang menyakitkan dari masyarakat setempat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Etnisitas, dan Identitas

Sebenarnya makna etnis adalah sebuah pola relasi antar manusia. Dalam hal ini adalah pola yang diwarnai adanya pembatasan atas dasar ciri-ciri dan penampilan fisik seperti warna kulit, warna rambut, agama, bahasa, dan adat istiadat.³ Ada yang menarik dari pendapat yang dikemukakan oleh Federik Barth yang memandang identitas etnis sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks, manakala batasan-batasan simbolik terus-menerus di bangun dari faktor hitungan sejarah, bahasa, dan pengalaman masa lampau.⁴ Dari sisi yang berbeda Erikson menegaskan bahwa kemunculan kelompok etnis tersebut paling sedikit telah menjalin hubungan atau kontak dengan etnis yang lain, dan masing-masing menerima gagasan dan ide-ide perbedaan diantara mereka seperti secara kultural.⁵

Pemaparan konsep tentang etnis tersebut di atas menimbulkan pertanyaan besar mengenai apa bedanya kata “etnis” dan “etnisitas” itu sendiri. Untuk jawabannya, dapat dijelaskan bahwa kata etnisitas itu sendiri seperti yang dijelaskan oleh Barker, merupakan sesuatu yang tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Etnisitas merupakan konsep relasional yang mendasarkan pada kategorisasi identifikasi diri (*Self identifica-*

tion).⁶ Lebih lanjut Barker menjelaskan bahwa apabila syarat ini terpenuhi maka tidak ada yang namanya etnisitas, karena etnisitas pada hakikatnya adalah sebuah aspek pola hubungan, bukan milik suatu kelompok. Hubungan relasi tersebut tidak selamanya merupakan hubungan yang harmonis.

Identitas dapat dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial. Etnisitas merupakan ekspresi dari produk masa lalu, kebangkitan asal-usul yang sama, hubungan sosial, dan kesamaan dalam nilai-nilai budaya dan ciri-ciri seperti bahasa dan agama.⁷ Lebih lanjut dijelaskan bahwa dimensi sejarah tentang identitas menunjukkan identitas itu tidak pasti, tidak konstan, dan tidak kekal, tetapi kadang berubah dan dapat dibentuk atau dikonstruksi. Banyak faktor yang dapat berpengaruh dalam konstruksi identitas, seperti halnya agama, kekuasaan, politik, dan lain sebagainya.

Chris Barker, misalnya mendefinisikan identitas sebagai sesuatu yang bersifat sosial dan kultural. Pendefinisian tersebut didasarkan dengan dua alasan. **Pertama**, gagasan mengenai apa dan siapakah seseorang pada dasarnya merupakan persoalan kultural. Seseorang adalah produk budayanya. **Kedua**, bahasa dan praktek sosial menjadi sumber proyek identitas, pada dasarnya bersifat sosial. Bahasa tidak dapat berkerja tanpa ada komunitas tertentu yang menerima, mempraktekan, dan mendukungnya.⁸ Penjabaran identitas dalam masyarakat terkadang lebih bersifat

3 Ubed Abdillah, 2002, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang, Yayasan Indonesia Tera, hlm. 79.

4 Barth, Frederik (ed). 1988. *Kelompok etnis dan Batasannya*. Terjemahan Nining L. Susilo. Jakarta : UI Press.

5 Erikson, Erik H. 1989. *Identitas dan siklus Hidup Manusia*. Terjemahan Agus Cremes. Jakarta: Gramedia.

6 Barker Chris, 2004, *Culture Studies: Teori dan Praktik*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, hlm. 193

7 Victor King and William D. Wilder, *The Modern Anthropology of South-East Asia: an Introduction by Victor King (2003-03-02)* (publication place: Routledge (2003-03-02), 1656), 1.

8 Chris Barker, *Cultural Studies: Theory and Practice* (London: SAGE Publications Ltd, 2000), 1.

membicarakan kategorisasian etnis dalam suatu komunitas. Padahal komunitas bisa jadi memiliki sistem klasifikasi yang berbeda, khususnya ketika kita mendefinisikan diri mereka sendiri (merujuk suatu komunitas),.

Castells misalnya di tahun-1997, menulis dalam buku *"The Power of Identity"* menjelaskan konstruksi identitas terbentuk dari nilai dan pengetahuan. Proses konstruksi tersebut didasari oleh atribut kultural yaitu mengutamakan atas sumber makna lain. Karena identitas merupakan sumber nilai, pengalaman dan pengetahuan dan atribut kultural yang menjadi nilai bagi Individu atau aktor kolektif. Namun ini memungkinkan terjadinya pluralitas identitas yang didasari oleh sumber tekanan dan kontradiksi antara representasi diri (*self representatif*) dan aksi sosial (*social action*).

2. RUANG PUBLIK

Banyak cara sebuah komunitas mengekspresikan identitas mereka di ranah publik mulai dari cara berpenampilan, berbicara, dan bahkan sampai dalam berperilaku. Kesemuanya itu menurut peneliti adalah strategi perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dikalangan kelompok-kelompok tertentu. Modal simbol identitas yang dimiliki kelompok Papua, untuk mewujudkan sasaran perjuangan tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi bila diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan identitasnya di tingkat Nasional. Perjuangan tersebut sebagai suatu kondisi, di mana subyek (komunitas Papua) dapat melestarikan keunikan dan karakter-karakter spesifiknya dengan dukungan dari komunitas tempat ia tinggal.

Ruang publik tidak merupakan suatu ruang fisik, tetapi suatu ruang sosial yang diproduksi oleh tindakan komunikatif. Ruang publik juga bukan suatu institusi atau organisasi politik, teta-

pi suatu ruang tempat warganegara terlibat dalam deleberasi dialogal mengenai isu publik, juga bukan institusi pengambilan keputusan, bukan pula suatu pertemuan publik dengan agenda tertentu. Tetapi ruang publik dapat diartikan sebagai suatu arena dan tempat dilakukan pembicaraan yang "tak terikat secara institusional". Melalui dialog ruang publik kita mengaitkan "apa yang ada dalam diri kita, "dengan apa yang ada dalam kelompok komunitas, "pengalaman personal", ataupun dengan makna dunia politik".⁹

Habermas misalnya merumuskan apa itu "ruang publik" beserta unsur-unsur yang terkait di dalamnya dengan mengatakan ruang publik pertama-tama dimaksudkan suatu wilayah kehidupan sosial yang kita maknai opini publik. Dimana akses ruang publik terbuka bagi semua warganegara. Sebagian dari ruang publik terbentuk dalam setiap pembicaraan dimana pribadi-pribadi berkumpul untuk membentuk suatu 'publik'. Bila publik menjadi besar, komunikasi ini menuntut suatu sarana untuk diseminasi dan pengaruh; zaman sekarang surat kabar dan majalah, radio dan televisi menjadi media ruang publik.¹⁰

Habermas sangat tegas menjelaskan ruang publik memberikan peran penting dalam proses demokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik harus bersifat otonom, tanpa intervensi dari pemerintah. Ruang publik merupakan sarana warga berkomunikasi, berdiskusi, berargumen,

9 Kim, Joohan & Eun Joo Kim, (2008), 'Theorizing dialogic deliberation: everyday political talk as communicative action and dialogue', *Communication Theory*, 18; pp.51-70.

10 Craig Calhoun, ed., *Habermas and the Public Sphere* (Cambridge, MA: The MIT Press, 1992), 1.

dan menyatakan sikap terhadap problematika politik. Ruang publik tidak hanya sebagai institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi antar warga itu sendiri.

C. Metode Penelitian

Apabila ditinjau dari pendekatan yang digunakan, maka metode penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan dan analisis data bersifat induktif guna memperoleh hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹¹ Pendekatan kualitatif pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung ke lokasi yang menjadi obyek utama penelitian, yaitu komunitas mahasiswa Papua yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Apabila ditinjau dari model analisisnya, maka penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian deskriptif analitik. Penelitian deskriptif analitik merupakan penelitian yang dilakukan melalui upaya untuk menjelaskan data dan fakta di lapangan dengan kata-kata tertulis, kemudian menganalisisnya secara mendalam. Tujuan analisis penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam tentang komunitas-komunitas mahasiswa Papua yang tersebar di berbagai asrama, dari berbagai daerah asalnya dalam mengekspresikan identitas yang dimiliki.

D. Pergulatan Identitas Ke-Papua-an

Konsep identitas akan selalu melihat konstruksi tentang sebuah keakuan diri (*selfness*)

dengan yang lain (*the other*), dimana setiap individu akan selalu melakukan pengidentifikasian diri dan orang lain. Masing-masing pertautan tersebut, sarat dengan kepentingan memperkuat identitas. Upaya penguatan keakuan diri secara langsung membentuk konsep *self and the other*. Dimana semua yang tidak memiliki karakter seperti dirinya atau dalam komunitasnya akan dianggap *the other*. Dengan demikian penjabaran konsep *selfness and the other*, sangat dipengaruhi oleh cara pandang seseorang tentang dirinya dan lingkungannya baik secara internal (*in group*) maupun secara eksternal (*out group*).

Sikap stereotip menjadi persoalan mendasar pengklasifikasian orang Papua dan non-Papua. Pengelompokan diri sebagai orang Papua justru lebih menarik ketika dilihat dari berbagai kasus yang terjadi justru di reproduksi oleh orang Papua itu sendiri. Secara sadar melalui pergaulan sehari-hari mereka mencoba menyimpulkan tanggapan orang-orang di sekelilingnya, terkait bagaimana cara pandang orang non-Papua kepada orang Papua dalam kesehariannya. Penyimpulan jawaban penilaian atas mereka mempertegas konsep "*self and the other*".

Tidak bisa dipungkiri masih banyak orang yang beranggapan ketika ada orang Papua yang tinggal bertetangga dengan mereka, perasaan terancam dan ketidaknyamanan menyeruak muncul. Secara sederhana ketika ada Orang Papua di lingkungannya, mereka langsung menyimpulkan bahwa setiap orang Papua mewarisi watak keras kepala dan temperamental yang identik dengan kekacauan.

Disisi lain banyak orang Papua berusaha untuk menjadi orang yang lebih berperilaku sopan santun seperti orang Jawa pada umumnya. Untuk itulah mereka selalu beren-

11 Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal. 8.

cana menjadikan Yogyakarta sebagai rumah keduanya. Banyak dari mereka enggan pulang kedaerahnya dan ingin menjadi bagian dari masyarakat Jawa, yang notabene memiliki nilai-nilai kebudayaan sopan santun yang tinggi. Di Jawa mereka merasa lebih kalem dari pada ketika masih berada di tanah Papua.

Yogyakarta sebagai tujuan utama bagi mereka untuk ingin memiliki prestasi yang setara dengan kebanyakan mahasiswa-mahasiswa dari etnis yang lain. Curhatan itulah yang selama ini kebanyakan kita dengar tentang persepsi masyarakat umum kepada orang Papua. Sehingga terkadang diri kita diposisikan sebagai *"self"* yang cenderung menarik jarak kepada teman-teman Papua yang terlanjur dilabeli sebagai *"the other"*.

Identitas yang melekat pada masing-masing individu dalam sebuah komunitas, berfungsi sebagai penanda dalam interaksi sosial. Identitas pula diartikan sebagai karakteristik yang dimiliki oleh seseorang atau komunitas sebagai penanda dan perbedaan antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Identitas mampu memberikan kejelasan posisi individu dan kelompoknya dalam kehidupan sosialnya.

Posisi ini akan memberi ketenangan, dan pengakuan masyarakat terhadap eksistensi sebuah identitas. Upaya peletakan konsep identitas dalam tatanan konstruksi keakuan (*selfness*) akan membedakan seseorang dengan orang lain. Pengakuan eksistensi di level individu diawali dengan kepemilikan identitasnya. Dan keberagaman identitas di level komunitas memunculkan identitas yang diakui secara internal ataupun eksternal dengan etnis lain.

Secara sederhana sebuah komunitas dapat dipahami sebagai kelompok dengan

interaksi sosial yang dinamis, dan interaksi tersebut tergambar melalui budaya, dan cara hidup anggotanya. Anggota kelompok tersebut juga memiliki persamaan khusus yang bisa dijadikan penanda perbedaan dengan etnis lain. Dalam konteks komunitas Papua di Yogyakarta meskipun memiliki kesamaan dalam bentuk fisik, tetapi sesungguhnya identitas Papua tidaklah tunggal melainkan multi-identitas. Walaupun demikian diantara mereka sesama orang Papua yang ada di Yogyakarta berusaha untuk tetap menunjukan kepemilikan kolektivitas identitas Ke-Papua-an di Yogyakarta yang notabene adalah milik bersama.

Dengan identitas tersebut, diharapkan ada loyalitas dan solidaritas guna mempertahankan dan mengeksistensikan identitas yang dimiliki di ruang publik. Identitas kolektif tersebut terbentuk karena ada proses dialogis dan konflikual, pola relasi antar sesama komunitas Papua di Yogyakarta yang memungkinkan terjadinya pengintegrasian beberapa identitas setiap individu dalam sebuah komunitas.

Sejak lama orang Papua mengidentifikasi identitas diri mereka menjadi orang Papua gunung dan orang Papua pantai. Orang Papua pantai lebih mengklaim dirinya memiliki identitas diri yang modern dan terbuka bagi pihak luar dalam hal pergaulan ketimbang orang Papua yang berasal dari pegunungan. Mereka yang merasa orang pantai umumnya sudah banyak yang mengenyam pendidikan tinggi dan menduduki jabatan-jabatan strategis di daerahnya.

Berbeda dengan orang Papua pantai yang lebih terbuka dengan pihak luar, orang Papua gunung sendiri masih memertahankan cara-cara hidup tradisional, jauh dari pusat keramaian dan menganggap dirinya memiliki peradaban yang rendah. Ciri khas orang gunung umumnya, masih banyak menggunakan pakaian koteka sebagai

bentuk identitas diri yang terus dipertahankan. Pengkonstruksian identitas orang Papua gunung dan pantai masih mengandalkan penjabaran konsep etnis secara klasik, yaitu menjelaskan bahwa etnis adalah sesuatu yang bersifat natural dan memang sudah demikian adanya dan menitik beratkan pada aspek primordial dan karakteristik tubuh.

Ketika orang lain memandang diri orang Papua sangat berbeda dalam kehidupan sehari-hari, secara internal perbedaan itupun masih dirasakan antara orang pantai dan orang gunung. Di Yogyakarta. Perbedaan letak geografis dan kewilayahan diantara sesama mereka ikut memperkeruh proses pembedaan antara Papua pantai dan Papua gunung.

Salah satu karakter yang menonjol bagi komunitas Papua ketika berada di Yogyakarta adalah rasa persatuan yang kuat, apabila ada mahasiswa Papua yang disakiti pasti seluruh anak-anak Papua dari setiap paguyuban turut membelanya. Hal tersebut dapat terlihat di beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Yogyakarta pasti melibatkan banyak orang Papua.

Bagi sebagian komunitas mahasiswa Papua yang berada di Yogyakarta, dengan maraknya pemekaran daerah di Papua justru dapat memecah belah persatuan komunitas mahasiswa Papua. Oleh karena itu, sebagian mahasiswa Papua hal tersebut dipandang sebagai suatu yang sangat syarat dengan kepentingan politik atau strategi pemerintah Republik Indonesia untuk memecah rasa Ke-Papua-an bagi komunitas Papua di Yogyakarta. Namun kesadaran mahasiswa Papua di Yogyakarta untuk tidak ingin berlarut-larut dan telena dengan kondisi yang terjadi di daerahnya yang merasa terpecah belah oleh adanya pemekaran daerah.

E. Pemunculan Berbagai Ekspresi Identitas Ke-Papua-an

Ekspresi identitas Ke-Papua-an dimunculkan oleh komunitas Papua dalam berbagai bentuk, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa komunitas Papua sangat aktif dalam melakukan kegiatan kesenian dan olahraga. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh komunitas Papua sebagai wadah kebersamaannya. Sejalan dengan hal tersebut, komunitas Papua juga aktif mengekspresikan identitas Ke-Papua-annya dengan ikut serta pada berbagai kegiatan di Yogyakarta. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pentas seni, pertandingan-pertandingan olahraga, dan acara-acara lainnya.

Dalam pentas seni yang sering diadakan di Yogyakarta, komunitas Papua seringkali ikut serta dengan menampilkan kesenian dari daerahnya. Pegelaran seni dan budaya seperti tari-tarian dan lagu-lagu daerah banyak digunakan oleh masyarakat Papua sebagai ekspresi identitasnya. Dalam festival seni tersebut, masing-masing paguyuban berbagai daerah berusaha untuk memperlihatkan identitas Ke-Papua-annya.

Selain keterlibatan di bidang seni, komunitas Papua seringkali terlibat dalam pertandingan-pertandingan olah raga yang dilaksanakan di Yogyakarta. Sebagaimana diketahui bahwa komunitas Papua memiliki tim olah raga yang tangguh seperti tim voli, tim sepak bola, dan tim futsal. Tim olah raga ini sering ikut serta dalam pertandingan-pertandingan olah raga di Yogyakarta.

Komunitas mahasiswa Papua secara fisik memang memiliki perbedaan kulit yang begitu kontras dengan etnis lain di Indonesia yakni warna hitam, dan rambut yang keriting disertai dengan dialeg bahasa kedaerahan yang begitu kental dalam pergaulan sehari-hari. Fakta tersebut seakan memberi alasan bagi lingkungan sekitarnya den-

gan gampangnya memberi penanda sekaligus stereotip kepada mereka.

Dalam pergaulan di masyarakat, komunitas Papua juga masih merasakan diskriminasi. Hal ini dapat diketahui dari ungkapan teman-teman yang berasal dari komunitas Papua. Mayoritas masyarakat yang bukan berasal dari etnis Papua seringkali menunjukkan reaksi kurang menyenangkan apabila bertemu dengan masyarakat Papua. Hal tersebut diungkapkan melalui kutipan berikut:

*"Kami orang hitam dianggap sebagian masyarakat sebagai masyarakat yang jijik, bahwa orang hitam dianggap bodoh tidak perlu didekati, bau dan bila perlu ditutup hidungnya bila berdekatan dengan kami. Itulah sebagian kecil yang dialami oleh teman-teman Papua. Saya pun terkadang mengalami hal itu misalnya, ketika sama-sama satu bus kadang-kadang mereka menutup mulutnya dengan masker, lensa atau apa saja, mereka terkadang menutup hidung atau terkadang mereka lari sambil tertawa. Saya sering mengalami hal tersebut dan bagi saya itu adalah bentuk diskriminasi pergaulan...."*¹²

Seperti halnya setiap manusia, masyarakat Papua tentunya juga memiliki perasaan. Dalam pergaulan dalam masyarakat, komunitas Papua seringkali mendapatkan diskriminasi. Banyak perlakuan yang menyakitkan dari etnis luar Papua ketika bertemu dengan masyarakat Papua. Ekspresi wajah yang diterima masyarakat Papua

dari etnis lain menunjukkan rasa jijik atau menertawakan. Diskriminasi juga terjadi ketika masyarakat Papua hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari kutipan berikut:

*"Hampir 13 tahun ini saya berada di tanah Jawa, awalnya saya tinggal di Solo hampir 6 tahun saya di sana. Dan hampir sekian tahun saya tinggal di sana. Memang saya merasa cara pengamatan terhadap orang papua memang selalu dengan negatif. Itu yang selalu saya rasakan, misalnya saja. Mereka tidak mau menyapa memberi salam, tetapi sebaliknya kalau kita yang tidak memberi salam ke orang luar seperti saya memberi salam kepada mereka, mereka akan membicarakan yang lain-lain. Yaitu orang Papua itu begini-begini dan seterusnya. Kadang-kadang seperti itu jadi selalu ada penglihatan kepada orang-orang Papua itu dengan kesan negatif, saya saja seorang pendeta yang mencoba membaur dengan mereka itupun mereka masih melihat saya dengan kesan yang lain. Misalnya saya seolah-olah sedang membawa apakah! menyimpan sesuatu kah! Atau segala macam yaaa, terkadang begitu. Jadi memang kadang-kadang saya merasa tidak enak tidak nyaman dan sebagainya."*¹³

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa sebagian komunitas Papua juga mengalami diskriminasi di lingkungan tempat tinggalnya. Penduduk asli tidak mau memberi salam atau pun menjawab salam dari orang Papua, akan tetapi apabila orang Papua yang tidak memberi salam/

12 Data Hasil Wawancara Dengan Bapak Lenis Kogoya, Minggu, 14 April 2013, Pukul, 8:27:56 AM. Tidak jarang diskriminasi yang seringkali kami orang papua dapatkan dalam pergaulan adalah masih banyak orang yang beranggapan bahwa orang hitam dianggap sebagian masyarakat sebagai masyarakat yang jijik, bahwa orang hitam dianggap bodoh tidak perlu didekati, bau dan bila perlu ditutup hidungnya bila berdekatan dengan kami.

13 Data Hasil Wawancara Dengan Bapak Lenis Kogoya, Minggu, 14 April 2013, Pukul, 8:27:56 AM. Awalnya ketika saya datang ke Pulau seringkali masih ada keluhan dari teman-teman mahasiswa dalam hal pergaulan, tapi lambat laun semuanya itu hilang.

tidak menyapa maka akan menjadi bahan pembicaraan. Hal ini tentunya menempatkan orang Papua dalam posisi yang serba salah.

Diskriminasi yang di rasakan sangat individual sifatnya, khususnya yang dirasakan anak-anak Papua. Yaitu ada beberapa tempat misalnya yang tidak menerima orang Papua untuk tinggal di kos-kosan. Mereka dengan jelas menulis didindingnya. Tetapi kejadian itu hanya sebagian orang Papua saja yang mengalami. Ada beberapa tempat kos yang tidak menerima mahasiswa Papua untuk tinggal dan menetap di rumah kos tersebut. bentuk pendiskriminasian tersebut dilakukan dengan menuliskan pengumuman di dinding kos.

Melalui kejadian tersebut, mereka pun menyadari bahwa semua yang menimpa masyarakat Papua di Yogyakarta mungkin selama ini terlalu berperilaku yang kurang baik ke penduduk asli. Misalnya saja, terkadang mereka terlalu reaktif sehingga menimbulkan anggapan bahwa orang Papua tidak tau aturan pemberontak dan sebagainya.

F. Isu KTP Sebagai Arena Pertarungan Politik

Pelayanan untuk mendapatkan KTP pada dasarnya merupakan hak seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Papua. Meskipun memiliki perbedaan fisik yang cukup signifikan seperti warna kulit dan jenis rambut, masyarakat Papua tetaplah menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Namun demikian, pendiskriminasian terhadap masyarakat Papua di Indonesia masih berlaku seperti halnya pendiskriminasian warga kulit hitam di Amerika. Masyarakat Papua banyak yang sulit melakukan pengurusan dalam birokrasi seperti pembuatan KTP ataupun SIM.

Dapat dipahami bahwa masalah SIM yang dialami oleh mahasiswa Papua akan mampu mengganggu proses dalam tertib berlalu lintas,

mahasiswa Papua seringkali masih mengalami diskriminasi yang cukup pelik. Ketika terjadi masalah dengan pengguna jalan yang mengakibatkan tabrakan, maka mahasiswa Papua selalu menjadi orang yang dipersalahkan. Memang harus diakui mayoritas mahasiswa Papua yang mengendarai motor tidaklah memiliki SIM, dan masih banyak yang ugal-ugalan berlalu lintas. Bagi mereka, penyebab utamanya karena masih adanya kesulitan untuk mendapatkan KTP di Yogyakarta

Meski sudah lama menetap di Yogyakarta, masyarakat Papua tidak pernah bisa melakukan pengurusan KTP seperti halnya masyarakat dari daerah lain di Indonesia. Dengan adanya kebijakan mengenai KTP elektronik, perjuangan komunitas Papua untuk memperoleh KTP menjadi semakin sulit. Hal ini disebabkan salah satu ketentuan dari sistem e-KTP adalah setidaknya 1 atau 2 tahun masyarakat yang didata telah menjadi warga Yogyakarta secara birokrasi.

Nama-nama anak-anak Papua yang ada di Yogyakarta pada masa pemerintahan walikota sebelumnya sudah pernah didata namun belum ada realisasi. Oleh karena itu, tidak dapat disalahkan apabila mahasiswa Papua merasa dirinya diperlakukan tidak adil begitulah ucapan salah seorang sesepuh yang enggan disebut namanya. Tanpa adanya KTP, masyarakat Papua di Yogyakarta otomatis tidak memiliki SIM.

Hal inilah yang harus dicarikan solusinya. Namun demikian, komunitas Papua sepenuhnya menyadari walaupun persoalan KTP dan SIM masih menjadi barang mewah tetapi pada dasarnya Yogyakarta merupakan tempat yang paling dapat menerima masyarakat Papua. Sampai saat ini sesepuh Papua masih berjuang agar komunitas Papua yang berada di Yogyakarta untuk dapat memperoleh kemudahan dalam mengurus KTP dan SIM.

Kuatnya keinginan masyarakat Papua untuk dapat memperoleh KTP sebagai wujud kewarganegaraan dapat dilihat dari besarnya usaha dari masyarakat dan sesepuh Papua untuk memperjuangkannya. Perjuangan tersebut dimanifestasikan melalui dukungan terhadap salah satu kandidat calon walikota pada Pilkada Yogyakarta tahun 2011 yang lalu. Hal ini diungkapkan melalui wawancara penelitian sebagaimana kutipan berikut:

"Bahkan kami sangat perpartisipasi sampai pemilihan walikota kemarin dan menunjukan kepada warga jogja. Kalau kami orang Papua mendukung sultan sebagai Gubernur seumur hidup mengapa kalian tidak. Itu isu yang dibawa pada waktu penentuan Jogja sebagai kota istimewa. Pada saat itu, bertepatan pula dengan kampanye walikota, kami turun berpartisipasi dengan tarian-tarian Papua. sampai akhirnya pak walikota bisa menang dalam pilkada. Pada waktu itu kami mengarak-arak rombongan beliau dengan tarian-tarian masuk ke kampung-kampung dengan membawa isu yang sederhana kalau Papua dukung calon pak walikota kenapa kalian tidak mendukungnya. Dan hampir beberapa tempat yang menjadi lokasi arak-arakkan orang Papua dengan rombongan. Sekaligus pasangan walikota menang mutlak. Jadi isu peran Papua pun menjadi penting disini. Yaitu kami orang Papua mendukung pasangan walikota ini kenapa orang Jogja dukung yang lain?. Mengenai dukungan tersebut kami tidak pernah meminta uang, karena kami pikir suatu saat kami bisa meminta bantuan misalnya urusan KTP dan lain-lain lebih baik dari pada kami harus me-

*mintu uang dari beliau."*¹⁴

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa pada saat pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2011 lalu, masyarakat Papua mendukung salah satu kandidat. Hal ini merupakan janji politik antara kandidat tersebut dengan masyarakat Papua yang berada di Yogyakarta. Dukungan ini diberikan dengan harapan bahwa masyarakat Papua akan diberikan kemudahan dalam pengurusan KTP setelah kandidat tersebut menang. Namun demikian, ketika kandidat tersebut telah memenangkan pemilihan, janji politik yang pernah diberikan tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Papua. Kondisi tersebut juga diketahui dari kutipan wawancara berikut:

"Isu demo yang di suarakan di Jogja adalah merupakan representasi isu-isu yang ada di tanah Papua, pada waktu pemilihan Walikota Jogja yang kemarin pasangan pak Heri, walaupun kami anak-anak Papua di Jogja tidak memiliki hak pilih karena alasan KTP tapi kami mencoba berpartisipasi dalam salah satu kandidat yang saat ini menang menjadi Walikota. Bentuk dukungan kami kepada pasangan Walikota Pak Heri misalnya dalam bentuk mengikuti pasangan ini dalam Kampanye dan kami dari Asrama Biak mengiringi tim kampanye ini dengan tarian tarian-tarian khas Papua. dan sebenarnya telah ada kesepakatan pada waktu itu antara Pak Beny selaku sesepuh Papua dengan calon Walikota terutama masalah KTP tapi ketika pasangan yang kami arak-arak dengan tarian Papua menang, sampai hari ini belum ada realisasi janji politik kepada kami

14 Data Hasil Wawancara Dengan Bapak Benny Dimara, Rabu, 24 April 2013, Pukul , 8:13:18 PM.

orang Papua di Jogja."¹⁵

Kutipan di atas juga menceritakan bahwa Setelah pasangan Walikota tersebut memenangkan pemilihan, janji politik yang diberikan tidak kunjung terwujud. Masyarakat Papua masih tetap tidak memperoleh KTP dan mendapatkan diskriminasi dalam pelayanan publik. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipahami bahwa dukungan masyarakat Papua dalam pemilihan kepala daerah di Yogyakarta tidak berhasil membuat mereka memperoleh kewarganegaraan sebagaimana yang dijanjikan kepada mereka. Ekspresi identitas ke-Papua-an juga berlangsung pada perjuangan politik di tingkat lokal. Ekspresi tersebut berupa keinginan masyarakat Papua untuk mendapatkan kesempatan menjadi anggota DPRD di Yogyakarta. Hal ini dapat diketahui dari kutipan berikut:

*"Perjuangan kami pada PILEG 2009 yang lalu itu sangat menarik karena pada waktu itu anak-anak saya mendorong saya untuk menjadi anggota DPRD kota Yogya..... Dahulu saya mencalonkan diri dari partai PDP, sekarang di 2014 saya maju kembali melalui partai Gerindra dan strategi saya saat ini tidak lagi menggunakan orang Papua saya mau lihat kalau kita memang anak bangsa, mari berbicara dari hati-ke hati dan semua teman-teman saya sekarang ini sudah mulai berkerja."*¹⁶

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa seluruh komunitas Papua di Yogyakarta sangat mendukung Bapak Benny Dimara (Salah seorang Sesepuh) untuk menjadi anggota DPRD Yogyakarta. Pada tahun 2009, bapak Benny telah mencalonkan diri sebagai wakil dari partai PDP

(Partai Demokrasi Pembaruan), akan tetapi gagal terpilih menjadi anggota DPRD. Untuk masa yang akan datang, Bapak Benny Dimara tidak akan berhenti berjuang untuk mencoba peruntungannya sebagai anggota DPRD dengan kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2014 dari partai Gerindra. Hal ini tentunya juga mendapat dukungan dari seluruh komunitas Papua di Yogyakarta.

Papua adalah bagian dari NKRI. Papua pernah menjadi wilayah yang sangat diperjuangkan pengintegrasian oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun demikian, setelah Papua terintegrasi dengan Indonesia, komunitas Papua tidak memperoleh perhatian dan pembangunan sebagaimana perhatian pemerintah RI terhadap daerah-daerah lainnya. Hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan bagi komunitas Papua. Apabila pemerintah RI tidak bisa memberikan keadilan sebagaimana yang tertera dalam dasar negara, lantas untuk apa Papua diintegrasikan dan diperjuangkan mati-matian agar menjadi bagian dari NKRI ?. Ekspresi politik identitas diruang publik yang dimaksud penulis adalah adanya keinginan masyarakat Papua di Yogyakarta untuk merebut resources politik di tingkat lokal yakni berkesempatan menempatkan wakilnya untuk duduk di kursi DPRD DIY dimasa mendatang. Semoga.....

G. PENUTUP

Penelitian ini menguraikan sejumlah bentuk ekspresi identitas yang di munculkan sebagai upaya penyampaian berbagai perasaan diskriminasi yang masih terjadi di Yogyakarta. Ekspresi identitas yang coba dimunculkan di ruang publik adalah sebagai isarat bahwa identitas Ke-Papua-an di Yogyakarta adalah representasi perjuangan tanah Papua yang masih terus di reproduksi. Dan bagi penulis ekspresi identitas tersebut adalah bukti nyata adanya perjuangan politik komunitas

15 Data Hasil Wawancara Dengan Pace Opniel, Selasa, 28 Mei 2013, Pukul, 5:35:10 PM.

16 Data Hasil Wawancara Dengan Bapak Benny Dimara, Rabu, 24 April 2013, Pukul, 8:13:18 PM.

Papua di Yogyakarta, sebagai penanda ekstitensi mereka yang sampai saat ini masih merasa di diskriminasi. Mengenai ekspresi diskriminasi penulis berusaha tetap obyektif, dan salah satu modal yang dimiliki penulis bukan orang Papua asli. Sehingga dalam penyajian data hasil temuan di lapangan di harapkan tidak berpihak dan merugikan pihak-pihak tertentu, apalagi menjadi juru bicara orang Papua di Yogyakarta.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah menyajikan suatu kajian yang berupaya menerobos tentang apa yang selama ini sudah banyak dikaji oleh banyak peneliti terutama, studi-studi tentang kelompok etnis dan identitasnya. Tanpa disadari mungkin dari kita masih banyak yang mengira bahwa komunitas Papua merupakan etnis yang memiliki identitas tunggal, didasari pada karakteristik fisik yang cenderung sama yakni berkulit hitam dan berambut keriting. Tetapi dalam realitasnya, komunitas Papua di Yogyakarta masih mengalami polarisasi yang didasarkan pada fragmentasi kesukuan di daerah asal. Hal inilah yang menyebabkan pola fragmentasi kesukuan Papua Gunung-Pantai baik di level sesama komunitas mengalami dinamika pasang surut. Secara sederhana polemik dikotomi Papua Gunung dan Pantai secara eksplisit masih melanda para sesepuh Papua di Yogyakarta. Melalui hasil penelitian ini pula, ditemukan adanya masalah serius, yaitu terkait masih adanya sejumlah masalah. Diskriminatif yang dialami komunitas Papua Yogyakarta, yang paling rawan terjadinya gesekan kebudayaan adalah pergaulan dengan etnis lain. Dimana kondisi tersebut menunjukkan masih banyak perlakuan dari etnis-etnis lain yang selalu memandang orang Papua dengan konotasi negatif dan cenderung kearah belum sudinya mereka menerima kehadiran orang Papua sepenuhnya di Yogyakarta.

H. Sumber Acuan:

- Abdilah S., Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang: IndonesiaTera
- Barker, Chris. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: SAGE Publications Ltd, 2000.
- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies Teori & Praktik*. (Terjemahan Nurhadi).: Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Barth, Frederick (Ed.). 1988. *Kelompok Etnis dan Batasannya*. Terjemahan Nining L. Susilo. Jakarta: UI Press
- Calhoun, Craig, ed. *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge, MA: The MIT Press, 1992.
- Erik H. Erikson (1989), *Identitas dan siklus hidup manusia*, Terjemahan Agus Cremes, Jakarta: Gramedia
- Kim, Joohan & Eun Joo Kim, (2008), 'Theorizing dialogic deliberation: everyday political talk as communicative action and dialogue', *Communication Theory*
- King, Victor, and William D. Wilder. *The Modern Anthropology of South-East Asia: an Introduction by Victor King (2003-03-02)*. **publication place**: Routledge (2003-03-02), 1656.
- Meteray, Bernarda. *Nasionalisme ganda orang Papua*. Jakarta: Kompas, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Bandung: Alfabeta*, 2010
- Wallace, Alfred Russel. *The Malay Archipelago: the Land of the Orang-Utan, and the Bird of Paradise. a Narrative of Travel, with Studies of Man and Nature (Cambridge Library Collection - Zoology) (Volume 2)*. Reissue ed. **publication place**: Cambridge University Press, 2010.

OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN

(Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto)

Novendra Hidayat, S.IP., M.Si.

Abstract

This study aimed to describe and analyze the implementation of decentralization in educational management in Sawahlunto, specifically in School Based Management (SBM) at the level of secondary education. It uses the concept of decentralization, Educational Management, and School-Based Management (SBM). This study applies a qualitative approach design of descriptive analysis case study and collecting the data by interviewing and documentation. Informants were selected by purposive sampling. The study shows the implementation of decentralization in educational management particularly in the implementation at the level of secondary education must be completed so it can be more optimal. In its implementation efforts, carried out the stages to improve the performance of school management organizations, the management of human resources, teaching-learning process, administrative resources, Educational Services School-Based Management, and Quality Improvement of Education and Manpower Education. The local government is currently implementing the three pillars of educational development. In accordance with the Local Government Work Plan (RKPD), School-Based Management Improvement Program is one of the Educational Department programs. It is one form of decentralization in educational management, the implementation is expected to improve the quality of education in Sawahlunto at every level of education.

Keywords: Decentralization, Education Management, School-Based Management (SBM)

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar pembangunan bangsa disamping pembangunan sumber daya alam dan teknologi. Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, pendidikan merupakan salah satu sektor strategis yang perlu menjadi fokus perhatian. Hal ini mengingat pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia (Ahmad Ali Riyadi, 2006). Dengan demikian kualitas sumber daya manusia tergantung dari kualitas pendidikannya, oleh karena itu berbagai inovasi harus perlu terus

dilakukan pemerintah agar kualitas pendidikan semakin meningkat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bermakna pengakuan adanya daerah otonom dan sekaligus pengakuan/penyerahan wewenang, hak, dan kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang tertentu dari Pemerintah kepada Daerah. Termasuk pula di dalamnya berbagai kemungk-

inan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, dimana terdapat perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik.

Penyelenggaraan otonomi pendidikan ini dipertegas dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan tentang pergeseran paradigma pendidikan nasional, dari *education for all* (pendidikan untuk semua) menjadi *education from all, by all, and for all* (pendidikan dari semua, oleh semua dan untuk semua) (Sirozi, 2005). Dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas tertinggi di daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pengurusan, pembinaan, serta pengawasan. Karenanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Pemerintah daerah diharapkan menciptakan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan di daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah mengetahui dan mengerti apa yang seharusnya dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Kota Sawahlunto, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar yang dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sejak tahun 2001 telah melaksanakan desentralisasi pendidikan.

Sejauh ini, Kota Sawahlunto dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan. Hal ini terlihat dari Rencana Strategis Kota Sawahlunto di bidang pendidikan, yang meliputi tiga hal diantaranya: perluasan dan pemerataan akses pendidikan; peningkatan mutu,

relevansi, dan daya saing pendidikan; dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan (pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh rakyat banyak). Dukungan pemerintah kota juga terlihat dari alokasi anggaran pendidikan yang diberikan untuk pendidikan pada tahun 2008, yaitu 24% dari dana APBD Kota Sawahlunto yakni sebesar 76.411.046.867. Dana yang diberikan sebesar itu tentunya merupakan suatu bentuk motivasi yang tinggi agar penyelenggaraan pendidikan di kota ini bisa menjadi lebih baik lagi.

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan yang mempersiapkan tenaga-tenaga yang kompetitif, yang dipersiapkan untuk menghadapi persaingan global. Sekaitan dengan pendidikan menengah di Kota Sawahlunto saat ini Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto terus melakukan pembenahan agar meningkatnya kualitas pendidikan. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pada pendidikan menengah di Kota Sawahlunto. Diantara kegiatan itu diantaranya magang guru di sekolah favorit SMA 1 dan SMK 2 Yogyakarta, pembangunan Iptek *center*, dan orientasi kepala sekolah dan pengawas serta tenaga kependidikan ke sekolah menengah Kebangsaan Malaysia.

Meskipun di masing-masing daerah standar pendidikan berbeda-beda, untuk Kota Sawahlunto dari segi partisipasi pendidikan tergolong tinggi karena boleh dikatakan tidak ada penduduk Kota Sawahlunto yang tidak bersekolah. Angka partisipasi pendidikan Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1. 1
ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN DI
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

No	Kecamatan	APK		APM	
		Ter-masuk Paket C	Tdk. ter-masuk Paket C	Ter-masuk Paket C	Tdk. ter-masuk Paket C
1	Silungkang	35,65	29,03	26,66	23,43
2	Lembah Segar	85,79	85,79	80,13	80,13
3	Barangin	75,92	75,92	52,62	52,62
4	Talawi	97,50	93,96	81,79	80,44
	Rata-rata	77,39	75,02	63,57	62,52

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Tahun 2007

Pada Tabel 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMA/SMK/MA Kota Sawahlunto Tahun Pelajaran 2007/2008, dapat dilihat angka partisipasi pendidikan tingkat SMA/SMK/MA berada pada angka 77,39 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan partisipasi pendidikan pada pendidikan dasar (SD/MI), maupun pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) yang rata-rata berkisar antara 104,10 persen sampai 111,93 persen.

Dari output yang diperoleh, dalam hal peringkat kelulusan pada ujian nasional SMA/MA/SMK di tingkat Sumbar, Kota Sawahlunto pada tahun 2007 untuk SMK berada pada peringkat 6 di Sumatera Barat. Sedangkan SMA berada di peringkat 9 jurusan IPA, dan peringkat 6 jurusan IPS dari 19 daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Bahkan untuk SMK, pada hasil ujian nasional tahun 2007, dengan rata-rata nilai 8,12; Kota Sawahlunto pernah menempati urutan 1 secara nasional bersama Kabupaten Probolinggo.

Manajemen atau pengelolaan pendidikan

dalam hal ini adalah suatu proses kerjasama yang sistematis, sistemik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan diperlukan suatu manajemen pendidikan yang baik. Pelaksanaan manajemen pendidikan di Kota Sawahlunto saat ini terlihat masih jauh dari kata menggembirakan. Manajemen pendidikan yang dilaksanakan saat ini masih menunjukkan beberapa kelemahan yang signifikan dan perlu diperbaiki.

Dari pengamatan awal peneliti, konsep manajemen pendidikan masih belum dilaksanakan secara maksimal. Ini ditandai oleh masih ditemukannya di lapangan minimnya pelayanan yang diberikan pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan manajemen pendidikan. Hal ini dimungkinkan oleh masih adanya beberapa pendidik maupun tenaga kependidikan yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap konsep manajemen pendidikan tersebut.

Dalam hal pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan terlihat juga belum dilaksanakan dengan baik. Ini ditandai dengan masih belum optimalnya pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah. Minimnya pelayanan yang diberikan sekolah, salah satu contohnya: ketika berurusan dengan sekolah, adakalanya urusan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan segera, terkadang harus menunggu lama untuk proses penyelesaiannya.

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam hal desentralisasi pengelolaan pendidikan ini menghendaki pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik, dan pembangunan daerah juga dapat lebih terarah dengan semakin baiknya sumber daya daerah yang ada. Semua itu tentu saja tidak terlepas dari kontribusi sektor pendidikan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melihat Pelaksanaan Desentralisasi

dalam Pengelolaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah khususnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang Pendidikan Menengah di Kota Sawahlunto.

I.2. Rumusan Masalah

Diperlukan pengelolaan pendidikan yang baik dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Terdapat beberapa kelemahan yang signifikan dalam pengelolaan pendidikan di Kota Sawahlunto dan karena itu perlu terus disempurnakan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi pendidikan terlihat belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, ini ditandai dengan belum optimalnya pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah. Mengingat hal demikian peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kebutuhan yang mendesak dan perlu segera dilaksanakan. Dari permasalahan tersebut maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan di Kota Sawahlunto (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah)?*”

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan di Kota Sawahlunto khususnya pelaksanaan pengelolaan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Jenjang Pendidikan Menengah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk membantu peneliti dalam menganalisis temuan penelitian, ada beberapa konsep yang akan dipakai peneliti, yaitu :

II.1. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi dalam bahasa Inggris yaitu *outon-*

omy berasal dari bahasa Yunani *otonomia*, *outo* berarti sendiri, *nomos* berarti hukum atau peraturan. Dalam kamus bahasa Indonesia, otonomi diartikan “Pemerintahan Sendiri”. Sedangkan Desentralisasi secara etimologi istilah ini berasal dari bahasa latin, *de* berarti lepas dan *contium* berarti pusat. Oleh karena itu desentralisasi diartikan melepaskan diri dari pusat. Desentralisasi berangkat dari pengakuan atas otoritas pusat yang diserahkan ke daerah.

Oleh karena itu, Otonomi Daerah merupakan kewenangan dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi/keinginan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah tidak saja memaparkan mengenai hak-hak daerah, akan tetapi juga memunculkan berbagai kewajiban bagi pemerintah daerah. Pada UU No. 32 Tahun 2004 pasal 14 ditetapkan urusan pemerintahan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib mencakup urusan-urusan yang berskala kabupaten/kota, yaitu:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. ***Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi SDM potensial***
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Pasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan

12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

II.2.Desentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan

Menurut Hasbullah (2006), desentralisasi adalah pelimpahan wewenang yang disertai keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan sedemikian rupa sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, disamping pembangunan daerah dapat lebih terarah dan optimal. Desentralisasi pendidikan merupakan satu aktivitas politik, yakni proses transfer otoritas dalam bidang pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dari pemerintah ke masyarakat (Sirozi, 2005). Desentralisasi pendidikan disini berarti pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan.

Desentralisasi pendidikan tentu saja menjadi perhatian para pemimpin politik dan pembuat kebijakan (*policy makers*), karena desentralisasi pendidikan sangat politis (*intensely political*): yaitu merupakan satu isu yang mempengaruhi masa depan sebagian masyarakat. Dampak dari desentralisasi pendidikan ini yaitu pemerintah daerah harus lebih bersungguh-sungguh dalam memikirkan apa-apa yang dibutuhkan untuk

pengembangan pendidikan di daerahnya, serta sekolah juga harus lebih aktif dan kreatif sehingga tidak hanya menunggu petunjuk dari atas.

Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi pemerintahan daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pelayanan pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan.

Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dijelaskan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Bagi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, diantaranya memiliki kewenangan/urusan untuk:

- 1) Menetapkan kebijakan operasional, perencanaan operasional pendidikan,
- 2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah,
- 3) Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal,
- 4) Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kabupaten/Kota,

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dilimpahkan ke Dinas Pendidikan di mas-

ing-masing Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 PP No. 38 Tahun 2007, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian. Dengan adanya pembagian urusan yang jelas di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan bisa membuat program kerja sebagai acuan kerja instansinya sehingga bisa dilihat dengan program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan tersebut, desentralisasi pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik.

Desentralisasi pendidikan mencakup dua hal (Direktorat PLP Depdiknas, 2002) yaitu:

- a) Manajemen berbasis lokasi/ Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
- b) Inovasi kurikulum

Pada dasarnya manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengu-rangan administrasi pusat adalah konsekuensi dari yang pertama dengan diikuti pendelegasian wewenang dan urusan pada sekolah. Inovasi kurikulum menekankan pada pembaharuan kurikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan benar dengan kebutuhan peserta didik di daerah atau sekolah. Hal ini sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 38 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah". Keputusan Menteri Nomor 22/2006, dan 23/2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan menjadi dasar

pengembangan kurikulum sekolah yang disebut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).

Dalam pengembangan kurikulum, daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan silabus yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan daerah. Pada umumnya program pendidikan yang tercermin dalam silabus sangat erat kaitannya dengan program-program pembangunan daerah. Manajemen berbasis lokasi yang merujuk ke sekolah, akan meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan kepada tenaga sekolah, orangtua, siswa, dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan.

II.3. Manajemen Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen (Pengelolaan) Pendidikan adalah suatu proses kerjasama yang sistematis, sistemik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan (SIEN Consultant, 2009). Selain itu, manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Karena tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat terwujud secara optimal, efektif, dan efisien.

Dalam kerangka inilah akan tumbuh kesadaran akan arti pentingnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pihak sekolah untuk mengelola berbagai sumber daya pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai lingkungan pendukung. Melalui pelaksanaan MBS diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan ini sebagai solusi alternatif dari sistem manajemen terpusat yang dianggap

kurang kondusif dalam melibatkan peran serta masyarakat. Selain itu MBS merupakan upaya demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal.

Secara umum pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat dilihat pada 4 (Empat) tahap, yakni: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan). Pada penelitian ini, akan dilihat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada ke empat tahap tersebut. Berikut ini definisinya secara singkat :

1) *Planning* (perencanaan);

Planning (perencanaan) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, program, prosedur, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

2) *Organizing* (pengorganisasian);

Organizing (pengorganisasian) adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3) *Actuating* (pelaksanaan); dan

Actuating (pelaksanaan) adalah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4) *Controlling* (pengawasan);

Controlling (pengawasan) adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai den-

gan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.

Perkembangan manajemen pendidikan di Indonesia pada orde baru sangat diwarnai dengan manajemen yang sentralistik, kemudian pada era reformasi berkembang menjadi desentralisasi atau dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang intinya sekolah diberi wewenang untuk mengatur semua kegiatan sekolah. Ini seiring dengan pemberian wewenang pemerintah pusat pada pemerintah daerah (otonomi daerah).

Dasar pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah Pasal 51 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003. Dimana pada pasal tersebut menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan konsep pengelolaan sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi pendidikan. Direktorat PLP Departemen Pendidikan Nasional (2002) menyebutkan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yakni: (1) Aspek Manajemen Pelayanan Pendidikan yang Berbasis Sekolah, dan (2) Aspek Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

Secara konseptual ada beberapa istilah yang berkaitan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), di antaranya *School Based Management* atau *School Based Decision Making and Management*. Konsep dasar MBS adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat, kanwil, kande, dinas ke level sekolah (Samani, 1999: 6). Mulyasa (2004: 11) mengutip pendapat Bank Dunia (1999) memberi pengertian bahwa MBS merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan, yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah,

partisipasi masyarakat, dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.

Definisi yang lebih luas tentang MBS dikemukakan oleh Wohlstetter dan Mohrman (1996), yaitu sebuah pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan pada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Partisipan lokal tak lain adalah kepala sekolah, guru, konselor, pengembangan kurikulum, administrator, orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan siswa.

Secara umum MBS bertujuan untuk menjadikan agar sekolah lebih mandiri atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi); fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya; dan mendorong partisipasi warga sekolah dalam mengelola sumber daya; dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. (Hadiyanto, 2004: 70).

Selanjutnya, ciri-ciri MBS bisa dilihat dari sudut sejauh mana sekolah tersebut dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), proses belajar-mengajar dan sumber daya sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1
Indikator Sekolah Yang Melaksanakan MBS

Organisasi Sekolah	Proses Belajar mengajar	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya dan Administrasi
Menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya sendiri	Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat	Memiliki staf dengan w a w a s a n MBS	Mengelola dana sekolah secara efektif dan efisien
Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat	Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif	Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf	Menyediakan dukungan administratif
Menggerakkan partisipasi masyarakat	Menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa	Menjamin kesejahteraan staf dan siswa	Mengelola dan memelihara gedung dan sarana
Menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah	Berperanserta dalam motivasi siswa	Menyelenggarakan forum /diskusi untuk membahas kemajuan kinerja sekolah	

Sumber: Modul MBS yang dikutip dari Focus on School; The Future Organization of

Education Service for Student, Department of Education, Queensland, Australia.

MBS yang akan dikembangkan merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi namun masih dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. MBS harus mengakibatkan peningkatan proses belajar mengajar sehingga hasil belajarpun meningkat.

II.4. Relasi Desentralisasi Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah

Pada dasarnya MBS merupakan inti dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Rondinelli dan Chema (1983) mengemukakan bahwa konsep desentralisasi pendidikan adalah transfer atau pengalihan kewenangan kepada sekolah tentang planning, manajemen, pengelolaan potensi sumber daya, dan pengalokasian anggaran. Sedangkan, desentralisasi pendidikan adalah kewenangan dalam hal penanganan isu-isu manajemen pendidikan di daerah dan pengambilan keputusan dengan melibatkan *stakeholders* tanpa keluar atau menyimpang dari peraturan pemerintah pusat (Unesco, 1999).

Konsep MBS dikembangkan atas dasar hasil pengkajian dan penelitian yang didasarkan adanya kecenderungan desentralisasi pendidikan. Konsep MBS ternyata memberikan hasil pendidikan yang lebih baik daripada sistem sentralisasi atau terpusat (Caldwell dan Spinks, 1992). Terdapat hubungan yang signifikan antara kewenangan pengambilan keputusan dengan pengalokasian dan pengaturan sumber daya pendidikan di sekolah, seperti material, teknologi, waktu, keuangan, dan lain-lain.

Dalam hubungannya dengan desentralisasi pendidikan ini, MBS menurut Hallinger, Murphy, dan Hausman (1992) adalah pemberian kewenangan kepada sekolah untuk kebebasan mena- ta organisasi sekolah, manajemen persekolahan,

pengelolaan kelas, optimalisasi kerjasama (kepala sekolah, orang tua, dan guru), dan pemberian kesempatan yang kreatif dan inovatif kepada sekolah.

Sementara itu, Caldwell dan Spinks (1992) berpandangan bahwa desentralisasi dalam hal sekolah membuat kerangka kerja untuk tingkat lokal sekolah dan disesuaikan dengan peraturan yang ada di pusat, termasuk di dalamnya adalah tentang (1) pengetahuan (*knowledge*) yaitu desentralisasi yang berhubungan dengan kurikulum, dikaitkan dengan tujuan kurikuler dan sekolah; (2) teknologi, yaitu desentralisasi yang berhubungan dengan teknik belajar mengajar, (3) kekuatan (*power*), yakni desentralisasi tentang kewenangan membuat keputusan; (4) bahan (*materials*), desentralisasi yang terkait dengan penggunaan fasilitas, pengadaan, dan peralatan; (5) masyarakat (*people*), desentralisasi yang terkait dengan sumber daya manusia, pengembangan kemampuan proses pembelajaran (PBM) guru, dan dukungan dalam PBM; (6) waktu (*time*), yaitu desentralisasi yang berkaitan dengan pengalokasian waktu, dan (7) keuangan (*finance*), yakni desentralisasi yang berhubungan dengan pengalokasian anggaran.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Responden dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sawahlunto, Waka Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Sawahlunto. Pengumpulan data adalah merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Data atau bukti yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan multi sumber bukti (Robert K.

Yin, 2005). Adapun sumber-sumber data yang digunakan untuk memperoleh informasi dan bukti dalam penelitian terdiri atas 2 (dua) sumber data, yaitu : Wawancara dan Dokumentasi.

IV. PEMBAHASAN

Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah. Adapun dasar pelaksanaan desentralisasi pendidikan adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana pada Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan urusan pemerintahan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib mencakup urusan-urusan yang berskala kabupaten/kota yang diantaranya adalah penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) potensial. Dari situ jelas terdapat pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah dalam hal penyelenggaraan desentralisasi pendidikan.

Sasaran pelimpahan kewenangan tersebut tercakup dalam sebuah kesatuan hukum yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Oleh sebab itu komitmen Kepala Daerah dalam pelaksanaan pendidikan akan memberikan warna dan corak pendidikan tersendiri bagi peningkatan kualitas pendidikan. Demikian halnya di Kota Sawahlunto, otonomi daerah mengisyaratkan kemungkinan adanya pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang kondusif termasuk pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, dimana UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik.

Salah satu desentralisasi yang dilaksanakan di Kota Sawahlunto adalah desentralisasi dalam hal pengelolaan pendidikan. Pada pelaksanaannya,

desentralisasi sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 14 yang telah menetapkan urusan pemerintahan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib mencakup urusan-urusan berskala Kabupaten/Kota yang salah satunya adalah “Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi SDM potensial.”

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga telah dijelaskan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Sebagaimana PP tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto selaku Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten memiliki urusan dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan operasional, perencanaan operasional pendidikan,
- 2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah,
- 3) Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal,
- 4) Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kabupaten/Kota,

Urusan dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota tersebut dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 PP No. 38 Tahun 2007, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian. Setelah dilimpahkannya kewenangan dari Pe-

merintah Kota ke Dinas Pendidikan Kota, maka selanjutnya Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Sawahlunto dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto selanjutnya mempunyai tugas pokok mempersiapkan, menyusun, dan merumuskan kebijakan dan melaksanakan kewenangan dibidang pendidikan. Sedangkan fungsi Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto adalah:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga,
- b. Penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga,
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya pembagian urusan yang jelas di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan bisa membuat program kerja sebagai acuan kerja instansinya sehingga bisa dilihat dengan program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan tersebut, desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari sini selanjutnya diketahui mekanisme penyerahan urusan dan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan tersebut. Dimana adanya pembagian urusan pemerintahan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Dari urusan dan kewenangan ini selanjutnya Pemerintah Kota Sawahlunto melimpahkannya ke Dinas Pendidikan. Pada tahapan berikutnya Dinas Pendidikan dapat membuat program ker-

ja sebagai acuan kerja instansinya sehingga bisa dilihat dengan program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan tersebut, desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun Program kerja Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto adalah:

1. Peningkatan daya tampung peserta didik pada setiap tingkat pendidikan,
2. Pengurangan angka putus sekolah melalui pemberian beasiswa bagi anak yang berasal dari keluarga miskin, pelaksanaan program BOS, pemberian subsidi wajib belajar,
3. Pelaksanaan pendidikan luar sekolah,
4. Peningkatan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi guru,
5. Peningkatan kualitas Proses Belajar Mengajar (PBM),
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana sekolah,
7. Peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),
8. Peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya, adat dan agama,
9. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan,
10. Peningkatan peran serta kepemudaan,
11. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga,
12. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Dari program Dinas Pendidikan ini selanjutnya dilaksanakan berbagai kegiatan. Seperti halnya pelaksanaan ujian standar kota dilaksanakan pada program peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Sedangkan penetapan kebijakan operasional dan perencanaan operasional pendidikan melalui program dan inovasi pendidikan

yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto secara keseluruhan.

Di masa otonomi daerah dengan adanya desentralisasi dalam manajemen (pengelolaan) pendidikan, maka Pemerintah Kota Sawahlunto melaksanakan manajemen, pengarahan, dan monitoring terhadap seluruh aparatur pendidikan sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang optimal, dan meningkatkan efisiensi melalui penataan pelaksanaan pendidikan yang sehat dan akuntabel. Hal ini karena Pemerintah Kota Sawahlunto sangat mendorong tumbuh dan berkembangnya otonomi satuan pendidikan untuk dapat meningkatkan pembelajaran yang bermutu, dalam kapasitas ini melalui program peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Dalam penelitian ini, pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) akan dilihat pada jenjang pendidikan menengah, yakni pada SMA Negeri 1 Sawahlunto. Untuk melihat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tentu semua aspek pendidikan yang dianalisis dengan tahapan-tahapan atau proses manajemen atau juga dapat dikatakan fungsi manajemen. Sebagaimana konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), berikut ini dilihat pelaksanaan sesuai dengan tahapan-tahapan/proses manajemen:

Tahap pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, program, prosedur, dan anggaran untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini. Sebagai suatu organisasi, SMA Negeri 1 Sawahlunto telah menetapkan tujuan situasional sekolah, yaitu diantaranya: (1) Memperoleh rata-rata nilai pada Surat Tanda Kelulusan mencapai nilai 8.00; (2) Menjadi model inovasi dan perubahan proses pembelajaran dan manajemen peningkatan mutu sekolah, (3) Menjadi sekolah yang mengintegrasikan Pening-

katan Kualitas Pendidikan Bernuansa Surau (PK-PBS) dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL), (4) Menjadi sekolah yang seluruh komponen sekolah memahami dan terampil menggunakan program-program aplikasi komputer sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, (5) Memiliki sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Untuk mencapai semua tujuan tersebut dibutuhkan kebijaksanaan, program, prosedur, metode, dan anggaran agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun kesemua itu (kebijaksanaan, program, prosedur, metode, dan anggaran) telah dirumuskan melalui Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) SMA Negeri 1 Sawahlunto di setiap tahun anggaran. RAPBS selanjutnya merupakan kebijaksanaan yang diambil Kepala Sekolah beserta jajarannya untuk memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin.

Selanjutnya adalah tahap pengorganisasian (*organizing*). Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya. Di SMA Negeri 1 Sawahlunto, pengorganisasian juga dilakukan untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat seperti tertuang pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) hingga kemudian disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS). Setelah menjadi APBS kemudian menjadi suatu program kerja tahunan sekolah. Pada program kerja tahunan sekolah ini diketahui dengan jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya. Seperti pada program kerja tahunan SMA Negeri 1 Sawahlunto terdapat komponen, sub komponen, uraian ke-

giatan, tanggal dan waktu pelaksanaan, harga/anggaran, penanggung jawab, sumber pembiayaan, dan indikator keberhasilannya.

Dari seluruh rangkaian fungsi manajemen, pelaksanaan (*Actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. SMA Negeri 1 Sawahlunto melaksanakan fungsi pelaksanaan ini dengan melalui mekanisme dimana Kepala Sekolah memberikan pengarahan dan motivasi kepada seluruh jajarannya pada suatu rapat konsolidasi mingguan dan rapat konsolidasi bulanan hingga rapat evaluasi yang dilaksanakan satu kali satu tahun. Melalui mekanisme ini jajaran sekolah diharapkan dapat melaksanakan program kerja tahunan yang telah disusun dengan optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pengawasan dalam hal ini merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangannya itu, dan selanjutnya bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Rapat konsolidasi sekolah baik dalam rapat konsolidasi mingguan, rapat konsolidasi bulanan, maupun rapat evaluasi tahunan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan di SMA Negeri 1 Sawahlunto.” Dengan dilaksanakannya rapat konsolidasi sekolah ini dapat melihat sejauh mana suatu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Selain itu, dari rapat konsolidasi yang dilaksanakan secara kontinyu ini akan diketahui juga

pencapaian tujuan sekolah yang telah ditetapkan pada tataran perencanaan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Selanjutnya apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dapat diambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Fungsi-fungsi manajemen ini berjalan saling berinteraksi dan saling kait-mengkait antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan proses manajemen. Dengan demikian, proses manajemen sebenarnya merupakan proses interaksi antara berbagai fungsi manajemen tersebut. Dalam perspektif persekolahan, agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka proses manajemen pendidikan memiliki peranan yang amat vital. Karena bagaimanapun sekolah merupakan suatu sistem yang di dalamnya melibatkan berbagai komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara baik dan tertib. Sekolah tanpa didukung proses manajemen yang baik, boleh jadi hanya akan menghasilkan kesemrawutan laju organisasi, yang pada gilirannya tujuan pendidikan pun tidak akan pernah tercapai sebagaimana mestinya. Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realistis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengarahan dan pemotivasian seluruh personil sekolah untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, dan pengawasan yang berkelanjutan.

Sebagaimana konsep *Focus on School; The Future Organization of Education Service for Student*, Department of Education, Queensland, Australia, indikator terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bisa dilihat dari sudut sejauh mana sekolah tersebut dapat mengoptimalkan (1) kinerja organisasi sekolah, (2) pengelolaan sumber daya manusia (SDM), (3) proses belajar-mengajar, dan (4) sumber daya adminis-

trasi. Dalam hal ini SMA Negeri 1 Sawahlunto mengusahakan pelaksanaan keempat indikator ini dalam pelaksanaan MBS.

Dalam program peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), SMA Negeri 1 Sawahlunto sebagai salah satu jenjang pendidikan menengah di Kota Sawahlunto sendiri melaksanakan: (1) Manajemen Pelayanan Pendidikan yang Berbasis Sekolah, dan (2) Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Meskipun sudah ada upaya dalam pelaksanaan MBS di SMA Negeri 1 Sawahlunto masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

a. Tidak Berminat Untuk Terlibat.

Sebagian orang tidak menginginkan kerja tambahan selain pekerjaan yang sekarang mereka lakukan. Mereka tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang menurut mereka hanya menambah beban. Anggota Komite Sekolah harus lebih banyak menggunakan waktunya dalam hal-hal yang menyangkut perencanaan dan anggaran. Akibatnya kepala sekolah dan guru tidak memiliki banyak waktu lagi yang tersisa untuk memikirkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka.

b. Tidak Efisien

Pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif adakalanya menimbulkan frustrasi dan seringkali lebih lamban dibandingkan dengan cara-cara yang otokratis. Para anggota Komite Sekolah harus dapat bekerja sama dan memusatkan perhatian pada tugas, bukan pada hal-hal lain di luar itu.

c. Memerlukan Pelatihan

Pihak-pihak yang berkepentingan kemungkinan besar sama sekali tidak atau belum berpengalaman menerapkan model yang rumit dan partisipatif ini. Mereka kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan dan ket-

erampilan tentang hakikat MBS sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya, pengambilan keputusan, komunikasi, dan sebagainya.

d. Kebingungan Atas Peran dan Tanggung Jawab Baru

Pihak-pihak yang terlibat kemungkinan besar telah sangat terkonsumsi dengan iklim kerja yang selama ini mereka geluti. Penerapan MBS mengubah peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan yang mendadak kemungkinan besar akan menimbulkan kejutan dan kebingungan sehingga mereka ragu untuk memikul tanggung jawab pengambilan keputusan.

e. Kesulitan Koordinasi

Setiap penerapan model yang rumit dan mencakup kegiatan yang beragam mengharuskan adanya koordinasi yang efektif dan efisien. Tanpa itu, kegiatan yang beragam akan berjalan sendiri ke tujuannya masing-masing yang kemungkinan besar sama sekali menjauh dari tujuan sekolah.

Penerapan MBS yang efektif seyogyanya dapat mendorong kinerja kepala sekolah dan guru yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi siswa. Oleh sebab itu, harus ada keyakinan bahwa MBS memang benar-benar akan berkontribusi bagi peningkatan prestasi siswa. Ukuran prestasi harus ditetapkan multidimensional, jadi bukan hanya pada dimensi prestasi akademik. Dengan taruhan seperti itu, daerah-daerah yang hanya menerapkan MBS sebagai “mode” akan memiliki peluang yang kecil untuk berhasil. Dari pelaksanaan MBS di SMA Negeri 1 Sawahlunto diperoleh kekuatan dari pelaksanaan MBS:

a. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran.

b. Memberi peluang bagi seluruh anggota se-

kolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.

- c. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.
- d. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di sekolah.
- e. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistis ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah.
- f. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan.

Dengan diidentifikasinya kendala dan kekuatan dalam pelaksanaan MBS, selanjutnya dibutuhkan strategi pelaksanaan MBS agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Adapun strategi pelaksanaan MBS di SMA 1 Sawahlunto khususnya dan Kota Sawahlunto pada umumnya ke depan adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan MBS, yakni peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orangtua siswa. Upaya untuk memperkuat peran kepala sekolah harus menjadi kebijakan yang mengiringi penerapan kebijakan MBS. *"An essential point is that schools and teachers will need capacity building if school-based management is to work"*. Demikian De grouwe menegaskan.
2. Membangun budaya sekolah (*school culture*) yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Termasuk membiasakan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Model memajukan RAPBS di papan pengumuman sekolah yang dilakukan merupakan salah satu tahap

awal yang sangat positif. Juga membuat laporan secara insidental berupa booklet, leaflet, atau poster tentang rencana kegiatan sekolah. Alangkah serasinya jika kepala sekolah dan ketua Komite Sekolah dapat tampil bersama dalam media tersebut.

3. Pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBS di sekolah.
4. Mengembangkan model program pemberdayaan sekolah. Model pemberdayaan sekolah berupa pendampingan atau fasilitasi dinilai lebih memberikan hasil yang lebih nyata dibandingkan dengan pola-pola lama berupa penataran MBS.

V. KESIMPULAN

1. Pemerintah Kota Sawahlunto saat ini masih mengupayakan melaksanakan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan sendiri dalam hal ini merupakan prioritas utama dalam pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2008-2013. Pemerintah Kota Sawahlunto pada saat ini melaksanakan "tiga pilar pembangunan pendidikan."
2. Pelaksanaan desentralisasi dalam hal pengelolaan pendidikan khususnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang pendidikan menengah di Kota Sawahlunto saat ini masih memiliki kelemahan-kelemahan antara lain masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di sekolah.
3. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Program Peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu program Dinas Pendidikan

Kota Sawahlunto dalam rangka pelaksanaan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

4. Dalam upaya peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), SMA Negeri 1 Sawahlunto sebagai salah satu jenjang pendidikan menengah di Kota Sawahlunto melaksanakan: (1) Manajemen Pelayanan Pendidikan yang Berbasis Sekolah, dan (2) Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Ali Riyadi. *Politik Pendidikan, Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Ar-Ruzz. Yogyakarta, 2006.
- Afriani. *Kinerja Program Dinas Pendidikan Di Era Otonomi Daerah (Kasus Pada Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi)*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Unand. 2008.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.
- Chan, Sam M. dan Tuti T Sam. *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.
- Cresswell, John W. *Research Design, qualitative and Quantitative Approaches*, Jakarta, KIK Press.
- Fadila. *Identifikasi Pelaksanaan Program Kerja Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Desentralisasi Pendidikan (Studi Kasus Pada Jenjang Pendidikan Menengah Di Kota Sawahlunto Periode 2006)*. Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Unand Padang. 2007.
- Hasbullah. *Otonomi Pendidikan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kabullah, M. Ichsan. *Bias Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Provinsi Jambi*. Tesis pada Program Studi Magister Administrasi Publik UGM. 2009.
- Moleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grasindo, 2005.
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 01 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.
- PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Rencana Strategis 2005-2009. Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto. 2007.
- Sirozi, M. *Politik Pendidikan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syaukani. *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan*, Jakarta, Nuansa Madani, 2002.
- Triguno. 1999. *Budaya Kerja: Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Undang-Undang Otonomi Daerah 2004, Bandung, Citra Umbara, 2004.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

REPRESENTASI MASKULINITAS *BOYBAND* SHINEE DALAM VIDEO KLIP *RING DING DONG* MELALUI ANALISIS SEMIOTIKA

M. Adha Al Kodri, S.Sos., M.A

Abstrack

In the ranks of K-pop industry, boyband group Shinee certainly not unfamiliar anymore. Since it was formed in 2008, they have received many awards in music's field. One of their single is championed titled Ring Ding Dong was released digitally on October 14 th 2009.

In the video clip of Ring Ding Dong, described a collection of masculine men who dance vigorously. As well as body shape, accessories, and costume that they wear are very supports the actions of their masculine appearance. In other words, it can be said that the description of the man in the video clip leads to a masculine man with all the attributes of masculinity, but does not leave a gentle attitude, charisma and their prestige.

Therefore, if you see this, the important point in this research is to analyze the representations of masculinity in the video clip boyband Shinee Ring Ding Dong through analysis Semiotics. Semiotic models are models that researchers use semiotics of Roland Barthes. Barthes developed two levels of sign (staggered systems) which allows to generates also meanings stratified, namely the level of denotation and connotation.

Meanwhile, the results of this study indicate that masculinity is represented by the personnel of Shinee in the video clip Ring Ding Dong is manifold. Some of the scene showed a new concept of masculinity (the concept of "new man"), but some are still a traditional masculinity. When speaking of new concepts of masculinity, it can do a redefinition of the concept of masculinity, namely the concept of masculine brought by the image of the idol appeared in the mass media.

Keywords: Boyband Shinee, Masculinity, Semiotics.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tahun 2011 dapat dikatakan sebagai puncak dari trend dunia musik Korea di Indonesia, atau lebih dikenal dengan istilah K-Pop. K-pop merupakan singkatan dari Korean Pop yang secara spesifik berkaitan dengan "Musik Pop Korea" (Korea Selatan). Trend K-Pop atau dikenal pula dengan istilah Demam Korea (*Korean Wave*) telah melanda berbagai negara diseluruh dunia, terutama di benua Asia. Trend budaya pop Korea ini

menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menjadi salah satu penyebab orang-orang di berbagai negara mempelajari bahasa dan kebudayaan Korea. Banyak artis dan kelompok musik K-Pop yang tergabung dalam *boyband* dan *girlband* yang popularitasnya sudah populer di mancaneg-



ara, termasuk di Indonesia.

Kini musik K-Pop tentunya telah menjadi fenomena yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Bahkan virus K-pop inilah yang menjadi inspirasi menjamurnya pula grup *boyband* dan *girlband* di Indonesia. Seperti halnya Smash, Max5, Mr. Bee, NSG Star, S9B, XO-IX, 7 Icon, Cherry Belle, G-String, 5 Bidadari, dan masih banyak grup *boyband* dan *girlband* Indonesia lainnya.



Sementara itu, dalam jajaran industri K-Pop sendiri, semakin banyak penyanyi baru yang bermunculan



dan berhasil meraih ketenaran. Pembuktian dari kepopuleran mereka ialah banyaknya penghargaan di bidang musik yang telah diterima, salah satunya adalah *boyband* Shinee. *Boyband* Shinee dibentuk tahun 2008 dengan nama yang berasal dari kata *shine* dan *ee* yang mempunyai arti “menerima cahaya” atau menerima perhatian, siapa lagi jika bukan dari penikmat musik khususnya para penggemarnya.¹ *Boyband* Shinee memiliki jumlah anggota 5 orang. Mereka adalah Lee Jin-ki, Kim Jonghyun, Kim Kibum, Choi Minho, dan Lee Taemin.

Lagu “*Ring Ding Dong*” merupakan *track*

dan video klip dari mini album ke tiga mereka di tahun 2009 dengan nama album *2009 Year Of Us*. Shinee merilis album mini ketiga mereka, *2009 Year Of Us* pada 19 Oktober 2009, tepatnya 5 bulan setelah mereka merilis album mini terakhir mereka. Singel yang dijagokan dari album mini ini adalah “*Ring Ding Dong*” yang dirilis secara digital pada tanggal 14 Oktober 2009. *Comeback* pertama mereka dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2009 di acara *KBS Music Bank*.² Pada video klip ini digambarkan sekumpulan pria yang sedang melakukan tarian dengan penuh semangat yang menunjukkan sisi kemaskulinan mereka yang ditampilkan dalam bentuk ekspresi, bentuk tubuh maupun aksesoris dan kostum yang mereka kenakan untuk menunjang penampilan maskulin mereka.

Penampilan tubuh yang atletis, pakaian yang modis dan unik dan terkadang tidak simetris, namun tidak meninggalkan sisi cantik dan lembut pada mayoritas penyanyi-penyanyi pria Korea membuat gambaran idola pria saat ini mengarah pada pria yang maskulin dengan segala atribut kemaskulinannya, namun tidak meninggalkan sikap lembut, kharisma, dan wibawa mereka. Penampilan maskulin sekaligus lembut dan cantik memang terkesan kompleks pada awal kemunculannya karena representasi pria maskulin yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya adalah pria yang *macho*, pemberani, petualang, suka tantangan, dan tidak menunjukkan sisi lembut mereka. Seiring berjalannya waktu, hal yang dianggap tidak umum tersebut pada akhirnya menjadi hal yang biasa, sehingga pria yang maskulin sekaligus lembut dan cantik tidak menjadi sesuatu hal yang aneh lagi.

Sementara itu, representasi sendiri merupakan konsep yang digunakan dalam proses sosial

1 Biodata Shinee – Foto Profil Personil Shinee Boyband Korea. Melalui <http://www.erabaca.com/2012/04/biodata-shinee-foto-profil-personil.html>. Diakses Pada Tanggal 6 Juli 2014, Pukul 13: 35 Wib.

2 Shinee. Melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/Shinee>. Diakses Pada Tanggal 6 Juli 2014, Pukul 14:47 Wib.

pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia, seperti dialog, tulisan, video, film, fotografi. Representasi adalah proses sosial dari *'representing'*. Representasi menunjuk baik pada proses maupun produk dari pemaknaan suatu tanda. Representasi merujuk kepada konstruksi segala bentuk media (terutama media massa) terhadap segala aspek realitas atau kenyataan, seperti masyarakat, objek, peristiwa, hingga identitas budaya. Representasi ini bisa berbentuk kata-kata atau tulisan bahkan juga dapat dilihat dalam bentuk gambar bergerak. Stuart Hall kemudian menjelaskan bahwa :

*"Representation is an essential part of the process by which meaning is produced and exchanged between member of a culture. It does involved the use of the language, of signs, and images which stands for or represent things."*³

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa yang menjadi poin penting dalam tulisan ini adalah ingin melakukan analisis representasi maskulinitas *boyband* Shinee dalam video klip mereka yang berjudul *Ring Ding Dong* melalui analisis Semiotika.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka peneliti tertarik meneliti bagaimana maskulinitas *boyband* Shinee direpresentasikan dalam video klip *Ring Ding Dong* yang menampilkan sosok pria-pria tampan dan atletis sebagai penyanyi sekaligus model dalam video klip tersebut?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan teknik analisis isi melalui pendekatan kualitatif yang bersifat eksplorasi. Analisis isi ini memungkinkan kita bisa menemukan dan mendokumentasikan ciri-ciri khusus dalam isi materi dalam jumlah besar yang jika tidak dilakukan akan tidak diperhatikan.⁴

Artinya, dalam melakukan penelitian ini peneliti mengamati dan mengidentifikasi setiap adegan-adegan yang dilakukan oleh personel Shinee dalam video klip *Ring Ding Dong*. Pengamatan dan pengidentifikasian ini tentunya bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif mengenai representasi maskulinitas personel *boyband* Shinee dalam video klip *Ring Ding Dong* melalui analisis semiotika.

Sementara itu, analisis isi sendiri adalah teknik untuk menelaah isi atau informasi dan simbol yang terdapat dalam dokumen tertulis atau media komunikasi lain (misalnya, foto, film, lirik lagu, iklan).⁵

III. PEMBAHASAN

Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif. Semiotika sendiri berasal dari kata Yunani, yakni *semeion* yang berarti tanda. Menurut Scholes, semiotika didefinisikan sebagai pengkajian tanda-tanda (*the study of signs*), pada dasarnya merupakan sebuah studi atas kode-kode, yaitu sistem apapun yang memungkinkan kita memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang

3 Iriany Cherry, 2011. *Representasi Sensualitas Perempuan dalam Iklan Victoria Perfume Body Scent Versi "We Are The Star": Studi Semiotika Representasi Sensualitas dalam Iklan Victoria Perfume Body Scent Versi "We Are The Star"*. Hlm. 8.

4 Neuman, W. Lawrence, 2013. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Hlm. 57.

5 Neuman, W. Lawrence, 2013. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Hlm. 57.

bermakna.⁶ Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ada kecenderungan bahwa manusia selalu mencari arti atau berusaha memahami segala sesuatu yang ada di sekelilingnya dan dianggapnya sebagai tanda.

Dalam mengkaji representasi maskulinitas boyband Shinee dalam video klip mereka yang berjudul *Ring Ding Dong* ini, penulis akan menggunakan model semiotik dari Roland Barthes. Barthes mengembangkan dua tingkatan pertanyaan (*staggered systems*) yang memungkinkan untuk dihasilkannya makna yang juga bertingkat-tingkat, yaitu tingkat denotasi (*denotation*) dan konotasi (*connotation*).⁷ Selain itu, Barthes juga melihat makna lebih dalam tingkatnya, tetapi lebih bersifat konvensional yaitu makna-makna yang berkaitan dengan mitos. Mitos dalam pemahaman semiotika Barthes adalah pengkodean makna dan nilai-nilai sosial sebagai sesuatu yang dianggap alamiah atau cerita yang digunakan suatu kebudayaan untuk menjelaskan atau memahami beberapa aspek dari realitas atau alam.⁸

3.1. Konsep Maskulinitas

Berbicara maskulin sama halnya jika berbicara mengenai feminim. Maskulin merupakan sebuah bentuk konstruksi kekelakian terhadap laki-laki. Carlyle menjelaskan bahwa maskulinitas berkaitan dengan kemadirian, kekuatan serta orientasi tindakan.⁹ Dengan kata lain, laki-laki tidak dilahirkan begitu saja dengan sifat maskulinnya secara alami, melainkan maskulinitas dibentuk oleh kebudayaan. Penyebaran konsep maskulini-

tas inipun tidak dapat dipisahkan dari keberadaan media massa. Media, sebagai alat penyebar informasi, dapat menciptakan suatu imaji atau konsep dari sudut pandang tertentu tentang maskulinitas. Media massa turut berperan penting dalam membentuk konsep maskulinitas melalui pencitraan mengenai “kriteria ideal” untuk menjadi laki-laki yang maskulin atau *macho*.

Sementara itu, maskulinitas dalam masyarakat Korea saat ini terkonstruksi oleh elemen-elemen maskulinitas global, diantaranya maskulinitas *bishonen* Jepang, maskulinitas metroseksual *Hollywood*, serta maskulinitas tradisional Konfusius, *Soenbi*. *Bishonen* digambarkan sebagai lelaki yang tinggi, berwajah tirus dan feminim, berambut panjang atau bergelombang, serta memiliki senyum yang manis.¹⁰ Bishomen sendiri adalah karakter yang terdapat dalam komik untuk remaja putri (*shojo manga*) di Jepang. Di Korea, konsep inipun diaplikasikan dalam komik untuk remaja putri yang disebut dengan istilah *konminam*.

Istilah tersebut merupakan perpaduan dari dua karakter yang berarti bunga dan pria tampan.¹¹



Bishonen Jepang (Shojo Manga)

Sementara itu, maskulinitas metroseksual merupakan kebudayaan populer Amerika. Dari beberapa kebudayaan populer di *Hollywood*, salah satu yang banyak diikuti adalah musik popnya. Selain mempelajari dan meniru cara menguasai panggung dari musik pop *Hollywood*, ar-

6 Kris Budiman, 2011. *Semiotika Visual (Konsep, Isu, dan Problem Ikonisitas)*. Hlm. 3.

7 John Fiske, 2011. *Cultural and Communication Studies : Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Hlm. 118.

8 John Fiske, 2011. *Cultural and Communication Studies : Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Hlm.121.

9 Catherine Hall, 1992. *White, Male, and Middleclass*.

10 Sun Jung, 2011. *Korean Masculinities and Transcultural Consumption: Yonsama, Rain, Oldboy, K-pop Idols*. Hlm. 59.

11 Sun Jung, 2011. *Korean Masculinities and Transcultural Consumption: Yonsama, Rain, Oldboy, K-pop Idols*. Hlm. 58.

tis-artis Korea pun banyak meniru cara membentuk tubuh bintang idola *Hollywood*. Salah satunya adalah pembentukan badan yang dapat kita lihat dalam sosok Justin Timberlake.



Justin Timberlake

Justin memiliki tubuh yang berisi, berdada bidang, dan perut *six packs*. Penampilan fisik ini disebut dengan penampilan maskulinitas metroseksual. Metroseksual ini kemudian dapat kita artikan sebagai laki-laki yang berasal dari kalangan menengah atas, rajin berdandan, lebih mengagungkan fashion. Konsep maskulinitas baru ini menciptakan standar baru masyarakat bagi laki-laki. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa semuanya membahas penciptaan imej baru bagi laki-laki, dimana karakter maskulinnya tidak lagi “segarang” dulu. Namun mereka lebih lembut dan trendi.

Sedangkan *Seonbi* adalah sebutan bagi pelajar yang mengalami Konfusianisme. Kaum terpelajar ini adalah laki-laki, karena ketika



Seonbi

itu yang dapat menempuh pendidikan hanyalah kaum pria. Karakteristik maskulinitas ini terdapat pada masa dinasti Joseon, yang ketika itu lebih mengedepankan mental dibandingkan fisik. Oleh karenanya, terdapat beberapa karakteristik maskulinitas *seonbi* seperti sopan-santun dan lemah lembut yang masih dihargai oleh masyarakat Korea modern.¹²

Salah satu contoh maskulinitas Korea Selatan saat ini yang dapat dilihat jelas dari ketiga elemen diatas adalah bin-



Bae Yong-Joon

tang drama *Winter Sonata* yang direpresentasikan oleh Bae Yong-Joon. Maskulinitas Bae Yong-Joon merupakan perpaduan antara maskulinitas Konfusius yang lembut (*wen*), pria tampan Jepang (*pretty boy-bishonen*), dan metroseksual global.

3.2. Analisis Semiotik Video Klip Shinee *Ring Ding Dong*

- Pakaian

Gambar I

Pemakaian Busana Melewati Batasan Gender

Scene I



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

Tabel I. Penggambaran *Scene I*

Gambar	Visual
1	Personil Shinee mengenakan blazer kulit bermotif bulu-bulu, dipadu dengan celana panjang dan sayap dibelakang. Tampak Choi Minho memakai blazer hitam memanjang sampai lutut dengan ujung berumbai-rumbai. Blazer tersebut bermotif bulu-bulu berwarna putih. Gambar ini merupakan pose diakhir video klip.
2	Kim Jonghyun sedang bernyanyi dengan busana luaran blazer motif bulu-bulu berwarna hitam dan dalaman kaos bermotif yang bagian dadanya sedikit turun.
3	Lee Taemin (depan sebelah kanan) yang sedang bernyanyi dan menari di lantai yang tergenang air dan berlatar mobil menggunakan busana luaran blazer hitam dengan sedikit warna merah di bahu. Sementara dalaman memakai kaos bermotif dengan bawahan celana ketat panjang berwarna merah. Dibelakang celana tampak kain merah memanjang kebawah. Warna kainnya disamakan dengan warna celana..

Dengan mengenakan busana tersebut, kita dapat melihat bahwa mereka menunjukkan gaya berpakaian seorang bintang. Dalam teori Barthes, hal tersebut dapat dilihat seperti di bawah ini:

Tabel II. Representasi Maskulinitas

Androgini ¹³	
Bahasa	1. Penanda
Mitos	- Baju bermotif dengan bagian leher yang rendah
	- Celana Panjang.
	3. Tanda
	I. PENANDA
	G a y a berpakaian metroseksual.
	III. TANDA
	Gaya busana idola Korea Selatan melewati batas gender maskulinitas-feminitas
	2. Petanda
	- G a y a berpakaian feminim-maskulin.
	II. PETANDA
	G a y a berpakaian penyanyi/artis idola.

Dari *scene 1*, dapat dilihat bahwa penampilan yang ditunjukkan oleh beberapa personil Shinee termasuk dalam karakteristik yang banyak diaplikasikan oleh para *boyband* di Asia, khususnya Korea Selatan. Mereka sering mengenakan kostum yang melewati batasan gender. Tak jarang mereka memakai baju berwarna merah muda, dan bahkan memakai celana ketat (gambar 3), bermotif-motif, serta berwarna-warni. Selain itu, pada *scene 1* juga dapat dilihat dengan jelas bagaimana seluruh personil Shinee sangat menjaga penampilan tubuh dan gaya berbusana mereka. Mereka tanpa ragu mengenakan pakaian yang

13 Androgini adalah sebuah bentuk dimana batas-batas feminitas dan maskulinitas itu melebur atau tidak jelas. Berasal dari bahasa Yunani *andro* yang berarti pria dan *gyn* berarti wanita.

umumnya akan dikenakan oleh seorang perempuan. Hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam industri musik K-Pop saat ini. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena seorang artis baik itu individu ataupun sebuah grup, jenis pakaian yang akan digunakan baik dalam panggung ataupun keseharian, ditentukan oleh pihak perusahaan tempat mereka bernaung.¹⁴ Ini dilakukan untuk mengangkat popularitas ataupun menjaga citra mereka sebagai artis idola.

Sementara itu penggunaan celana panjang oleh seluruh personel Shinee dianggap mampu mewakili sisi maskulinitas mereka. Tickner menjelaskan bahwa mungkin celana panjang menyatakan maskulinitas yang begitu kuat sehingga “dapat digunakan untuk menunjukkan kelelakian sebab celana panjang sudah teridentifikasi secara eksklusif”.¹⁵

- *Make Up*

Gambar II

Penggunaan *Make Up* Oleh Personil Shinee *Scene II*



Gambar 1

Gambar 1

Gambar 1

Tabel III. Penggambaran *Scene II*

Gambar	Visual
I	Kim Kibum yang mengenakan bedak tipis, <i>lipbalm</i> , dan <i>eye liner</i> .

2	Nampak Kim Jonghyun sedang bernyanyi. Terlihat jelas bibir itu mengenakan <i>lipbalm</i> dan terdapat bedak tipis pada wajahnya.
3	Choi Minho yang sedang bernyanyi dengan mengangkat jari telunjuk kearah kepala. Terlihat Choi Minho menggunakan <i>eye liner</i> , <i>lipbalm</i> , dan bedak tipis.

Umumnya, citra yang dibangun oleh idola Korea Selatan tersebut merupakan strategi perusahaan dalam memasarkan bintangnya. Bagi pihak perusahaan, citra tentunya merupakan faktor utama, sedangkan talenta dalam bermusik bisa menjadi nomor dua. Melalui pendekatan Barthes, maka hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV. Representasi Maskulinitas Pembentuk Citra

Mitos	Bahasa	1. Penanda	2. Petanda
		- Pakaian rapi - Memakai <i>make up</i> wajah.	- Gaya berpakaian kelas menengah atas - Menjaga penampilan.
		3. Tanda	
		I. PENANDA Penyanyi/artis idola. III. TANDA Citra, faktor utama bagi artis Korea.	II. PETANDA Idola yang menjaga penampilannya.

Dari hal tersebut, dapat kita lihat bagaimana para artis idola sangat memperhatikan dan menjaga citranya. Mereka tidak ragu untuk mengenakan *make up*, meskipun hal itu umumnya dilakukan

14 Heather A. Willoughby, 2006. *Image is Everything: The Marketing of Femininity in South Korean Popular Music. Korean Pop Music: Riding the Wave*. Hlm.101.

15 Dalam Malcolm Barnard, 2011. *Fashion Sebagai Komunikasi*. Hlm.123.

oleh wanita. Willoughby menjelaskan bahwa citra dalam trend musik K-Pop saat ini adalah kualitas yang paling esensial dari seorang penghibur, sementara talenta, musik dan kreatifitas memiliki peran sekunder.¹⁶ Karena adanya pemujaan terhadap ketampanan oleh para penggemarnya, hal ini memunculkan standar ketampanan tersendiri dalam industri ini. Di sisi lain dapat dijelaskan pula bahwa metamorfosis pria Korea Selatan dari *macho* hingga *make up* selama dekade terakhir atau lebih, sebagian besar dapat dijelaskan oleh persaingan sengit untuk pekerjaan, kemajuan dan asmara dalam suatu masyarakat di mana slogan populer mengatakan ‘penampilan adalah kekuatan’.¹⁷ Hal ini dapat pula dilihat banyaknya iklan-iklan kosmetik di Korea Selatan yang menggunakan pria sebagai model iklan mereka.

- Ekspresi

Gambar III

Ekspresi Sedih dan Cemberut Personil

Shinee

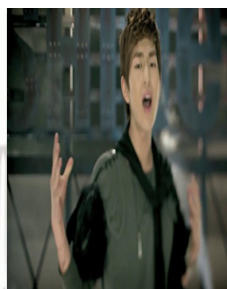
Scene III



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4

Tabel V. Penggambaran Scene III

Gambar	Visual
1	Choi Minho yang menatap kearah kamera melalui cermin. Nampak kesedihan yang terpancar dari tatapan matanya.
2	Kim Jonghyun yang sedang menunjukkan ekspresi sedih.
3	Lee Jinki sedang menyanyi, sambil menatap kearah kamera dengan ekspresi wajah sedih.
4	Kim Jonghyun yang sedang menyanyi dan memandang sedih kearah kamera dengan tangan di dadanya.

Dalam scene III tersebut, dapat kita lihat, bagaimana personil Shinee tanpa ragu dan malu-malu menunjukkan ekspresi sedih mereka. Melalui pendekatan Barthes, maka hal tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

16 Heather A. Willoughby, 2006. *Image is Everything: The Marketing of Feminity in South Korean Popular Music. Korean Pop Music: Riding the Wave*. Hlm. 102.

17 Adrian Marnoto, 2012. *Pria Korea Paling Suka Bersolek dari Pria Lain di Dunia*. Melalui <http://www.menjelma.com/2012/09/foto-pria-koreapaling-suka-bersolek.html>. Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2014, Pukul 22:30 Wib.

Tabel VI. Representasi Maskulinitas Sensitif

Mitos	Bahasa	1. Penanda	2. Petanda
		- Ekspresi muka sedih dan cemberut	- Pria yang sensitif
		3. Tanda I. PENANDA Beberapa personil Shinee bersedih dan cemberut III. TANDA Berekspresi sedih merupakan salah satu karakter pria yang cenderung lembut dan sensitif	II. PETANDA Beberapa personil Shinee menunjukkan kerapuhannya

Umumnya, karakteristik maskulin yang diketahui masyarakat adalah seorang pria yang “keras atau kasar”, berjiwa kompetitif, menahan perasaan dan bersikap dingin. Namun, karena budaya dan periode waktu, maka karakteristik itupun berubah. Saat ini, maskulinitas sangat terkonstruksi oleh media massa. Media sangat berperan penting dalam membentuk konsep maskulinitas melalui pencitraan mengenai “kriteria ideal” untuk menjadi laki-laki yang maskulin atau *macho*.

Seperti pada *scene* III, beberapa personil Shinee merepresentasikan maskulinitas “lemah lembut” dan “sensitif”. Jung (2011) menjelaskan bahwa maskulinitas ini merupakan salah satu karakter dalam ideologi Konfusius, yakni

seorang lelaki ideal adalah seorang lelaki yang lemah lembut tetapi berkeinginan kuat. Maskulinitas dalam *scene* III merupakan tipikal dalam maskulinitas *soenbi* yang terpengaruh oleh Konfusius yang masih dipegang hingga saat ini. Jika seorang pria dapat menunjukkan kelemahan lembut dan sensitifitas, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ia merupakan pria yang berbudaya.

IV. PENUTUP

Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari struktur, jenis, tipologi, serta relasi-relasi tanda dalam penggunaannya di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, semiotika mempelajari relasi diantara komponen-komponen tersebut dengan masyarakat penggunanya. Semiotika juga melihat suatu simbol sebagai sesuatu yang sangat terbuka sehingga sangat mungkin menghasilkan beragam interpretasi. Dengan demikian interpretasi peneliti mengenai maskulinitas para personil Shinee dalam video klip *Ring Ding Dong* ini dapat disimpulkan bahwa Shinee merepresentasikan citra pria yang sedemikian rupa sebagai artis idola. Gaya berbusana mereka dikontrol oleh manajemen. Hal ini merupakan bagian dari strategi pemasaran bagi artis-artisnya agar selalu diingat dan terus diidolakan para penggemarnya.

Para personil Shinee juga tidak hanya menjual suara ataupun talentanya dalam bermusik, tetapi juga memasarkan citranya. Kemudian, maskulinitas yang direpresentasikan oleh personil Shinee tersebut melalui video klip *Ring Ding Dong* ini juga bermacam-macam. Beberapa *scene* menunjukkan adanya konsep maskulinitas baru (konsep “pria baru”), namun sebagian juga masih merupakan maskulinitas tradisional. Ini membuktikan bahwa maskulinitas yang dihadirkan dalam video klip *Ring Ding Dong* ini merupakan komoditi dalam industri hiburan Korea Selatan. Dengan demikian, dapat dikatakan pula

bahwa telah terjadi pendefinisian ulang terhadap konsep maskulinitas. Kini, maskulinitas yang berusaha untuk diyakini adalah maskulin yang dibawa oleh citra dari para artis idola yang selalu tampil di media massa.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Barnard, Malcolm, 2011. *Fashion Sebagai Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Budiman, Kris, 2011. *Semiotika Visual (Konsep, Isu, dan Problem Ikonisitas)*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Cherry, Iriany, 2011. *Representasi Sensualitas Perempuan dalam Iklan Victoria Perfume Body Scent Versi "We Are The Star": Studi Semiotika Representasi Sensualitas dalam Iklan Victoria Perfume Body Scent Versi "We Are The Star"*. Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Fiske, John, 2011. *Cultural and Communication Studies : Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hall, Catherine, 1992. *White, Male, and Middle-class*. Cambridge: Polity Press.
- Jung, Sun, 2011. *Korean Masculinities and Transcultural Consumption: Yonsama, Rain, Oldboy, K-pop Idols*. Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Neuman, W. Lawrence, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Willoughby, Heather A., 2006. *Image is Everything: The Marketing of Femininity in South Korean Popular Music. Korean Pop Music: Riding the Wave*. Ed. Keith Howard. Kent, UK: Global Oriental.

Sumber Internet:

- Biodata Shinee – Foto Profil Personil Shinee Boyband Korea*. Melalui <http://www.erabaca.com/2012/04/biodata-shinee-foto-profil-personil.html>. Diakses Pada Tanggal 6 Juli 2014, Pukul 13: 35 Wib.
- Marnoto, Adrian. 2012. *Pria Korea Paling Suka Bersolek dari Pria Lain di Dunia*. Melalui <http://www.menjelma.com/2012/09/fo-to-pria-koreapaling-suka-bersolek.html>. Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2014, Pukul 22:30 Wib.
- Shinee. Melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/Shinee>. Diakses Pada Tanggal 6 Juli 2014, Pukul 14:47 Wib.
- Video Klip Shinee *Ring Ding Dong*, melalui <http://www.youtube.com/watch?v=rougtzsCDI>. Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2014, Pukul 14:19 Wib.

RESTORASI LAHAN PASCA TAMBANG TIMAH DI PULAU BANGKA

Oleh :

Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos., M.Si

Abstrak :

Kerusakan akibat penambangan timah di Pulau Bangka semakin meningkat terutama sejak berkembangnya penambangan inkonvensional. Dampak kegiatan penambangan timah, baik tambang konvensional maupun inkonvensional terhadap lingkungan fisik berupa bertambahnya lahan kritis akibat berkurangnya hutan, rusaknya lahan pertanian dan kebun. Upaya rehabilitasi lahan bekas tambang ditinjau dari aspek teknis adalah upaya untuk mengembalikan kondisi tanah agar stabil dan tidak rawan erosi. Dari aspek ekonomis dan estetika lahan, kondisi tanah diperbaiki agar nilai/potensi ekonomisnya dapat dikembalikan sekurang-kurangnya seperti keadaan semula. Dari aspek ekosistem, upaya pengembalian kondisi ekosistem ke ekosistem semula. Dalam hal ini revegetasi adalah upaya yang dapat dinilai mencakup kepada kepentingan aspek-aspek tersebut, dimana reklamasi hampir selalu identik dengan revegetasi.

Kata Kunci :

Restorasi, Pasca Tambang Timah, Pulau Bangka

I. PENDAHULUAN

1.1. Penambangan Timah di Kepulauan Bangka

Indonesia mempunyai cadangan timah yang cukup besar dan telah ditambang lebih dari 300 tahun. Cadangan timah ini tersebar dalam bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 kilometer, yang disebut *The Indonesian Tin Belt* (Sabuk Timah Indonesia). Bentangan ini merupakan bagian dari *The Southeast Asia Tin Belt* (Sabuk Timah Asia Tenggara) yang membujur sejauh kurang lebih 3.000 km dari daratan Asia ke arah Thailand, semenanjung Malaysia hingga Indonesia. Di Indonesia sendiri, wilayah cadangan timah mencakup Pulau Karimun, Kundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung, dan Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan. Penambangan di Bangka, telah dimulai pada tahun 1711, di Singkep pada tahun 1812, dan di Belitung sejak 1852. Namun, aktivi-

tas penambangan timah lebih banyak dilakukan di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. Kegiatan penambangan timah di pulau-pulau ini telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang (Batubara, 2010).

Dari sejumlah pulau penghasil timah tersebut, Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Dari luas Pulau Bangka 1.294.050 ha, sebesar 27,56 % daratan pulau ini merupakan areal Kuasa Penambangan (KP) timah. PT. Tambang Timah (anak perusahaan PT. Timah Tbk) menguasai lahan seluas 321.577 ha dan PT. Kobatin seluas 35.063 ha. Selain kedua perusahaan tersebut, izin kuasa penambangan (KP) timah juga diberikan kepada perusahaan swasta. Sampai dengan pertengahan tahun 2007, jumlah KP timah mencapai 101 izin dengan luas pencadangan 320.219 ha, dan yang telah ditambang 6.084 ha (Inonu, 2013).

Perubahan kontrol terhadap timah terjadi setelah era Reformasi. Menteri Perindustrian dan

Perdagangan mengeluarkan keputusan yang tidak lagi mencantumkan kata 'timah' dalam daftar barang-barang ekspor yang diawasi atau diatur pemerintah Keputusan Menperindag No. 146/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999. Keputusan ini berimplikasi bahwa siapapun berhak memasarkan timah. Hal ini kemudian diikuti dengan dikeluarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2001 yang pada dasarnya memberi akses kepada masyarakat Bangka untuk menambang (Eрман, 2008). Kabupaten Bangka Tengah kemudian mengikuti dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2007 tentang pokok-pokok pertambangan umum. Hal ini kemudian menjadikan pertambangan di Bangka Belitung tumbuh tanpa terkendali dan pengawasan terhadap lingkungan tidak terlihat sehingga dampak lingkungan dari penambangan ini terlihat jelas. Semua kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah terjadi perubahan penggunaan lahan karena aktivitas penambangan.

Di Kepulauan Bangka dijumpai 2 sistem penambangan biji timah yakni tambang semprot dan tambang kapal keruk. Pada tambang semprot, sistem penambangan biji timah dibagi dalam 3 tahapan (1). *Pengupasan*: pada tahap ini dilakukan pembongkaran lapisan tanah atau batuan yang tidak mengandung biji timah (*overburden*) yang dapat mencapai kedalaman tertentu. Lapisan tanah yang dikupas terdiri atas: a) *top soil* (tanah pucuk) yang telah mengalami pelapukan sehingga merupakan media tumbuh yang baik bagi tanaman, dan b) bahan induk tanah yang belum mengalami pelapukan. (2) *Penyemprotan*: kegiatan ini bertujuan untuk membongkar atau melarutkan tanah/batuan yang mengandung biji timah sehingga berubah menjadi lumpur. Lumpur yang mengandung biji timah ini kemudian dipompa/dialirkan ke instalasi pencucian (disebut *palong* atau *sakam*). Penyemprotan akan meninggalkan

lubang-lubang (kolong-kolong) dengan kedalaman bervariasi (6-10 m) dengan luas beberapa hektar dan di musim hujan, kolong pasca penambangan ini akan terisi air. (3) *Pencucian*: Kegiatan ini bertujuan untuk memisahkan biji timah dari bahan lainnya. Pemisahan menggunakan sistem gravitasi dimana biji timah dengan berat jenis 7,2 g/cm³ akan lebih dulu mengendap, disusul dengan pasir kasar (*tailing*) dan kerikil dengan berat jenis 2-4 g/cm³ dan yang lebih jauh dan terakhir mengendap adalah lumpur (*slime*). Dari proses pencucian ini akan menghasilkan *tailing* dengan kandungan bahan organik sangat rendah, miskin unsur hara, kapasitas menyimpan air sangat rendah), serta bagian lumpur yang jenuh air. Hamparan pasir *tailing* yang berbentuk bukit-bukit kecil mengandung pasir 90%; debu 8%; liat 0,5%; Corganik 0,10%; KTK 0,5 me/100 mg (P4LH-Puslittanak, 1996) dan temperatur permukaan tanah sangat tinggi (40-500C) sehingga evaporasi cukup tinggi. Selain lereng, faktor lain yang berpengaruh terhadap besarnya erosi dan degradasi lahan adalah tanah dan curah hujan. Bentuk wilayah berombak sampai bergelombang merupakan faktor yang mendorong terjadinya erosi dan degradasi lahan, dengan rata-rata curah hujan ±2.339 mm/tahun (Juarsah, 2011).

1.2. Dampak Praktek Penambangan Timah

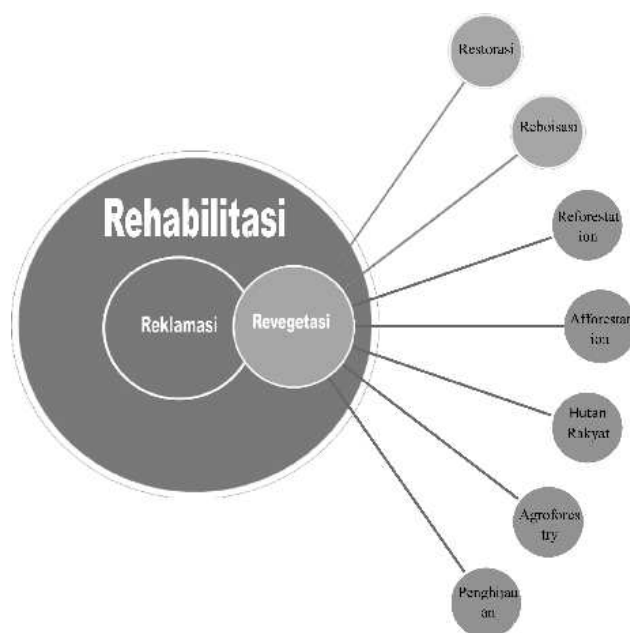
Kerusakan akibat penambangan timah di Pulau Bangka semakin meningkat terutama sejak berkembangnya penambangan inkonvensional. Sebelum tahun 1998, komoditi timah termasuk komoditi strategis yang perdagangannya terbatas, sehingga kegiatan penambangan dan perdagangan timah hanya boleh dilakukan oleh perusahaan PT. Timah dan PT, Koba Tin. Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Atas permintaan Bupati Bangka, PT Timah Tbk men-

gizinkan masyarakat menambang di sebagian wilayah kuasa penambangan (KP) yang sudah ditinggalkan. Sebagai timbal baliknya dan untuk memenuhi ketentuan mengenai barang tambang strategis, masyarakat harus menjual pasir timahnya hanya kepada PT Timah. Semenjak saat itu dikenal istilah *tambang inkonvensional* (TI). Disebut sebagai tambang inkonvensional karena metode penambangannya tidak seperti penambangan terbuka (*open mining*), tetapi hanya dengan mesin penyedot tanah dan air. Dampak kegiatan penambangan timah, baik tambang konvensional maupun inkonvensional terhadap lingkungan fisik berupa bertambahnya lahan kritis akibat berkurangnya hutan, rusaknya lahan pertanian dan kebun. Menurut hasil rekapitulasi Bapedalda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2005), luas hutan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ± 690.092 Ha, seluas ± 97.159 Ha (14%) telah mengalami kerusakan. Lahan kritis yang terbentuk juga semakin meningkat, sampai tahun 2005 di Pulau Bangka seluas 464.673 Ha. Selain itu, dilaporkan juga bahwa semua sungai besar yang ada, seperti Sungai Kepoh, Sungai Antan, Sungai Kampak, Sungai Mancung dan Sungai Kurau umumnya sudah tercemar terutama kekeruhan akibat partikel tanah dari pencucian pasir timah yang mengalir ke sungai-sungai (Inonu, 2013).

II. PEMBAHASAN

2.1. Prinsip-prinsip Restorasi

Restorasi biasanya terdiri dari kegiatan reklamasi (melibatkan kegiatan *civil engineering*, berhubungan dengan pemulihan kondisi tanah) dan revegetasi (mengembalikan pohon, shrub, dan lain-lain).



Dalam kaitannya dengan rehabilitasi, rehabilitasi merupakan suatu *general term* untuk suatu kegiatan revegetasi yang tidak mempunyai tujuan spesifik, atau lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di atas. Restorasi didefinisikan sebagai upaya memperbaiki atau memulihkan kondisi lahan yang rusak dengan membentuk struktur dan fungsinya sesuai (mendekati) dengan kondisi awal.

The Society for Ecological Restoration International menawarkan definisi sebagai berikut: "Restorasi ekologi adalah proses untuk membantu pemulihan suatu ekosistem yang telah menurun, rusak, atau hancur." Kutipan tersebut menegaskan bahwa intervensi restorasi diciptakan untuk membantu proses-proses pemulihan alami. Apabila proses pemulihan alami tersebut tidak berjalan, bentuk pengelolaan lain dibutuhkan sebelum intervensi restorasi berpeluang sukses. "Bantuan" kita dalam pemulihan alami dapat berupa bentuk pasif atau secara tidak langsung, atau dalam bentuk aktif atau intervensi langsung. Yang pertama umumnya melibatkan perbaikan pengelolaan aktivitas antropogenik yang menghalangi proses pemulihan alami; sementara yang terakhir biasanya melibatkan restorasi fisik

aktif dan/atau intervensi restorasi biologis, contohnya transplantasi karang dan biota lainnya ke daerah yang terdegradasi (Edwards, A.J. & Gomez, E.D, 2008).

Menurut Sutomo (2011) ekologi restorasi bertujuan untuk: (1). Merestorasi situs terlokalisasi yang terganggu atau rusak seperti bekas areal tambang. (2). Untuk meningkatkan kemampuan produktivitas di lahan produksi yang terdegradasi. (3). Memperkaya nilai-nilai konservasi alam di areal lanskap yang dilindungi. (4). Merestorasi proses-proses ekologis di dalam suatu lanskap yang luas. Restorasi ekologi menaungi berbagai dimensi dari upaya restorasi yang lebih luas tidak hanya mencakup ekologi restorasi, tetapi juga dari sisi kajian sosial, kebijakan dan ekonomi untuk mencapai tujuannya.

2.1.1. Reklamasi

Menurut Latifah (2003) dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tersebut perlu dikendalikan untuk mencegah kerusakan di luar batas kewajaran. Prinsip kegiatan Reklamasi adalah : (1). kegiatan Reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan (2). kegiatan Reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.

Kegiatan reklamasi terdiri dari dua kegiatan yaitu : (1). Pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologisnya, dan (2). Mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologisnya untuk pemanfaatannya selanjutnya. Untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang diperlukan perencanaan yang baik agar dalam pelaksanaannya dapat tercapai sasaran sesuai yang dikehendaki. Hal-hal yang harus diperhatikan didalam perencanaan reklamasi adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan rencana reklamasi sebelum pelaksanaan penambangan.
2. Luas areal yang direklamasikan sama dengan luas areal penambangan.
3. Memindahkan dan menempatkan tanah pucuk pada tempat tertentu dan mengatur sedemikian rupa untuk keperluan revegetasi.
4. Mengembalikan/memperbaiki pola drainase alam yang rusak
5. Menghilangkan/memperkecil kandungan (kadar) bahan beracun sampai tingkat yang aman sebelum dapat dibuang ke suatu tempat pembuangan.
6. Mengembalikan lahan seperti keadaan semula dan/atau sesuai dengan tujuan penggunaannya.
7. Memperkecil erosi selama dan setelah proses reklamasi.
8. Memindahkan semua peralatan yang tidak digunakan lagi dalam aktifitas penambangan.
9. Permukaan yang padat harus digemburkan namun bila tidak memungkinkan agar ditanami dengan tanaman pionir yang akarnya mampu menembus tanah yang keras.
10. Setelah penambangan maka pada lahan bekas tambang yang diperuntukkan bagi revegetasi, segera dilakukan penanaman kembali dengan jenis tanaman yang sesuai dengan rencana rehabilitasi dari Departemen Kehutanan dan RKL yang dibuat.
11. Mencegah masuknya hama dan gulma yang berbahaya.
12. Memantau dan mengelola areal reklamasi sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Setiap lokasi pertambangan mempunyai kondisi tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan reklamasi. Pelaksanaan reklamasi umumnya merupakan gabungan dari pekerjaan teknik

sipil dan teknik vegetasi. Pelaksanaan reklamasi meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Persiapan lahan yang berupa pengamanan lahan bekas tambang, pengaturan bentuk lahan (*landscaping*), pengaturan/penempatan bahan tambang kadar rendah (*lowgrade*) yang belum dimanfaatkan.
- Pengendalian erosi dan sidementasi.
- Pengelolaan tanah pucuk (*top soil*).
- Revegetasi (penanaman kembali) dan/atau pemanfaatan lahan bekas tambang untuk tujuan lainnya.

Arah dari upaya rehabilitasi lahan bekas tambang ditinjau dari aspek teknis adalah upaya untuk mengembalikan kondisi tanah agar stabil dan tidak rawan erosi (Sujitno, 2007). Dari aspek ekonomis dan estetika lahan, kondisi tanah diperbaiki agar nilai/potensi ekonomisnya dapat dikembalikan sekurang-kurangnya seperti keadaan semula. Dari aspek ekosistem, upaya pengembalian kondisi ekosistem ke ekosistem semula. Dalam hal ini revegetasi adalah upaya yang dapat dinilai mencakup kepada kepentingan aspek-aspek tersebut. Reklamasi hampir selalu identik dengan revegetasi.

2.1.2. Revegetasi

Revegetasi adalah usaha atau kegiatan penanaman kembali lahan bekas tambang. Tujuan dari revegetasi akan mencakup *re-establishment* komunitas tumbuhan secara berkelanjutan untuk menahan erosi dan aliran permukaan, perbaikan biodiversitas dan pemulihan estetika lanskap. Pemulihan lanskap secara langsung menguntungkan bagi lingkungan melalui perbaikan habitat hewan, biodiversitas, produktivitas tanah dan kualitas air (Tjabyana dan Yulius, 2011).

Menurut Latifah (2003) Keberhasilan revegetasi bergantung pada beberapa hal seperti

: Persiapan penanaman, pemeliharaan tanaman serta pemantauan tanaman. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan penanaman antara lain sebagai berikut :

- Kegiatan pemupukan
- Pemilihan jenis tumbuhan
- Pengumpulan dan ekstraksi biji
- Penyimpanan biji
- Persiapan pembenihan

Terdapat beberapa pilihan tentang metoda penanaman kembali dari tumbuhan asli apabila diperlukan. Metoda penanaman yang dipilih akan bergantung pada ukuran dan sifat dari lokasi dan tersedianya jenis tanaman. Beberapa menetapkan pilihan antara lain : Penyemaian langsung, penanaman semai dan pencangkoan. Tingkat keberhasilan dari semua metoda penanaman akan berkurang bila tidak dilakukan pemeliharaan yang baik. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal berikut :

- Pemagaran atau perlindungan tiap pohon diperlukan tetapi tidak pada penanaman skala besar. Pemagaran keliling akan memberikan perlindungan terhadap ternak pemakan tunas, lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. Pagar sementara kurang dapat memberikan perlindungan yang baik untuk jangka waktu yang lama. Pemagaran keliling dilengkapi dengan penahan angin akan meningkatkan keberhasilan program revegetasi.
- Hindarkan pengairan yang berlebihan pada daerah yang sudah ditabur dengan biji sampai tiba musim hujan.
- Penyiraman semai harus dikurangi sedikit demi sedikit untuk mencegah ketergantungan yang berlebihan atau terjadinya akar permukaan.
- Penggunaan pupuk, tambahan biji atau penyulaman penanaman.

- Kerusakan akibat serangga dan kutu adalah hal biasa, khususnya bila program revegetasi menghasilkan tanaman atau rumput-rumputan yang jarang didapati di daerah tersebut.

2.2. Restorasi sebagai Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Timah

Kontribusi sektor pertambangan terhadap kerusakan hutan di Indonesia mencapai 10% dan kini melaju mencapai 2 juta ha per tahun. Di Bangka-Belitung luas lahan bekas pertambangan timah sudah mencapai 400.000 ha yang terdiri dari 65% lahan tandus dan 35% berbentuk telaga-telaga. Reklamasi terhadap lahan bekas tambang timah tersebut telah dilakukan, pada tahun 1992-2008 perusahaan tambang timah telah mereklamasi sekitar 11.000 ha, pada tahun 2008 seluas 2.000 ha dan selanjutnya direncanakan reklamasi dilakukan seluas 1.600 ha per tahun.

Selama ini reklamasi lahan bekas tambang dilakukan dengan menanam tanaman akasia (*A. mangium* dan *A. auriculiformis*), gamal dan sengon, tanaman lainnya seperti kelapa, jambu monyet, pisang, pepaya, kacang tanah sayuran. Budidaya tanaman tersebut dikombinasikan dengan usaha perternakan ayam yang merupakan sumber bahan organik bagi lahan ini. Namun budidaya pertanian di tailing timah sangat intensif dan membutuhkan masukan modal yang besar dan tentu sulit untuk dilaksanakan oleh petani umumnya. Pada dasarnya kegiatan reklamasi harus seimbang dengan pembukaan tambang, tetapi sering reklamasi lahan yang sudah dilakukan, kembali rusak yang disebabkan oleh penambangan ilegal yang dilakukan masyarakat setempat. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal antara lain hasil penambangan dapat langsung dijual tidak memerlukan waktu yang panjang dan harga menguntungkan, sedangkan tanaman ha-

sil reklamasi belum memberikan nilai ekonomi yang berarti bagi masyarakat (Tjabyana dan Yulius, 2011).

Menurut Inonu (2003) pemilihan spesies tanaman untuk revegetasi merupakan tahap yang paling penting dalam upaya merestorasi lahan tambang. Untuk memastikan keberhasilan penanaman pohon pada lahan yang mengalami degradasi dan mengembalikan fungsi ekosistem memerlukan suatu strategi yang meliputi pemilihan jenis tumbuhan asli yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi iklim lokal dan kondisi lahan yang ada, serta melalui pendekatan aplikasi teknik revegetasi mencakup perlakuan silvikultur, perbaikan lahan, dan pengelolaan lahan. Untuk menghidupkan kembali lahan tailing timah, salah satu strategi yang perlu diperhatikan adalah seleksi spesies. Pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam didasarkan pada adaptabilitas, cepat tumbuh, teknik silvikultur diketahui, ketersediaan bahan tanaman, serta dapat bersimbiosis dengan mikroba. Tanaman yang dipilih berupa spesies yang cepat tumbuh, resisten terhadap kekeringan, dan mampu tumbuh pada tanah yang miskin unsur hara (ITTO 2002 dalam Nurtjahya 2003). Ditinjau dari aspek konservasi lahan, revegetasi dengan menggunakan jenis MPTS yang telah dilakukan berhasil menghidupkan kembali lahan-lahan bekas tambang serta mampu mencegah erosi. Secara ekologi, penghidupan kembali lahan bekas tambang dengan MPTS terutama tanaman akasia kurang menunjukkan keragaman spesies karena tanaman akasia menghasilkan eksudat akar yang bersifat alelopati bagi tanaman lain. Selain itu, perkembangbiakan akasia melalui biji dan vegetatif (tunas akar) cenderung ekstensif. Kedua hal tersebut menghambat pertumbuhan tanaman lain yang ada di sekitarnya, sehingga vegetasi cenderung homogen. Selain itu, apabila tanaman ini akan

dimanfaatkan untuk bahan baku pulp dan kertas harus melalui penebangan dan penanaman kembali. Metode revegetasi ke depan perlu mengembangkan spesies-spesies lain untuk revegetasi selain spesies yang sudah ada. Idealnya, spesies revegetasi yang digunakan adalah spesies yang memenuhi persyaratan sebagai tanaman reklamasi, secara teknis dapat dilaksanakan dengan mudah dan murah dan secara ekonomis, menghasilkan produk yang bermanfaat (kayu dan non kayu). Jenis-jenis tanaman perkebunan (misalnya karet dan kelapa sawit), tanaman buah (misalnya mangga, jeruk, jambu air), tanaman kehutanan spesifik Bangka perlu dikembangkan sebagai alternatif. Di lahan reklamasi PT. Koba Tin, beberapa tanaman tersebut berhasil tumbuh dan berproduksi.

Penanaman tanaman karet (*Hevea brasiliensis* Muell Arg) di lahan bekas tambang dinilai merupakan salah satu alternatif utama untuk mengatasi tidak produktifnya lahan tandus bekas tambang timah tersebut, masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh sisa penambangan dan sekaligus memecahkan masalah perekonomian masyarakat. Beberapa hal kenapa tanaman karet berpotensi dikembangkan di lahan bekas tambang. Pertama, tanaman karet termasuk tanaman multiguna (multipurpose tree species, MPTS), mempunyai adaptasi yang tinggi pada lahan-lahan marginal, seperti di lahan yang berbatu di Sulawesi Selatan. Tanaman karet mempunyai akar tunggang yang dalam secara teoritis lebih mampu mengatasi masalah kekeringan. Tanaman karet bahkan mampu memberikan produktivitas yang lebih tinggi pada lahan berpasir dengan bulan kering yang tegas dibandingkan dengan lahan yang tidak memiliki bulan kering. Kedua, tanaman karet mampu memperbaiki sifat tanah melalui pekayaan hara dengan karakter fisiologi pengguguran daunnya. Selain itu tanaman karet

dapat disadap dan menghasilkan getah hampir setiap hari sehingga menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa setiap tahun daun karet dapat mengembalikan 45-90 kg/ha N, 3-7 kg/ha P, 10-20 kg/ha K dan 9-18 kg/ha Mg. Melalui pengguguran daunnya, ini merupakan karakteristik tanaman karet. Dengan demikian diharapkan pemulihan lahan bekas tambang dapat lebih cepat terjadi. Untuk daerah Bangka Belitung tanaman karet bukan tanaman baru, petani sudah sangat mengenal budidaya tanaman ini walaupun belum menggunakan benih unggul, selain itu tanaman karet dapat dikatakan menghasilkan pendapatan hampir tiap hari sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga tani sehari-hari. Selain itu saat ini telah tersedia klon karet penghasil lateks-kayu, sehingga selain menghasilkan lateks juga menghasilkan kayu untuk memenuhi kebutuhan kayu pertukangan dan meubiler (Boerhendhy dalam Tjabyana dan Yulius, 2011).

Reklamasi lahan bekas penambangan timah ke depan bertumpu pada pemanfaatan berbagai sumber bahan organik dan pemilihan spesies revegetasi yang tepat guna. Bahan-bahan organik yang tersedia secara lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Pulau Bangka dapat dimanfaatkan untuk membenahi lahan bekas penambangan timah. Potensi bahan organik seperti tandan kosong kelapa sawit, limbah cair pabrik pengolahan kelapa sawit cukup tersedia di Pulau Bangka. Selama ini pemanfaatan limbah tersebut hanya terbatas untuk menambah unsur hara tanaman kelapa sawit milik perusahaan melalui aplikasi lahan (*land application*) dan belum pernah digunakan untuk memperbaiki karakteristik lahan bekas penambangan timah. Potensi bahan organik sampah kota Di Kota Pangkalpinang dan Sungailiat, tempat pem-

buangan akhir sampah (TPA) sudah dilengkapi dengan alat pencacah sampah organik. Setelah dicacah, sampah organik tersebut dapat didekomposisi lebih lanjut menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai bahan pembenah tanah pada reklamasi lahan bekas tambang timah. Demikian juga kotoran ternak seperti ayam potong dan sapi yang dihasilkan sejumlah peternakan di Pulau Bangka berpotensi untuk dimanfaatkan dalam program reklamasi. Meskipun potensinya cukup besar, penelitian mengenai efektivitas bahan-bahan tersebut bagi perbaikan lahan bekas tambang timah sejauh ini belum pernah dilakukan.

Permasalahan utama reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang timah di Provinsi Bangka Belitung adalah pembukaan lahan yang telah direklamasi oleh penambang ilegal. Lemahnya supremasi hukum dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang sangat tergantung dengan timah memicu penambangan kembali lahan-lahan bekas tambang timah PT Timah dan PT Koba Tin oleh masyarakat yang dikenal dengan *tambang inkonvensional*. Lahan bekas tambang, baik yang belum direklamasi maupun yang telah direklamasi akan ditambang kembali oleh masyarakat untuk mengambil deposit biji timah yang masih tersisa. Kegiatan ini menghambat pemulihan lahan pasca penambangan karena lahan tersebut harus direklamasi dan direvegetasi kembali yang membutuhkan tambahan biaya dan waktu. Bahkan sejak tahun 2001, PT. Timah untuk sementara menghentikan program reklamasinya dan baru dilanjutkan kembali pada tahun 2006 (Inonu, 2013).

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pelaksanaan reklamasi lahan umumnya merupakan gabungan dari pekerjaan teknik sipil dan teknik vegetasi. Perencanaan dan pelaksanaan

reklamasi lahan tambang yang dilakukan secara tepat diharapkan dapat memperoleh hasil yang optimal.

Masalah-masalah dalam reklamasi dan revegetasi lahan di Pulau Bangka antara lain pembongkaran kembali lahan yang telah direklamasi oleh masyarakat, manajemen pengelolaan tanah bekas galian yang tidak tepat dan pemilihan spesies revegetasi yang kurang bermanfaat secara ekonomis bagi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, Marwan., 2010, Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung (1), <http://www.eramuslim.com>, diakses pada tanggal 23 Januari 2010.
- Edwards, A.J. & Gomez, E.D. 2008. Konsep dan panduan restorasi terumbu: membuat pilihan bijak di antara ketidakpastian. Terj. dari Reef Restoration Concepts and Guidelines: making sensible management choices in the face of uncertainty. Oleh: Yusri, S., Estradivari, N. S. Wijoyo, & Idris. Yayasan TERANGI, Jakarta.
- Erman, Erwiza., 2008, Rethinking Legal and Illegal Economy: A Case Study of Tin Mining in Bangka Island, *Jurnal Southeast Asia: History and Culture*, Vol. 37, p. 91-111.
- Inonu, Ismed., 2013, Pengelolaan Lahan Tailing Timah di Pulau Bangka: Penelitian yang Telah Dilakukan dan Prospek ke Depan, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=273888&val=5433&title=Pengelolaan%20Lahan%20Tailing%20Timah%20di%20Pulau%20Bangka:%20Penelitian%20yang%20Telah%20Dilakukan%20dan%20Prospek%20ke%20Depan>, diakses pada tanggal 1 September 2015.
- Juarsah, Ishak., 2011, Kondisi Sifat Fisik Tanah Dan Lingkungan Pada Lahan Pasca Penambangan Timah Di Propinsi Bangka Belitung, <http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdf-prosiding2/fmipa201110.pdf>, diakses pada tanggal 1 September 2015.
- Latifah, Siti., 2003, Kegiatan Reklamasi Lahan Pada Bekas Tambang, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/920/1/hutan-siti1.pdf>, diakses pada tanggal 2 September 2015.
- Sujitno, Sutedjo., 2007, *Sejarah Penambangan Timah di Indonesia Abad 18 – Abad 20*, Ibat Communication, Jakarta.
- Sutomo, Restorasi Ekologi, <http://u.lipi.go.id/1321050669>, diakses pada tanggal 2 September 2015.
- Tjabyana, Bambang Eka., Yulius Ferry, 2011, Revegetasi Lahan Bekas Tambang Timah dengan Tanaman Karet (*Hevea Brasiliensis*), Prosiding Seminar Nasional Inovasi Perkebunan.

DINAMIKA POLITIK“KETERWAKILAN”DI BABEL:

Studi Awal Pemilukada Gubernur Bangka Belitung Tahun 2017

Oleh: Ranto, S.IP., M.A

A. Prolog: Apa yang dipersiapkan?

Menjelang Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur di Bangka Belitung (Babel) tahun 2017, kita menyaksikan bagaimana proses pencarian kandidat yang kemungkinan berkompetisi mulai ditampilkan di media-media lokal. Tiga hari yang lalu, Hidayat Arsani¹ dengan percaya diri mengusulkan sejumlah nama seperti Andrea Hirata² dan Darmansyah Husein³ untuk mendampingi sebagai calon wakil gubernur di tahun 2017

nanti (Bangkapos, 25/2/2016). Sebelumnya, Rustam Efendi⁴ juga mulai berani mengungkapkan keinginannya agar didampingi oleh Yusroni Yazid⁵ sebagai calon wakilnya di Pemilukada 2017 yang akan datang (Bangkapos, 2/2/2016).

Meskipun peristiwa ini masih terlalu dini untuk disimpulkan, keikutsertaan beberapa figur yang disebutkan tadi—tak menutup kemungkinan sejumlah nama lainnya juga akan muncul seiring perkembangan isu-isu politik kontemporer—semakin menarik untuk diikuti. Oleh karenanya, masih sangat memungkinkan peta politik yang muncul saat ini bergeser sesuai dengan kebutuhan dan konsumsi politik yang berkembang.

Meski demikian, paling tidak, ada kecenderungan utama yang akan mewarnai kontestasi politik di tahun 2017 ini, yakni: monopoli isu-isu kedaerahan yang dianggap sebuah kebutuhan riil karena paling mewakili kedaerahan antara Putra Daerah Pulau Bangka-Putra Daerah Pulau Belitung.

Sebagai sebuah provinsi yang memang secara spasial ditakdirkan untuk terpisah oleh daratan dua pulau yang besar, keterwakilan kekua-

1 Wakil Gubernur Babel Periode 2012-2017. Menurut rencana, Hidayat Arsani akan mencoba peruntungannya kembali dalam memperebutkan jabatan gubernur Babel di Pemilukada 2017. Saat ini, Hidayat Arsani merupakan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) di Babel.

2 Andrea Hirata merupakan seorang seniman sekaligus penulis novel dari kalangan terdidik yang berhasil menjadikan wisata di Pulau Belitung begitu populer jika dibandingkan dengan wisata di Pulau Bangka. Berkat karyanya melalui novel tetralogi Laskar Pelangi, publik nasional dan internasional lebih mengenal Belitung dibandingkan dengan Bangka untuk menikmati spot-spot wisata yang ditawarkan oleh kedua pulau ini. Terkait dengan munculnya nama ini—terlepas diterima atau tidak tawaran dari Hidayat Arsani—kita harus mengabaikan latarbelakang sosiologis dari aspek demografi seperti usia dan profesi. Hal yang tidak boleh kita abaikan terkait dengan latarbelakang kedaerahan yang melekat dari masing-masing calon kandidat. Seperti yang terlihat dibagian selanjutnya nanti, aspek kedaerahan ternyata tidak bisa diremehkan dalam hal proses kandidasi di Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Babel. Bahkan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan (catatan pribadi).

3 Darmansyah Husein merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Babel yang pernah menduduki jabatan bupati Belitung periode 2008-2013. Di tahun 2012 mencalonkan sebagai wakil gubernur Babel yang berpasangan dengan Zulkarnain Karim.

4 Gubernur Babel Periode 2012-2017 dipastikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Babel kembali bertarung di Pemilukada Babel 2017 setelah mendapat restu dari Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP. Selain memiliki status sebagai Ketua DPD PDIP Babel, Rustam Efendi juga berstatus gubernur incumbent. Berdasarkan dua status strategis tadi, tentu saja memberikan kemudahan bagi Rustam untuk mendapatkan tiket resmi pencalonan dari Megawati Soekarno Putri (catatan pribadi).

5 Bupati Kabupaten Bangka periode 2007-2012 yang sekaligus merupakan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Babel.

tan-kekuatan politik yang dimanifestasikan dengan kewajiban “Putra Daerah” harus ditampilkan merupakan kenyataan politik yang tidak bisa dihindarkan. Alasannya, agar aspirasi politik dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa dilaksanakan secara maksimal dan merata (tanpa ketimpangan) sehingga diperlukan adanya keterwakilan dari “Putra Daerah” di kedua pulau ini.

Benarkah demikian? Perlu ditekankan disini, sebagai sebuah provinsi yang diatur secara konstitusional, dugaan-dugaan yang dijadikan dalih pembenar pentingnya bermain di isu-isu kedaerahan ini merupakan jawaban yang menyesatkan seperti yang digelisahkan oleh Agus Badaw (Bangkapos, 27/2/2016). Boleh jadi, munculnya segmentasi kedaerahan merupakan cara paling jitu untuk menyembunyikan kelemahan dari masing-masing politisi terkait agenda menyelamatkan Babel dari ancaman kemiskinan, kerusakan lingkungan, minimnya akses lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, banjir dan lain-lain. Sehingga, kebutuhan bagi masyarakat Babel untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik secara sadar dikalahkan dengan isu kedaerahan—menurut dugaan saya—yang tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat luas. Oleh karenanya, tulisan singkat ini mencoba untuk mengugut pengarus utamaan isu kedaerahan di atas isu kemiskinan, banjir, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya.

B. Realitas Politik Berbasis Primordial di Babel: Sebuah Catatan Masa Lalu dan Kini

Untuk melihat kenyataan politik yang bekerja di garis-garis sentimen primordial (kedaerahan) di Babel, saya sengaja menggunakan data-data agregat berdasarkan pengalaman di beberapa Pemilihan Umum (Pemilu)—baik ketika Babel masih menjadi bagian dari Provinsi Suma-

tera Bagian Selatan (Sumbagsel), Sumatera Selatan (Sumsel), hingga menjadi sebuah Provinsi Baru di tahun 2000—untuk menjelaskan terbentuknya struktur politik yang berbasis primordial.

Mencermati hasil Pemilu di tahun 1955, perolehan suara Partai Baperki⁶ sejumlah 8% disumbang oleh masyarakat di Babel merupakan prestasi yang gilang gemilang dan perolehan suara tertinggi dari partai ini jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di seluruh Indonesia (Evans, 2003; Ranto, 2014).

Selanjutnya, di Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 1999, perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB)⁷ di Pulau Belitung sejumlah 11% (persen)—melampaui perolehan PDIP dan Golkar, dan Partai Pilar yang mendapatkan dukungan politik dengan angka 5% dari Pulau Belitung—padahal secara nasional Partai Pilar hanya berhasil mengumpulkan suara sejumlah 0,04% atau 40.000 suara secara nasional (Evans, 2003; Ranto, 2014).

Berdasarkan dua catatan politik yang telah disebutkan, paling tidak telah memberikan penjelasan awal—sekaligus menegaskan—bekerjanya politik primordial di Babel berdasarkan basis kedaerahan (Ranto, 2014). Dari dua pengalaman pemilu yang bersejarah ini kemudian dijadikan

6 Partai Baperki merupakan partai politik yang digawangi oleh politisi dari kalangan Tionghoa di Indonesia.

7 Seperti yang diketahui, di tahun 1998, Yusril Ihza Mahendra beserta rekannya mendirikan partai politik ini. PBB memang telah lama dipersiapkan untuk menjadi sebuah partai politik sebelum eforia reformasi bergulir. Untuk melihat perjalanan PBB menuju partai politik di era reformasi dapat dilihat dalam buku yang disusun oleh Hairus Salim HS dkk yang berjudul: “Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan, Prediksi, Harapan Pemilu 1999”, LKIS, Yogyakarta, 1999. Hadirnya sosok Yusril di PBB tentu menjadi magnet dukungan bagi pemilih di Babel, secara khusus di Pulau Belitung. Begitu juga dengan Partai Pilar. Partai Pilar secara struktur didominasi oleh putra-putra daerah dari Babel dikepengerusan partai. Tentu saja, banyaknya putra daerah asal Babel di Partai Pilar menjadikan partai ini lebih populer di Babel jika dibandingkan dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia (PLOD UGM, 2004; Ranto, 2014)

sebagai landasan awal untuk melihat peta kekuatan politik yang ada di Babel seperti yang terlihat dibagian selanjutnya.

Kalau di Pemilu 1955 dan Pemilu 1999—disebut sebagai rezim partai politik⁸—telah menunjukkan bekerjanya sentimen primordial di Babel tentu saja masih perlu diuji kembali kesahihannya. Boleh jadi, bekerjanya sentimen primordial di era ini karena disebabkan keterbatasan akses pilihan-pilihan politik yang ada. Atau, bisa juga karena masyarakat di Babel masih “miskin” informasi untuk menilai kinerja partai politik yang terpaksa harus mereka pilih.

Untuk menyempurnakan jawaban atas bekerjanya garis-garis politik berbasis primordial, mau tak mau, kita harus melihat peta-peta politik yang telah dihasilkan oleh model pemilihan untuk legislatif dan eksekutif dalam sistem terbuka (liberal) yang dimulai sejak Pileg 2004, Pemilukada Gubernur 2007, Pileg 2009 dan Pemilukada 2012. Sebagai permulaan, saya akan mengawalinya dari Pileg untuk DPR, DPD, dan Gubernur.

Tabel 1. Sebaran Perolehan Suara Partai Politik Pada Pileg 2004 untuk DPRRI

No	Nama Partai	Perolehan Suara Partai	Perolehan Suara Kandidat	Perolehan Kursi
1	PDI P	88.302	Rudianto Tjen (18.604)	1
2	GOLKAR	76.162	Azhar Romli (24.284)	1
3	PBB	64.631	Yusron Ihza (63.137)	1
4	PPP	29.314	-	-
5	PKS	23.495	-	-
6	PAN	19.835	-	-
7	PD	18.868	-	-
8	PKB	14.246	-	-
9	PBR	11.257	-	-
10	Partai Lainnya	48.550	-	-
Jumlah		Jumlah: 394.660		3

Sumber: Ranto, 2014

Hasil akhir perolehan suara di Pileg 2004 mengantarkan politisi dari kalangan Pulau Bangka untuk memperoleh dua kursi, yakni Azhar

Ramli (Azhar) dari Golkar, dan Rudianto Tjen dari PDIP. Sedangkan terpilihnya Yusron Ihza Mahendera (Yusron) dari PBB yang berasal dari Pulau Belitung seakan melengkapi keterwakilan proporsionalitas struktur sosial di Babel.

Jika dilihat komposisi perolehan suara masing-masing politisi, suara terbanyak pertama diperoleh oleh Yusron sejumlah 63.137 suara. Perolehan suara Yusron ini cukup didominasi dari wilayah Pulau Belitung. Kemudian disusul oleh Azhar sebanyak 24.284 suara yang sebaran suaranya mayoritas didapatkan dari Pulau Bangka. Dan, di urutan ke tiga, diperoleh Rudianto Tjen sebanyak 18.604 suara sudah mulai terlihat bagaimana domain partai politik dalam menentukan calon anggota legislatif terpilih sedikit melemah meskipun masih diikat dengan sistem nomer urut. Berbeda dengan pemilu-pemilu selanjutnya seperti Pileg 2009 dan Pileg 2014 untuk pemilihan anggota DPR/DPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan suara terbanyak yang didapatkan oleh kandidat yang dukungan politiknya didapatkan dari sumbangan pemilih di Pulau Bangka. Hasil Pileg 2004 menegaskan masih kuatnya pertarungan politisi antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung dalam percaturan politik di Babel (Ranto, 2014). Lalu bagaimana dengan Pileg 2009?

Tabel 2. Sebaran Perolehan Suara Politisi untuk DPR di Babel pada Pileg 2009

No	Nama Partai	Perolehan Suara Partai	Perolehan Suara Kandidat	Perolehan Kursi
1	PDI P	88.141	Rudianto Tjen (53.129)	1
2	GOLKAR	71.995	Basuki Tjahja Purnama (35.416)	1
3	PD	47.381	Paiman (12.731)	1
4	PKS	42.320	-	-
5	PPP	37.967	-	-
6	PBB	33.060	-	-
7	PAN	26.579	-	-
8	GFRINDERA	21.707	-	-
9	HANURA	21.661	-	-
10	Partai Lainnya	68.416	-	-
Jumlah		Jumlah: 459.227		3

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilu 2009 Dalam Angka yang dikutip Ranto, (2014).

⁸ Pemilihan kata “rezim partai politik” disini hanya untuk menjelaskan bagaimana proses keterwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih domain keputusan partai politik, sehingga perolehan suara kandidat sama sekali tidak ada dan tidak diperhitungkan. Di Pileg 2004

Tabel 2 memberikan informasi total jumlah perolehan suara sah sejumlah 459.227 suara. Ke tiga partai peserta Pileg 2009 yang berhasil meraih perolehan suara tertinggi diraih oleh PDIP, Golkar, dan Partai Demokrat (PD). Perolehan suara ketiga partai tadi jika digabungkan berjumlah 251.710 atau lebih dari 50 persen dari total jumlah suara sah. Artinya, sejumlah 50 persen pemilih di Dapil Babel mempercayakan aspirasi politiknya kepada ke tiga partai ini (Ranto, 2014).

Secara rinci, Ranto (2014) mencatat perolehan suara politisi yang terpilih berikut ini: Pertama, Rudianto Tjen mendapatkan suaranya berikut ini: Dapil 1 Babel (Pangkalpinang) 5.740 suara, Dapil 2 Babel (Bangka) 22.166, Dapil 3 Babel (Bangka Tengah) 8.246, Dapil 4 Babel (Bangka Barat) 7.562, Dapil 5 Babel (Bangka Selatan) 5.868, Dapil 6 Babel (Belitung—2.372—dan Belitung Timur—1.175); kedua, Ahok mendapatkan suaranya tersebar di beberapa daerah seperti: Dapil 1 Babel (Pangkalpinang) 3.327 suara, Dapil 2 Babel (Bangka) 2.149, Dapil 3 Babel (Bangka Tengah) 2.674, Dapil 4 Babel (Bangka Barat) 1.496, Dapil 5 Babel (Bangka Selatan) 2.128, Dapil 6 Babel (Belitung—6.714—dan Belitung Timur—16.928). ketiga, perolehan dukungan untuk Paiman tersebar berikut ini: Dapil 1 Babel (Pangkalpinang) 2.136 suara, Dapil 2 Babel (Bangka) 4.430, Dapil 3 Babel (Bangka Tengah) 984, Dapil 4 Babel (Bangka Barat) 1.728, Dapil 5 Babel (Bangka Selatan) 2.183, Dapil 6 Babel (Belitung—1.050—dan Belitung Timur—220).

Dari tiga kouta kursi yang diperebutkan di Dapil Babel untuk DPR misalnya, dua kursi diperoleh oleh politisi asal Pulau Bangka, yakni Rudianto Tjen (Tjen) politisi PDIP dan Paiman dari Partai Demokrat. Sedangkan dari Pulau Belitung diwakili oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang merupakan politisi Golkar ketika itu. Hasil Pileg 2009 juga mengulangi fenomena di

Pileg 2004 yang menunjukkan ketatnya pertarungan bagi politisi yang mewakili Pulau Bangka dan Pulau Belitung (Ranto, 2014).

Berikutnya, bagaimana dengan fenomena pemilihan senator (DPD RI) yang mewakili Babel di Senayan? Apakah pola-pola kekuatan politik yang dihasilkan dari Pileg 2004 dan Pileg 2009 telah mengikuti pembilahan struktur sosial yang diwakili oleh Pulau Bangka dan Pulau Belitung—seperti yang telah disebutkan tadi? Atau, arena politik untuk DPD RI ini memberikan warisan struktur politik yang berbeda?

Berdasarkan hasil Pileg 2004 untuk DPD RI di Babel, dari jatah 4 kursi yang tersedia telah mengantarkan sejumlah politisi seperti Rusli Rahman (Bangka), Rosman Djohan (Bangka), Djamila Somad (Bangka) dan Fajar Fairi (Belitung). Pengalaman di Pileg 2004 nampak bagaimana persaingan politik masih didominasi oleh kandidat yang berasal dari Pulau Bangka.

Selanjutnya, hasil Pileg 2009 untuk arena DPD RI juga memberikan potret politik yang tidak berubah diantara politisi dari gugusan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Seperti yang diketahui, Pileg 2009 telah mengantarkan Noorhari Asuti (Bangka), Rosman Djohan (Bangka), Bahar Buasan (Bangka) dan Tellie Gozalie (Belitung). Meski demikian, menyimak sebaran perolehan suara politisi yang terpilih ini cukup penting dalam menjelaskan bekerjanya politik primordial di Babel.

Untuk lebih jelasnya, catatan akhir perolehan suara masing-masing politisi dapat disimak berikut:⁹ Pertama, Tellie Gozalie mendapatkan total suaranya sebanyak 81.613 yang tersebar berikut ini: Dapil 1 Babel (Pangkalpinang) 7.494 suara, Dapil 2 Babel (Bangka) 10.686, Dapil 3 Babel (Bangka Tengah) 5.259, Dapil 4 Babel (Bangka Barat) 7.154, Dapil 5 Babel (Bangka Se-

9 Informasi ini dikutip dari Ranto (2014).

latan) 3.198, Dapil 6 Babel (Belitung—23.865—dan Belitung Timur—23.957); kedua, Noorhari Astuti mendapatkan total suaranya dengan angka 65.952 yang tersebar di beberapa daerah seperti: Dapil 1 Babel (Pangkalpinang) 5.732 suara, Dapil 2 Babel (Bangka) 21.496, Dapil 3 Babel (Bangka Tengah) 6.946, Dapil 4 Babel (Bangka Barat) 9.974, Dapil 5 Babel (Bangka Selatan) 16.689, Dapil 6 Babel (Belitung—1.727—dan Belitung Timur—3.388). ketiga, perolehan dukungan untuk Rosman Djohan sebanyak 23.175 suara yang mana sebarannya berikut ini: Dapil 1 Babel (Pangkalpinang) 6.033 suara, Dapil 2 Babel (Bangka) 3.283, Dapil 3 Babel (Bangka Tengah) 7.508, Dapil 4 Babel (Bangka Barat) 1.781, Dapil 5 Babel (Bangka Selatan) 3.552, Dapil 6 Babel (Belitung—305—dan Belitung Timur—713). Keempat, Bahar Buasan mendapatkan total suaranya sebanyak 21.700 yang tersebar berikut ini: Dapil 1 Babel (Pangkalpinang) 5.754 suara, Dapil 2 Babel (Bangka) 6.069, Dapil 3 Babel (Bangka Tengah) 4.113, Dapil 4 Babel (Bangka Barat) 2.251, Dapil 5 Babel (Bangka Selatan) 1.791, Dapil 6 Babel (Belitung—736—dan Belitung Timur—986). Berdasarkan catatan sebaran dukungan politik yang didapatkan oleh kandidat, maka dapat disimpulkan bahwa Pileg 2009 untuk DPD RI juga belum berhasil membawa pemilih di Babel keluar dari jeratan sentimen kedaerahan (Ranto, 2014).

Lalu, bagaimana dengan konstestasi politik di arena eksekutif daerah? Setelah pemberlakuan rekrutmen pemilihan kepala daerah semisal Gubernur/Walikota/Bupati dilakukan secara langsung sejak tahun 2005, maka analisis politik yang berkembang tidak lagi bergantung pada struktur kekuatan partai politik yang ada. Oleh karenanya, mencermati kehadiran kandidat yang berkompetisi menjadi faktor penting untuk menjelaskan dinamika kekuatan politik di level lokal

seperti Gubernur misalnya.

Berdasarkan dua pengalaman Pemilukada Gubernur secara langsung di tahun 2007 dan 2012 yang lalu memberikan beberapa catatan khusus terkait dengan keberadaan politik berbasis primordial di Babel: kewajiban untuk mengakomodasi putra-putra daerah terbaik dari kedua gugusan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Fenomena demikian secara elektoral memang penting untuk dipertimbangkan agar mendapatkan dukungan simpatik pemilih di Babel. Persoalannya tidak saja hanya berkutat disegmentasi keterwakilan. Menurut saya, publik di Babel juga harus diberikan pertimbangan-pertimbangan kapasitas calon pemimpin yang dimunculkan agar aspirasi politik yang berkembang dikelompok elit politik dan massa berjalan seirama.

Tabel 3. Informasi Pasangan Calon

Tahun Pemilukada Babel	Nama Pasangan	Status	Asal Daerah
2007	Hudarni Rani	Calon Gubernur	Pangkalpinang
	Ishak Zainudin	Calon Wakil Gubernur	Belitung
	Sofyan Rebuin	Calon Gubernur	Pangkalpinang
	Anton Gozalie	Calon Wakil Gubernur	Belitung
	Basuki Tjahja Purnama	Calon Gubernur	Belitung Timur
	Eko Cahyono	Calon Wakil Gubernur	Bangka Barat
	Eko Maulana Ali	Calon Gubernur	Bangka
	Syamsudin Basari	Calon Wakil Gubernur	Belitung
	Fajar Fairi	Calon Gubernur	Belitung
	Hamza Suhaimi	Calon Wakil Gubernur	Pangkal Pinang
2012	Eko Maulana Ali	Calon Gubernur	Bangka
	Rustam Efendi	Calon Wakil Gubernur	Belitung
	Yusron Ihza Mahendera	Calon Gubernur	Belitung
	Yusroni Yazid	Calon Wakil Gubernur	Bangka
	Zulkarnain Karim	Calon Gubernur	Pangkalpinang
	Darmansyah Husein	Calon Wakil Gubernur	Belitung
	Hudarni Rani	Calon Gubernur	Pangkalpinang
	Justiar Noer	Calon Wakil Gubernur	Bangka Selatan

Sumber: diolah dari berbagai sumber (catatan pribadi)

Bila dicermati dari informasi yang baru saja disajikan, paling tidak mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan: pentingnya mempertimbangkan keseimbangan keterwakilan dari daerah Pulau Bangka dan Pulau Belitung dalam kandidasi politik untuk level provinsi di Babel. Di Pemilukada 2007 misalnya, semua pasangan yang berkompetisi memutuskan untuk memilih tokoh-tokoh politik yang berlatarbelakang Pulau Bangka dan Pulau Belitung dalam menarik simpatik dukungan dari publik di Babel yang mengikuti pola berikut: jika calon gubernurnya berasal dari daerah Pulau Bangka (Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka misalnya) maka dipastikan calon wakil gubernurnya dari Pulau Belitung (Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur). Begitu juga sebaliknya. Jika calon gubernurnya berasal dari Pulau Belitung (Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur) maka wakil gubernurnya berasal dari daerah Pulau Bangka (Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat).

Fenomena yang sama juga berulang—meski tidak semuanya—di Pemilukada 2012. Terlihat bagaimana pola yang telah terbentuk di tahun 2007 juga diwariskan oleh aktor-aktor politik di Babel pada tahun 2012. Hanya pasangan Hudarni Rani-Justiar Noer yang tidak mengikuti pola tersebut (sama-sama dari Pulau Bangka).

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan, pertimbangan kedaerahan di Babel telah menjadi kesepakatan bersama yang tak tertulis terkait dengan politik berbasis primordial. Kenyataan ini telah terlihat sejak Pemilu 1955, 1999, yang kemudian diikuti oleh Pileg 2004, Pemilukada 2007, Pileg 2009 dan Pemilukada 2012. Begitu juga dengan Pileg 2014¹⁰ dan peristiwa yang

10 Sangat disesalkan sekali dalam diskusi kali ini saya tidak berhasil menampilkan data perolehan suara untuk DPR dan DPD Daerah Pemilihan (Dapil) Babel untuk Pileg 2014 karena keterbatasan data yang tersedia..

berulang juga akan terjadi di Pemilukada 2017.¹¹

C. Akar Menguatnya Politik Primordial di Babel

Kalau dibagian sebelumnya telah disebutkan bagaimana politik di Babel secara sederhana dapat dijelaskan melalui pendekatan primordial berbasis kedaerahan, selanjutnya, saya mencoba untuk menelusuri faktor yang melatarbelakangi menguatnya kecenderungan politik berbasis kedaerahan. Paling tidak, saya menawarkan beberapa kerangka pendekatan melalui perubahan institusional dan ketersumbatan keterwakilan politik untuk menjelaskan dinamika politik yang begitu dominan di Babel.

1. Perubahan Institusional

Reformasi politik yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1997 memberikan kabar baik bagi Babel dalam memperjuangkan sebuah provinsi baru agar terlepas dari Provinsi Sumatera Selatan (Palembang). Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000. Berdirinya Babel sebagai sebuah provinsi diharapkan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di dua gugus pulau besar yang terpisah (Pulau Bangka dan Pulau Belitung) dalam hal pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Ranto, dkk, 2007).

Banyak hal yang melatarbelakangi Babel harus bercerai dengan provinsi induknya Palembang. Yang paling sentral adalah: masalah keti-

11 Untuk Pemilukada 2017, informasi di bagian pendahuluan (Prolog) telah mengantarkan kita pada sebuah informasi bagaimana dinamika politik Putra Daerah mulai semarak seiring dengan kebutuhan-kebutuhan politik elektabilitas kekinian. Untuk menjawab dan memberikan kepastian ini kita harus sedikit bersabar dan menunggu di waktu-waktu yang akan datang menjelang menit terakhir penetapan pasangan kandidat yang akan berkompetisi.

dakmerataan akses pembangunan di Babel jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Palembang—padahal Babel memiliki Sumber Daya Alam (timah) yang menjadi salah satu penopang ekonomi nasional dan lokal (Palembang). Kenyataannya elit politik di Babel merasa diperlakukan kurang adil oleh Palembang (catatan pribadi).

Menjadi sebuah provinsi baru ternyata tidak berjalan dengan mulus seperti yang dibayangkan—bersamaan dengan ini beragam masalah mulai muncul. Menurut laporan penelitian integratif yang dilakukan oleh S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada (UGM) di tahun 2004 telah memperkirakan berbagai masalah yang muncul dan dihadapi oleh Babel berkisar dipersoalkan dimensi politik, identitas kultural, administrasi, ekonomi hingga ekologi yang kompleks dengan sebaran aktor yang lebih plural (PLOD UGM, 2004).

Dari berbagai persoalan yang disebutkan, saya sengaja hanya mendiskusikan dimensi politik dan identitas kultural yang secara nyata telah membentuk pembilahan struktur politik di Babel. **Persoalan dimensi politik dan identitas kultural berbasis spasial pada mulanya tidak begitu mengkhawatirkan—mengingat ada semacam konsensus dari elit-elit politik di Babel. Konsensus yang dimaksud adalah penjadwalan dalam menempatkan jabatan-jabatan politik di Babel seperti: jika gubernurnya (eksekutif) dari Pulau Bangka maka ketua DPRD Provinsi (legislatif) dari Pulau Belitung. Tak hanya itu. Jika gubernurnya dari Pulau Bangka maka jabatan wakil gubernur harus dari Pulau Belitung. Hal lainnya lagi, jika gubernurnya dari Pulau Bangka paling lama untuk dua periode kepemimpinan, dan kepemimpinan berikutnya diserahkan kepada Putra Daerah dari Belitung dengan skema 2:1.¹² Konsensus**

tertuliskan ini ternyata cukup efektif dalam menyatukan perbedaan kepentingan elit politik di Babel ketika itu (catatan pribadi).

Seiring perjalanan waktu, realitas politik yang bisa diselesaikan melalui konsensus seperti yang dibayangkan oleh elit-elit politik di Babel tadi ternyata menjadi buyar dengan sendirinya sejak Indonesia memperkenalkan mekanisme Pemilukada secara langsung di tahun 2005. Bagi mimpi buruk, pemberlakuan model pemilukada secara langsung dalam menentukan jabatan politik di daerah begitu menyakitkan bagi kalangan elit politik di Pulau Belitung. Betapa tidak. Jika dilihat dari perbandingan komposisi penduduk dan mata pilih yang akan menentukan siapa pemimpin terpilih, Pulau Bangka yang terdiri dari 5 Kabupaten/Kota (Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Tengah) merupakan sebaran penduduk yang paling dominan jika dibandingkan dengan Pulau Belitung yang hanya berjumlah 2 Kabupaten yakni Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Artinya, jika diserahkan pada publik maka bisa diperkirakan peluang-peluang bagi putra daerah dari Pulau Belitung dalam menduduki jabatan gubernur yang harus bersaing dengan putra daerah berlatarbelakang Pulau Bangka sudah sema-

jabatan gubernur (2002-2007) berasal dari Pulau Bangka sementara wakilnya dari Pulau Belitung, periode ke dua (2007-2012) masih mengikuti pola yang sama. Untuk periode ke tiga (2012-2017) baru dijabat oleh Putra Daerah dari Pulau Belitung. Periode selanjutnya mengulangi pola yang sama (catatan pribadi). Tentu saja skema ini akan berjalan efektif jika pemilihan jabatan gubernur dan wakil gubernur melalui anggota DPRD Provinsi bukan dalam proses Pemilukada secara langsung yang ditentukan oleh pemilih di Babel—perlu diperhatikan, Babel berdiri sebagai sebuah provinsi baru pada tahun 2000. Karena masih baru dibentuk, maka untuk persiapan dalam transisi peralihan kekuasaan dari Palembang maka ditunjuk Pejabat Sementara dari tahun 2000-2002 sampai Babel siap memulai suksesi politik yang pertama di tahun 2002 (catatan pribadi).

12 Skema 2:1 ini dijelaskan sebagai berikut: periode pertama

kin tertutup. Terbukti memang, di dua Pemilu-kada pada tahun 2007 dan 2012, semua kandidat gubernur dari Pulau Belitung harus kalah dengan kandidat dari Pulau Bangka.

Adanya perubahansecarainstitusional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur inilah menurut dugaan saya menjadi akar menguatnya politik primordial berbasis kedaerahan di Babel. Alasannya tentu saja sangat sederhana: ada kekhawatiran di kalangan masyarakat—utamanya di Pulau Belitung—bahwa masyarakat di pulau ini kurang terwakili dalam aspirasi politiknya. Kenyataan demikian barangkali dianggap oleh kalangan elit politik di Pulau Belitung sebagai pengulangan sejarah ketika masih menjadi bagian dari Palembang. Hanya saja dalam konteks ini yang menggantikan posisi Palembang adalah Pulau Bangka (catatan pribadi).

Oleh karenanya, tak terlalu mengejutkan jika publik di Pulau Belitungbegitu solid dalam mempertimbangkan pilihan politiknya seperti yang dialami oleh Yusron Ihza Mahendera di Pemilu-kada 2012.¹³ Terjadinya perbuahan institusional di era demokratisasi inilah yang menurut keyakinan Betrand (2004) berimplikasi bagi fenomena kebangkitan isu primordial yang dijadikan rasion de etre untuk merespon perkembangan politik yang ada baik dalam kapasitasnya sebagai pemicu kekhawatiran ataupun sebagai sebuah kesempatan.¹⁴

2. Ketersumbatan Keterwakilan Politik

Sebagai konsekuensi dari yang pertama tadi,

maka persoalan ketersumbatan dari keterwakilan politik bagi publik di Pulau Bangka dan Pulau Belitung menjadi cerita yang terus mewarnai dalam setiap momen politik di arena Pemilu-kada Gubernur. Anggapan-anggapan yang berkembang di masyarakat seperti: jika gubernurnya dari Pulau Bangka maka pembangunan struktur ekonomi, sosial dan budaya hanya difokuskan di Pulau Bangka saja sedangkan Pulau Belitung ditinggalkan. Begitu juga sebaliknya. Jika gubernurnya dari Pulau Belitung maka Pulau Bangka dijadikan “anak tiri” pada setiap proses pembangunan (catatan pribadi). Melalui dugaan yang tidak mendasar ini maka publik di kedua gugus pulau tadi sangat berkepentingan agar putra daerahnya tampil sebagai pemimpin di Babel untuk periode lima tahunan. Fenomena inilah yang disebut oleh Gurr (1993) mengisyaratkan bahwa persoalan ketimpangan keterwakilan politik memainkan peran yang penting dalam memicu kebangkitan sentimen primordial di era demokratisasi terutama yang berkaitan dengan disproporsionalitas keterwakilan kelompok-kelompok primordial.¹⁵

Berbagai kekhawatiran yang telah disebutkan selalu dimanfaatkan dengan cermat oleh para politisi agar mendapatkan dukungan politik di masing-masing basis primordialnya. Begitu asiknya bermain di sentimen emosional ini, politisi yang berkompetisi tidak terlalu mementingkan agenda visi-misinya untuk membangun Babel. Celaknya lagi, publik juga mengabaikan dan kurang memperhatikan agenda kerja yang ditawarkan kepada masyarakat apa yang akan dilakukannya nanti setelah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Padahal, di era kekinian, persoalan ketersumbatan keterwakilan politik sudah tidak menemukan relevansinya lagi. Alasannya, masyarakat di level Kabupaten/Kota sudah memiliki peluang

13 Di Pemilu-kada 2012 Yusron Ihza Mahendera merupakan politisi yang paling diandalkan sebagai wujud perwakilan politik dari Pulau Belitung. Sebaran suara Yusron Ihza Mahendera di Pulau Belitung ketika itu mencapai angka 78% dukungan dari masyarakat (catatan pribadi).

14 Seperti yang dikutip oleh Firman Noor dalam makalahnya yang bertema “Demokratisasi dan Kebangkitan Politik Identitas Primordialisme di Indonesia: Akar Penyebab, Kecenderungan, dan Alternatif Solusi”.

15 Seperti yang dikutip oleh Noor, op.,cit

yang besar untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan kepentingan basis-basis sosial. Kenyataan ini bisa dilihat dari proses pemilihan bupati/walikota, anggota DPRD Kabupaten/Kota hingga pemilihan kepala desa. Kondisi ini akan berbeda jika pemilihan pejabat politik di level lokal ditentukan oleh Pemerintah Pusat seperti era Orde Baru. Belum lagi dengan skema pemberlakuan model pemerintahan yang menganut sistem otonomi daerah seperti saat ini. Secara otonomatis menganulir berbagai kekhawatiran terhadap peluang-peluang kebuntuan aspirasi politik di Babel.

D. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Status yang Terlembaga

Kecenderungan pembahasan tentang konsolidasi politik berbasis primordial selama ini didominasi oleh pemanfaatan identitas asal daerah telah menggeser isu lainnya seperti kesejahteraan, kerusakan lingkungan, banjir, kemiskinan dan lain sebagainya menjadi salah satu strategi untuk mendulang suara dari publik di Babel.

Padahal, keberadaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah terlembaga. Artinya, siapapun pemimpin yang terpilih maka sudah dipastikan akan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada. Sebuah contoh misalnya, meskipun gubernurnya dari Pulau Bangka bukan berarti Pulau Belitung diacuhkan begitu saja dalam setiap proses pembangunan. Hal yang sama juga terjadi sebaliknya. Bahkan, jika jabatan gubernur dipegang oleh Pejabat Sementara misalnya bukan berarti tanggung jawab pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik juga berhenti begitu saja.

Begitu juga dengan mekanisme distribusi pembagian transfer keuangan daerah—baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi—untuk kabupaten/kota sudah terlembaga

dengan baik. Sederhananya, siapapun yang menjadi gubernur dan wakil gubernur di Babel telah memiliki kewenangan dan kewajiban yang melekat. Oleh karenanya, kekhawatiran untuk mendapatkan perlakuan yang kurang adil harus disingkirkan jauh-jauh dari benak kita.

Seperti yang telah disebutkan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan status yang terlembaga maka hal paling penting untuk kita lakukan adalah bagaimana mengawal proses pembangunan dan jalannya roda pemerintahan yang sudah terlembaga tadi. Dari mana memulainya? Saya menawarkan dari pengawalan visi-misi kandidat sebagai rujukan bagi kita untuk menentukan pemimpin Babel di masa mendatang.

E. Epilog: Apa yang Dikhawatirkan?

Penguatan politik berbasis primordial di Babel merupakan potret diri dari pergaulan politik lokal. Dari beberapa pengalaman Pemilu—baik beskala nasional hingga lokal—menguatkan kecenderungan dari bekerjanya politik berbasis kedaerahan yang sangat spasial antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Munculnya sentimen kedaerahan di Babel bermula pada perubahan institusional dan ketersumbatan perwakilan politik yang mengakibatkan kegelisahan dari berbagai aktor politik dan demokrasi yang ada. Bahkan untuk Pemilu 2017 yang akan datang juga menunjukkan kecenderungan yang sama.

Kondisi demikian menjadi tantangan yang sangat rumit ditengah kesadaran politik di masyarakat yang lebih mempertimbangkan sentimen emosional kedaerahan dibandingkan dengan mencermati visi-misi kandidat yang ditawarkan untuk Babel. Padahal, jalannya roda pemerintahan di Babel untuk menjadikan kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera, aman, dan damai bukan ditentukan oleh latarbelakang asal daerah

tetapi kapasitas seorang pemimpin yang dijabarkan dalam visi-misi politiknya.

Oleh karenanya, kita jangan terlalu khawatir dan disibukkan dengan permainan isu-isu putra daerah disetiap perhelatan demokrasi di aras lokal. Hal yang perlu dicemaskan adalah putra daerah yang kita banggakan dan elu-elukan ternyata tidak memiliki agenda kerja yang nyata bagi kebaikan Babel. Jadi, siapapun pemimpin yang dipilih jangan terlalu digugat latarbelakang daerahnya. Persoalkanlah program kerja yang ditawarkan semisal: bagaimana mengatasi persoalan banjir, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan serta penghentian kerusakan lingkungan yang telah mengancam dan terus membayangi—sehingga mengganggu tidur pulas— keseharian kita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Evans, Kevin. R, 2003, “Sejarah Pemilu dan Parpol di Indonesia”, PT. Arise Consultancies, Jakarta.

Salim HS, Hairus, dkk, 1999. “Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan, Prediksi, Harapan Pemilu 1999”, LKIS, Yogyakarta.

Laporan Penelitian, Tesis, Makalah:

Noor, Firman, 2008, “Demokratisasi dan Kebangkitan Politik Identitas Primordialisme di Indonesia: Akar Penyebabnya, Kecenderungan dan Alternatif Solusi”, Makalah, Tidak Dipublikasikan.

Ranto, 2014, “Perilaku Memilih Etnis Tionghoa: Studi Kasus Perilaku Memilih Masyarakat Etnis Tionghoa Pada Pemilu Legislatif DPR-Tahun 2009 di Kabupaten Bangka”, Tesis S2 Ilmu Politik UGM, Tidak Dipublikasikan.

Ranto, dkk, 2007, “Birokrasi Meritokrasi: Peluang dan Tantangan dalam Masyarakat Spasial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, Makalah, Tidak Dipublikasikan.

Tim PLOD UGM, 2004, “Sungai Kecil Buayanya Banyak: Memetakan Problema Politik Ekonomi Provinsi Baru (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)”, Draf Laporan Penelitian Integratif S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Tidak Dipublikasikan.

Media Massa/Koran Lokal:

BangkaPos, “Hidayat Arsani Lebih Ingin Darmansyah Husein atau Andrea Hirata Mendampinginya”, Kamis 25/02/2016

BangkaPos, “Gubernur Harus Orang Bangka Itu Menyesatkan”, Sabtu 27/02/2016

BangkaPos, “Mantan Bupati Bangka Calon Ideal Pendamping Rustam Maju Pilgub 2017”, Rabu, 2/02/2016